



Katalog BPS : 5101014

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI INDONESIA

Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013



BADAN PUSAT STATISTIK

© Badan Pusat Statistik

Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia
Analisis Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013

ISBN : 978-979-064-789-3
No. Publikasi : 07310.1409
Katalog BPS : 5101014

Diproduksi : Badan Pusat Statistik
Pengaruh : Dr. Suhariyanto
Penanggung Jawab : Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.
Editor : Harmawanti Marhaeni, M.Sc., Dr. Slamet Sutomo, Dr. Ir. Ivanovich Agusta, M.Si
Penulis : Rustam, S.E., M.S.E., Ema Tusianti, SST, SAB, M.T., M.Sc., Yoyo Karyono, SST, Dr.
Ir. Haerani Natali Agustini, M.Sc., Dyah Retno Prihatiningsih, Kartiana Siregar,
S.Si., Taufan Tirtayasa, Dimas Hari Santoso, S.Si., Adi Nugroho, SST, Evi Rahma
Hismadinda, SST, Fera Kurniawati, SST, Nur Putri Cahyo Utami, SST, Yuni Suci
Kurniawati, SSi, Nia Setiyawati SST, Wahyuni Andrina Sofa, SST, Ir. Ekaria MSi,
Agung Priyo Utomo, SSi, MT, Novi Hidayat Pusponegoro, SSi, MStat.
Desain Cover : Oki Heryanto, A.Md.
Desain Layout : Oki Heryanto, A.Md., Taufan Tirtayasa, SST, Dimas Hari Santoso, S.Si., Nur Putri
Cahyo Utami, SST

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014
xvi + 148 halaman; 17,6 x 25 cm

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta mengacu pada rekomendasi *Food and Agriculture Organization* (FAO), Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Sensus kali ini merupakan Sensus Pertanian keenam sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1963.

Tahap pertama pemanfaatan data ST2013 dalam bentuk kajian/analisis dilakukan BPS dengan mempublikasikan buku *Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Analisis lanjutan dilakukan BPS dengan mempublikasikan buku *Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia: Analisis Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian, Sensus Pertanian 2013*. Tujuan publikasi buku ini adalah untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian (petani) menurut karakteristik rumah tangga/petani, penguasaan lahan pertanian, akses sumber daya produktif, struktur pendapatan/penerimaan, kemiskinan multidimensi, dan ketahanan pangan rumah tangga di tingkat nasional dan provinsi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Badan Pusat Statistik RI

Dr. Suryamin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB 1. SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI	2
PENYUMBANG NILAI TAMBAH DAN PENYERAP TENAGA KERJA	2
PENYEDIA PANGAN MASYARAKAT	4
PENJAGA KESEIMBANGAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.....	4
SEKTOR PERTANIAN BELUM MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN KEPADA PETANI	5
UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.....	8
BAB 2. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERTANIAN	12
SEKTOR PERTANIAN MASIH MENJADI TUMPUAN HIDUP	12
PENDAPATAN DARI USAHA PERTANIAN MASIH MINIM	13
BEBAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN RELATIF TINGGI	13
JUMLAH PETANI GUREM BERKURANG.....	14
PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN YANG MENINGKAT	15
USAHA PERIKANAN LEBIH MENJANJIKAN	16
PARTISIPASI SEKOLAH ANGGOTA RTUP MASIH RENDAH	17
ANGGOTA RTUP BEKERJA SEBAGAI PEKERJA KELUARGA	17
PEKERJA ANAK MASIH BERSTATUS PELAJAR.....	18
PROFESI PETANI SEMAKIN TIDAK DIMINATI.....	19
PENDIDIKAN PETANI RENDAH.....	20
USAHA TANI DIDOMINASI PETANI USIA SENJA	21
BAB 3. PERKEMBANGAN LAHAN PERTANIAN	24
PERKEMBANGAN LAHAN SAWAH	25
SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN	27
BAB 4. AKSES PETANI KE SUMBER DAYA PRODUKTIF	30
AKSES TERHADAP PERMODALAN	30
AKSES TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH	32
AKSES TERHADAP KELEMBAGAAN PERTANIAN.....	33
AKSES TERHADAP SARANA PRODUKSI	36
PEMASARAN BUKAN MASALAH UTAMA	37
BAB 5. ANCAMAN KEMISKINAN BAGI PETANI.....	40
JUMLAH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN MISKIN.....	42

DAFTAR ISI

TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK.....	45
INTENSITAS KEMISKINAN PENDUDUK.....	49
INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI.....	51
BAB 6. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN.....	54
KETERSEDIAAN PANGAN.....	54
KETERJANGKAUAN PANGAN.....	59
KETAHANAN PANGAN INDONESIA.....	65
BAB 7. KESIMPULAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	80
RINGKASAN HASIL INDEPTH STUDY RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN.....	84
LAMPIRAN.....	92
CATATAN TEKNIS.....	126

DAFTAR TABEL

3.1 Luas Lahan Sawah Yang Ditanami Padi Menurut Pulau (000 Ha), 2008-2013	26
4.1 Persentase RTUP Yang Memperoleh Bantuan Kredit Menurut Sumber Pendapatan Utama Dan Kelompok Pendapatan, 2013	31
4.2 Persentase RTUP Menurut Alasan Kesulitan Pengajuan Kredit Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013	32
4.3 Persentase RTUP Menurut Sumber Bantuan Dan Sumber Pendapatan Utama	33
4.4 Persentase RTUP Menurut Akses Terhadap Kelembagaan Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013	34
4.5 Persentase RTUP Menurut Sarana Produksi Dan Penjualan Hasil Pertanian Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	36
4.6 Persentase RTUP Menurut Kesulitan Dalam Menjual Hasil Pertanian, 2013 .	37
4.7 Persentase RTUP Menurut Alasan Mengalami Kesulitan Menjual Hasil Pertanian Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013	38
5.1 Indeks Kemiskinan Multidimensi	41
5.2 Persentase RTUP Menurut Kategori Kemiskinan Multidimensi Dan Sumber Pendapatan Utama (Persen) , 2013.....	43
5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kategori Kemiskinan Multidimensional Dan Kelompok Pendapatan Dari Usaha Pertanian, 2013	44
5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lahan Dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, 2013	45
6.1 Persentase RTUP Menurut Dimensi Ketersediaan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama (Persen) , 2013.....	55
6.2 Skor Dimensi Ketersediaan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	57
6.3 Persentase RTUP Menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan Dan Sumber Pendapatan Utama (Persen) , 2013.....	60
6.4 Skor Dimensi Keterjangkauan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	61

DAFTAR TABEL

6.5 Persentase RTUP Menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan Dan Sumber Pendapatan Utama (Persen) , 2013	62
6.6 Skor Dimensi Pemanfaatan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	64

DAFTAR GAMBAR

1.1	Kontribusi PDB Sektor Pertanian Menurut Subsektor, 2003-2013.....	3
1.2	Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tenaga Kerja Menurut Sektor, 2103	3
1.3	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor, 2013	6
1.4	Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor, 2008-2013	7
1.5	Upah Buruh Tani Nominal Dan Riil, 2009-2013	7
1.6	Persentase Penduduk Miskin 15 Tahun Keatas di Perdesaan Menurut Lapangan Usaha, 2003 Dan 2013	8
2.1	Persentase RTUP Menurut Kontribusi Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013	12
2.2	Rata-Rata Pendapatan RTUP Menurut Sumber Pendapatan (Juta/Tahun), 2013	13
2.3	Kontribusi Pendapatan RTUP Menurut Sumber Pendapatan (Persen), 2013	13
2.4	Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Pulau, 2003 dan 2013	14
2.5	Rata-Rata Luas Penguasaan Lahan Pertanian Oleh RTUP, 2003 dan 2013..	15
2.6	Rata-Rata Pendapatan RTUP dari Usaha di Sektor Pertanian (Rp Juta/Tahun) Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	16
2.7	Angka Partisipasi Sekolah Anggota RTUP Menurut Kelompok Umur, 2013	17
2.8	Persentase Anggota RTUP Menurut Kegiatan Utama, 2013.....	17
2.9	Persentase Pendidikan Pekerja Anak Tahun 2013	18
2.10	Perseentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012	18
2.11	Jumlah Petani Menurut Jenis Kelamin (000 Orang), 2003 dan 2013	19
2.12	Persentase Petani Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004 dan 2013.....	20
2.13	Jumlah Petani Menurut Kelompok Umur (Ribu Orang), 2004 dan 2013.....	21

DAFTAR GAMBAR

3.1	Perkembangan Luas Lahan yang Ditanami Padi (Juta Hektar), 2004-2013.....	25
3.2	Perkembangan Luas Sawah Irigasi dan Sawah Non Irigasi (Juta Hektar), 2004-2013.....	27
3.3	Persentase Luas Lahan yang Dimiliki Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Surat Kepemilikan Lahan, 2013	28
4.1	Persentase RTUP Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013	35
4.2	Persentase RTUP Menurut Alasan Mengalami Kesulitan Memperoleh Sarana Produksi.....	37
4.3	Persentase RTUP yang Mengalami Kesulitan dalam Memperoleh Sarana Produksi Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013	37
5.1	Persentase RTUP yang Miskin Multidimensi, 2013	42
5.2	Persentase Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Tingkat Kemiskinan Pengeluaran, 2013	42
5.3	Persentase RTUP yang Miskin Multidimensi ($C \geq 33,3$) Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	43
5.4	Persentase Penduduk Miskin (Headcount) pada RTUP Menurut Provinsi (Persen) , 2013	46
5.5	Persentase Penduduk Miskin (Headcount) Menurut Sumber Pendapatan Utama RTUP (Persen) , 2013.....	47
5.6	Persentase Penduduk Miskin Menurut (Headcount) Kelompok Pendapatan Dari Sektor Pertanian (Persen) , 2013	48
5.7	Persentase Penduduk Miskin Menurut (Headcount) Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai RTUP (Persen) , 2013	48
5.8	Intensitas Kemiskinan Multidimensi Menurut Provinsi, 2013.....	50
5.9	Intensitas Kemiskinan Multidimensi pada RTUP Miskin Menurut Kelompok Pendapatan dari Usaha Pertanian (Persen) , 2013	50
5.10	Intensitas Kemiskinan Multidimensi Menurut Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai, 2013	51

DAFTAR GAMBAR

5.11	Peta Indeks Kemiskinan Multidimensi, 2013.....	52
5.12	Kontribusi Dimensi dari Provinsi Dengan MMP Terbesar Dan Terkecil, 2013.....	52
6.1	Dimensi Ketersediaan Pangan Menurut Provinsi, 2013	58
6.2	Indeks Keterjangkauan Pangan Menurut Provinsi, 2013.....	61
6.3	Indeks Pemanfaatan Pangan dari Aspek Kualitas Air Menurut Provinsi, 2013	63
6.4	Indeks Pemanfaatan Pangan dari Aspek Kebutuhan Asupan Menurut Provinsi, 2013	63
6.5	Indeks Pemanfaatan Pangan Menurut Provinsi, 2013.....	65
6.6	Peta Kerentanan Pangan Indonesia (<i>Food Security And Vulnerability Atlas</i>), 2009	66
6.7	Indeks Ketahanan Pangan Indonesia. 2013.....	67
6.8	Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kawasan Pembangunan Indonesia, 2013	68
6.9	Persentase RTUP Menurut Klasifikasi Ketahanan Pangan Menurut Kawasan Pembangunan Indonesia, 2013	68
6.10	Indeks Ketahanan Pangan Menurut Pulau, 2014	69
6.11	Persentase RTUP Menurut Klasifikasi Ketahanan Pangan dan Pulau, 2013	70
6.12	Indeks Ketahanan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013	71
6.13	Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013	72
6.14	Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Kategori Ketahanan Pangan, 2013	72

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi, 2013	92
2.	Persentase RTUP Pengguna Lahan yang Menguasai Lahan Pertanian Kurang dari 0,5 Ha Menurut Provinsi.....	93
3.	Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	94
4.	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi	95
5.	Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi	96
6.	Persentase jumlah anggota rumah tangga usaha pertanian usia 7-15 tahun menurut partisipasi sekolah	97
7.	Persentase ART Menurut Provinsi dan Pendidikan, 2013.....	98
8.	Persentase ART Menurut Provinsi dan Kegiatan Utama, 2013	99
9.	Jumlah Petani Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013.....	100
10.	Persentase Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Pendidikan dan Provinsi, 2013	101
11.	Persentase Jumlah Petani Menurut Umur dan Provinsi, 2013	102
12.	Jumlah RTUP Menurut Provinsi dan Sumber Pendapatan ART, 2013	103
13.	Rata-Rata Pendapatan RTUP Menurut Provinsi dan Sumber Pendapatan Utama	104
14.	Persentase RTUP Menurut Provinsi, Sumber Pendapatan Utama, dan Status Pekerjaan	105
15.	Persentase RTUP Menurut Provinsi dan Kontribusi Pendapatan dari Sektor Pertanian.....	106
16.	Rata-Rata Pendapatan per Kapita RTUP Menurut Provinsi	107
17.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Provinsi, 2003 dan 2013	108
18.	Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian (M ²) Menurut Provinsi, ST2003 dan ST2013	109
19.	Persentase RTUP yang sumber modal usaha pertanian dari Bank menurut provinsi, 2013.....	110
20.	Persentase RTUP yang mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi menurut provinsi, 2013	111
21.	Persentase RTUP yang mengikuti penyuluhan pertanian menurut provinsi, 2013	112
22.	Persentase RTUP yang menjadi anggota kelompok tani menurut provinsi, 2013	113

DAFTAR LAMPIRAN

23. Persentase penduduk miskin (headcount) pada RTUP menurut provinsi, 2013	114
24. Intensitas kemiskinan pada RTUP menurut provinsi (persen), 2013	115
25. Indeks kemiskinan multidimensi menurut provinsi (persen), 2013.....	116
26. Indeks Ketahanan Pangan Menurut Dimensi dan Provinsi, 2013.....	117
27. Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Provinsi dan Kategori Ketahanan Pangan, 2013.....	118
28. Dimensi Ketersediaan Pangan Menurut Skor Indikator, Aspek Kecukupan Pangan dan Provinsi	119
29. Dimensi Keterjangkauan Pangan Menurut Skor Indikator Keterjangkauan Fisik, Sosial, Ekonomi serta Provinsi	120
30. Dimensi Pemanfaatan Pangan Menurut Aspek dan Provinsi, 2013	121
31. Aspek Kecukupan Asupan Menurut Skor Indikator dan Provinsi, 2013	122
32. Aspek Kualitas Air Menurut Skor Indikator dan Provinsi, 2013.....	123

HARAPAN PETANI HIDUP SEJAHTERA DI BUMI NUSANTARA

Sebagai negara tropis, Indonesia diberi karunia luar biasa berupa kesuburan tanah yang mendukung tumbuh kembangnya berbagai jenis tumbuhan. Demikian pula sebagai negara kepulauan, karunia kekayaan laut berupa berbagai produk perikananpun berlimpah. Dengan kekayaan alam tersebut, pertanian telah menjadi bagian hidup sebagian besar penduduk, khususnya di pedesaan.

Secara ekonomi, pembangunan pertanian di Indonesia telah menunjukkan peran yang sangat besar. Meskipun kontribusi pada Produk Domestik Bruto hanya pada urutan kedua sebesar 14 persen, namun sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Tidak kurang dari 38 juta tenaga kerja atau sepertiga tenaga kerja Indonesia (BPS, Sakernas 2013) menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Meskipun sektor pertanian tidak dapat memberikan kehidupan yang cukup memadai, namun mampu menjadi sektor penyerap tenaga kerja di Indonesia.

Sebagai penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, pembangunan sektor pertanian harus mampu menyejahterakan petani. Namun demikian, pembangunan sektor pertanian masih menghadapi banyak hambatan, seperti produktivitas masih sangat rendah. Hal ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan petani. Rendahnya Nilai Tukar Petani menunjukkan pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya. Dengan kata lain surplus usaha yang diterima petani sangat minim. Selain itu, upah buruh tani sangat rendah, bahkan secara riil menurun selama periode 2009-2013. Tidak terelakkan banyak petani terjerat kemiskinan.

Pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi dan data hasil SPP2013, menunjukkan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dengan pendapatan utama sektor pertanian lebih rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi dibandingkan RTUP dengan pendapatan utama sektor non pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar RTUP, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Jika dilihat dari sebaran wilayah, RTUP dengan indeks kemiskinan multidimensi lebih tinggi berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar provinsi di Indonesia dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Upaya untuk mengentaskan RTUP dari kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas. Namun demikian, dukungan faktor tenaga kerja dan faktor produksi masih menjadi hambatan. Dari sisi tenaga kerja, sumber daya manusia di pertanian berpendidikan sangat rendah dan lebih banyak pada usia tua.

Dari sisi faktor produksi, lahan yang dikuasai rata-rata berskala kecil sehingga mempengaruhi rendahnya kuantitas produk pertanian yang dihasilkan. Disamping itu, akses RTUP terhadap sumber daya produktif juga masih minim. Salah satunya adalah sangat sulit mengakses bank dengan berbagai alasan, terutama mengenai kesulitan agunan dan proses yang berbelit-belit. Dikhawatirkan hal ini membawa para petani untuk memanfaatkan pinjaman dari para tengkulak atau rentenir dengan bunga tinggi.

Selain itu, akses terhadap kelembagaan seperti kelompok tani hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil RTUP yaitu sekitar 30 persen. Padahal kelompok tani menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan program dan informasi guna meningkatkan usaha tani. Penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan oleh para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga belum dimanfaatkan oleh RTUP. Hanya kurang dari 20 persen RTUP yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Padahal manfaat penyuluhan sangat besar untuk meningkatkan produk pertanian, yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan usaha pertanian.

Dengan berbagai hambatan pada seluruh aspek usaha tani, pendapatan pertanian tidak dipungkiri menjadi sangat terbatas. Data SPP 2013 menunjukkan bahwa rata-rata seluruh pendapatan RTUP sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Sementara dari usaha pertanian saja hanya sekitar Rp 1 juta per bulan. Dengan minimnya pendapatan dari pertanian, maka RTUP tidak sepenuhnya menggantungkan mata pencaharian dari sektor ini. Oleh karenanya bekerja pada sektor lain menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan RTUP.

Di balik berbagai keterbatasan pada usaha pertanian, masih terdapat harapan terkait dengan ketahanan pangan RTUP. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) masih cukup menggembirakan. Sebagian besar RTUP terkategori berketahanan pangan cukup dan tinggi. Namun nilai IKP di luar wilayah Indonesia Bagian Timur masih tertinggal. Masalah transportasi dan infrastruktur sangat berpengaruh pada distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai kebijakan pemerintah ikut berpengaruh terhadap nilai IKP yang tinggi pada RTUP di Indonesia. Program pembagian beras miskin meringankan kebutuhan pangan dasar RTUP. Di samping itu bantuan-bantuan lain dalam bidang pendidikan dan kesehatan juga turut meringankan beban RTUP, khususnya RTUP miskin.

Yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak adalah mengatasi segala rintangan yang menghambat peningkatan produk pertanian. Karena peningkatan tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan petani secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia.





KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA

“Meskipun hanya menyumbang nilai tambah sebesar 14 persen, namun sektor pertanian telah menjadi mata pencaharian sekitar 30 persen angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, kesejahteraan petani masih rendah, tercermin dari rendahnya daya beli petani dan rendahnya upah buruh tani.”





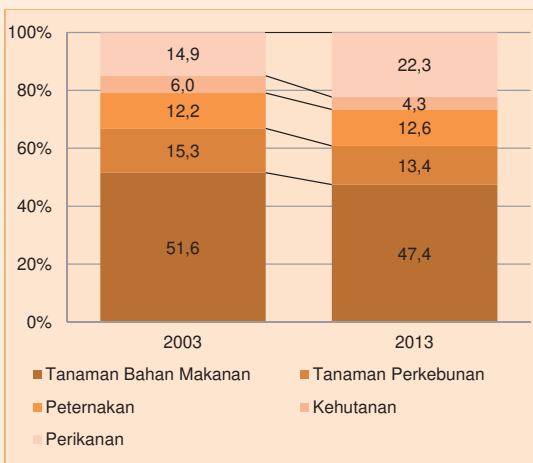
BAB I SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang membangun perekonomian di Indonesia disamping sektor-sektor lainnya. Di satu sisi, peran sektor pertanian bagi penduduk Indonesia sangat besar, antara lain memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian, menampung sebagian besar tenaga kerja Indonesia, dan menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Disamping itu, sektor pertanian juga ikut menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Namun, disisi lain sektor pertanian ternyata belum memberikan kesejahteraan kepada petani karena daya beli petani masih rendah dan upah buruh di sektor pertanian secara riil menurun. Dengan demikian, tidak dapat dihindarkan bahwa para petani masih bergulat dengan kemiskinan.

PENYUMBANG NILAI TAMBAH DAN PENYERAP TENAGA KERJA

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Selama lebih dari satu dasawarsa kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Namun demikian kontribusinya semakin kecil seiring dengan transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri manufaktur dan jasa. Pada tahun 2003 kontribusi sektor ini sebesar 15,2 persen, kemudian menurun menjadi 14,4 persen pada tahun 2013.

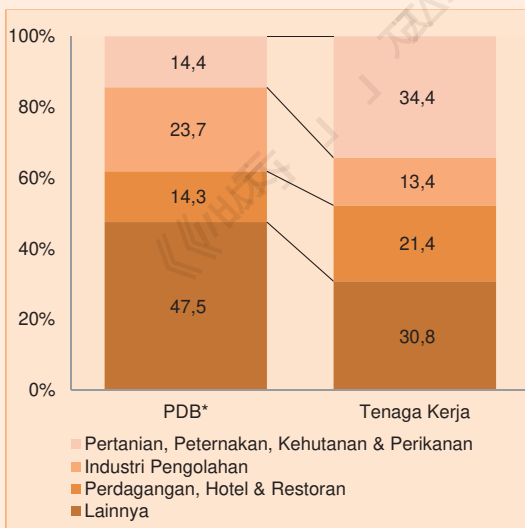
Salah satu subsektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB sektor pertanian adalah subsektor perikanan. Subsektor perikanan memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap PDB sektor pertanian, yaitu meningkat dari 15 persen pada tahun 2003 menjadi 22 persen pada tahun 2013. Hal tersebut beralasan karena Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Dengan panjang pantai hampir 25 persen panjang pantai dunia. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat besar. Peningkatan kontribusi nilai tambah subsektor perikanan ini memberikan harapan yang besar bagi kebangkitan ekonomi Indonesia dari hasil perairan.



Gambar 1.1.
Kontribusi PDB Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor, 2003-2013

Sumber: BPS, PDB 2003 dan 2013

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor komoditi perkebunan Indonesia mencapai 32,5 miliar US\$ pada tahun 2012 (Kementan, Statistik Pertanian 2013). Hal ini memberikan indikasi bahwa pengembangan komoditi-komoditi pertanian di Indonesia masih mungkin dilakukan, apabila dikelola dengan lebih baik.



Gambar 1.2.
Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tenaga Kerja Menurut Sektor, 2013

Sumber: BPS, PDB 2013 dan Sakernas 2013

ini, atau setara dengan 38 juta tenaga kerja (BPS, 2013). Artinya, peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum tergantikan. Ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian menampung tenaga kerja yang tidak mampu diterima oleh sektor lainnya.

Selain subsektor perikanan, subsektor perkebunan juga memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Meskipun kontribusinya hanya sebesar 13 persen dari PDB pertanian, namun subsektor ini mampu menghasilkan komoditi ekspor andalan Indonesia, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Komoditi-komoditi perkebunan telah menghasilkan devisa yang besar dari hasil ekspor

Begitu besarnya potensi pertanian Indonesia sehingga telah melekat pada kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia sejak zaman dahulu. Meskipun kini sektor pertanian hanya memberikan nilai tambah perekonomian nasional sekitar 14 persen, namun masih menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat (Gambar 1.2). Tidak kurang dari sepertiga tenaga kerja Indonesia menggantungkan kehidupannya dari sektor

Meskipun tidak selalu memberikan kehidupan yang cukup memadai, namun sektor pertanian mampu menjadi *safety net* penyerapan tenaga kerja. Kemampuan ini berkaitan dengan sifatnya yang masih konvensional dan tidak mensyaratkan kemampuan pekerja yang tinggi. Ini didukung fakta bahwa tingkat pendidikan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian masih lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor lain. Sekitar 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian berpendidikan maksimal tamat sekolah dasar (BPS, 2013).

PENYEDIA PANGAN MASYARAKAT

Sebagai negara tropis yang dilimpahi kesuburan, Indonesia dianugerahi beraneka ragam jenis tanaman, dan juga berbagai jenis kekayaan laut yang berlimpah. Sumberdaya tanaman dan kekayaan laut tersebut merupakan sumber pangan masyarakat Indonesia. Salah satu sumber pangan Indonesia adalah beras yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Produktivitas komoditi beras Indonesia tergolong tinggi untuk negaranegara ASEAN. Berdasarkan data *Food and Agricultural Organisation* (FAO), Indonesia hanya kalah dari Vietnam saja.

Di sisi lain, nilai produk perikanan Indonesia mengalami peningkatan rata-rata lebih dari 11 persen per tahun selama 10 tahun terakhir. Bahkan ekspor produk perikanan Indonesia rata-rata tumbuh hampir 16 persen pertahun (Kementan, Statistik Perikanan 2013). Indikasi lain yang menunjukkan peningkatan kinerja produksi pangan adalah peringkat *Logistic Performance Index* Indonesia mengalami peningkatan dari ranking 75 pada tahun 2010 menjadi ranking 53 pada tahun 2014 (*World Bank*, 2014).

Peningkatan kinerja produksi seluruh komoditi pangan dilakukan dalam upaya mendukung ketersediaan pangan di dalam negeri. Disamping itu, peningkatan tersebut juga ditujukan untuk menunjang dan mewujudkan kemandirian pangan. Pada saat ini Indonesia masih tergantung produk impor, khususnya produk pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan gandum, serta produk-produk peternakan seperti daging dan susu.

PENJAGA KESEIMBANGAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Selain sebagai sarana penghasil produk pertanian, lahan pertanian juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Disatu sisi, kegiatan pertanian diperlukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya aktivitas pertanian, kondisi tanah, air udara dan

habitat didalamnya terjaga kelangsungannya. Namun disisi lain penggunaan berbagai bahan kimia seperti pupuk dan obat-obatan yang kurang tepat, akan berpengaruh terhadap kualitas air dan tanah di sekitar lahan pertanian. Begitu pula dengan pembakaran sisa tanaman, penyemprotan obat anti hama, dan penggunaan pupuk berbasis nitrogen, akan berdampak pada kualitas udara di sekitarnya. Penebangan hutan yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah.

Oleh sebab itu praktik pertanian yang dianjurkan adalah yang tidak merusak ekosistem disekitarnya antara lain pemilihan spesies dan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan; penganekaragaman tanaman dan hewan sesuai budaya masyarakat lokal untuk mendorong stabilitas lingkungan; dan pengelolaan lahan pertanian yang melindungi kualitas tanah. Demikian pula partisipasi aktif berbagai pihak perlu diupayakan, termasuk dari sisi regulasi. Dengan demikian, pembangunan pertanian di Indonesia diharapkan berfungsi optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

SEKTOR PERTANIAN BELUM MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN KEPADA PETANI

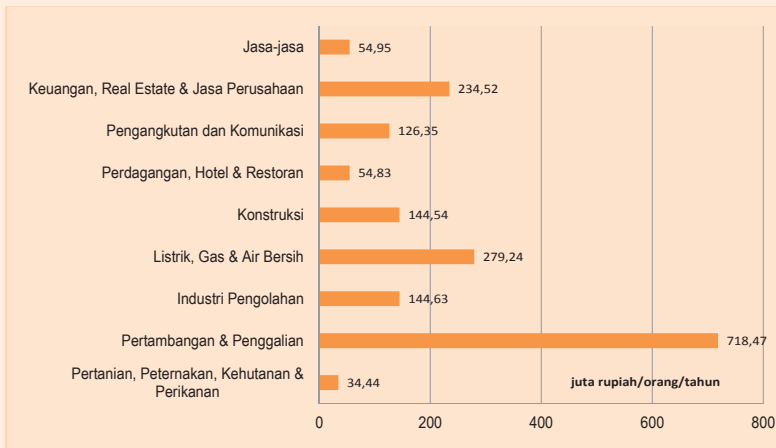
Sebagai penghidupan sebagian besar masyarakat, pengembangan sektor pertanian harus mampu menyejahterakan petani dan buruh tani. Peningkatan kesejahteraan petani secara langsung akan mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini, peningkatan kinerja sektor pertanian tampaknya masih menghadapi banyak hambatan. Ini berdampak pada kesejahteraan petani yang belum menikmati hasil usaha pertanian secara optimal.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani dijelaskan oleh beberapa indikator antara lain nilai tukar petani (NTP), upah buruh tani, dan tingkat kemiskinan petani. Ketiga indikator ini merupakan dampak dari rendahnya produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian.

Produktifitas Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Masih Rendah

Meskipun kontribusi terhadap PDB hanya 14 persen, sektor pertanian berperan dalam menampung lebih dari sepertiga tenaga kerja Indonesia. Sayangnya, dibanding sektor lain ternyata produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian paling rendah, yaitu hanya Rp 34,44 juta/orang/tahun. Jika dibandingkan dengan sektor industri yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDB, produktivitas sektor pertanian kurang dari seperempatnya. Bahkan jika dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian, produktivitas sektor pertanian hanya kurang dari seperduapuluh (Gambar 1.3).

Gambar 1.3.
Produktifitas Tenaga
Kerja Menurut Sektor,
2013



Sumber: BPS, PDB 2003 dan 2013

Rendahnya produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, dipengaruhi oleh rendahnya skala usaha pertanian, pendidikan petani, dan kualitas pengelolaan usaha tani. Tingkat inovasi dan penerapan teknologi yang rendah penerapannya mengakibatkan produktivitas lahan menjadi tidak maksimal. Disamping itu, pemberdayaan petani dirasa masih belum optimal, sehingga turut mempengaruhi produktivitasnya.

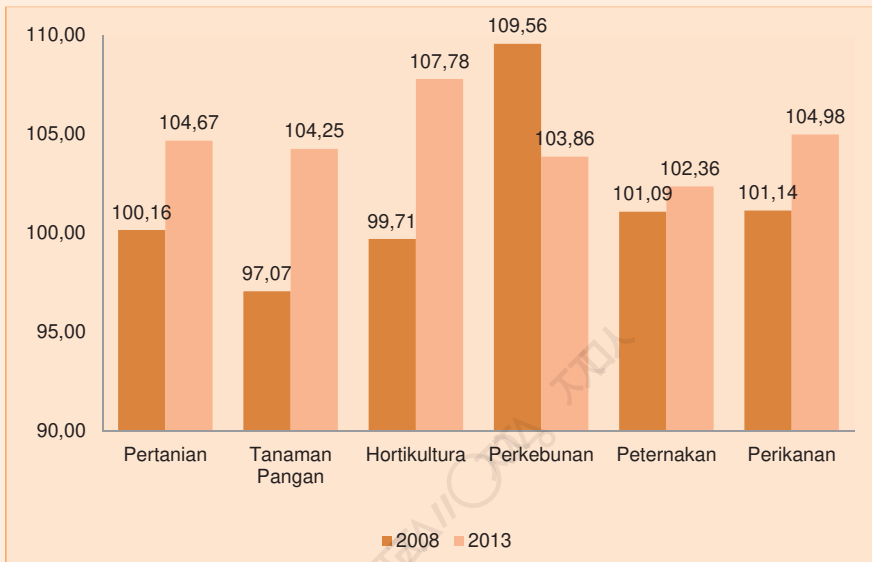
Menurut Wahyunindyawati et al (2003) inefisiensi di sektor pertanian antara lain disebabkan oleh rendahnya penerapan teknologi oleh petani, karena tingkat pendidikan petani yang rendah, informasi teknologi baru yang masih kurang, dan usaha tani yang belum berorientasi pasar. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM menjadi pendorong peningkatan produktivitas petani.

Rendahnya produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh berkurangnya lahan akibat konversi lahan pertanian, khususnya di Jawa. Terbatasnya penguasaan lahan oleh petani mengakibatkan pengelolaan usaha pertanian tidak optimal. Dari sisi infrastruktur, terbatasnya lahan sawah yang terintegrasi dalam sistem irigasi menyebabkan terganggunya produksi pertanian, khususnya pada musim kemarau.

Rendahnya Pendapatan Petani

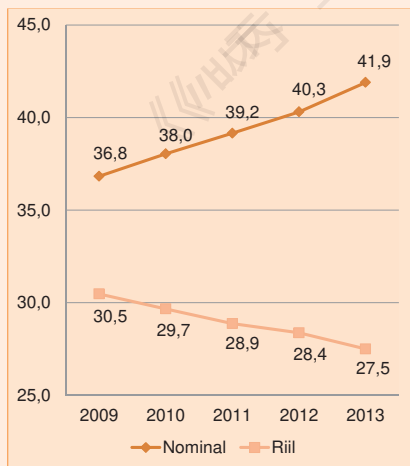
Salah satu dampak dari rendahnya produktivitas adalah rendahnya pendapatan petani maupun buruh tani. Selama 3 tahun terakhir pendapatan petani dilihat dari NTP yang relatif stabil selama periode 2011-2013 pada angka 104. Hal ini menunjukkan pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluaran konsumsinya. Dengan kata lain kelebihan pendapatan yang diterima petani sangat rendah.

Di antara subsektor pertanian, peternakan mempunyai nilai NTP paling rendah, yaitu hanya 102,36. Artinya surplus pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga peternakan sangat kecil. Subsektor dengan NTP paling tinggi adalah hortikultura. Hal ini menunjukkan bahwa hortikultura paling menguntungkan di antara subsektor pertanian lainnya (Gambar 1.4).



Gambar 1.4. Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor, 2008-2013

Sumber: BPS, Nilai Tukar Petani 2008 dan 2013



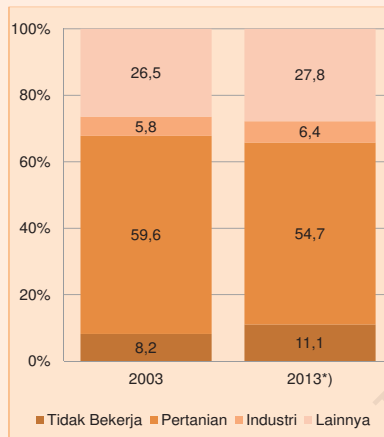
Gambar 1.5. Upah Buruh Tani Nominal dan Riil, 2009-2013

Sumber: BPS, Upah Buruh Tani 2009 dan 2013

Dari sisi upah buruh, meskipun secara nominal meningkat, namun upah buruh tani secara riil menurun. Jika dilihat secara nominal upah petani perhari selama periode 2009-2013 meningkat dari 36,8 ribu rupiah menjadi 41,9 ribu rupiah. Namun upah nominalnya berkurang dari 30,5 ribu rupiah menjadi 27,5 ribu rupiah (Gambar 1.5). Hal ini mengakibatkan daya beli buruh pertanian juga semakin turun, sehingga tidak mustahil jika semakin banyak buruh tani yang terjerat kemiskinan.

Rumah Tangga Usaha Pertanian Masih Bergulat dengan Kemiskinan

Rendahnya pendapatan menyebabkan petani dan buruh tani masuk dalam kemiskinan. Pada tahun 2013, dari 28 juta penduduk miskin di Indonesia di perdesaan, lebih dari 50 persennya adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian (Gambar 1.6). Salah satu penyebabnya adalah sempitnya penguasaan lahan. Hasil ST2013 menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan pertanian hanya 0,88 hektar. Dengan luas lahan tersebut, tidak dapat memberikan pendapatan petani yang cukup untuk menghidupi rumah tangga dan pengembangan usaha pertanian.



Gambar 1.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Perdesaan Menurut Lapangan Usaha, 2003 dan 2013.

Sumber: BPS, Penghitungan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Menurut Yosnofrizal (2011), kemiskinan petani juga disebabkan oleh harga komoditi pertanian, selain luas lahan. Dalam tata niaga hasil pertanian, petani adalah kelompok yang paling dirugikan dalam masalah harga. Harga di tingkat petani tidak menguntungkan, justru pedagang yang menikmati keuntungan besar. Selain itu usaha pertanian yang dilakukan masih banyak yang masih tradisional dan hanya bersifat subsisten saja, sehingga produktivitasnya rendah.

Sebagai sektor penghasil pangan, pertumbuhan pertanian harus menjadi perhatian yang sangat serius. Dengan meningkatkan kinerja sektor pertanian berarti meningkatkan kesejahteraan bagi lebih dari 30 persen tenaga kerja di Indonesia. Hal ini akan memberikan implikasi ke sektor lainnya, karena sektor pertanian merupakan sektor hulu penggerak seluruh sektor ekonomi. Oleh sebab itu, jika ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja sektor pertanian.

UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani, Indonesia perlu meningkatkan berbagai upaya untuk membangun sektor pertanian secara optimal. Berbagai upaya tersebut antara lain berupa peningkatan sumberdaya manusia, lahan, infrastruktur, kelembagaan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Pertanian

Sebagai pelaku penggerak sektor pertanian, sumber daya manusia pada sektor pertanian perlu menjadi perhatian utama. Selama ini kualitas sumberdaya petani masih sangat rendah. Lebih dari 70 persen petani hanya sampai lulus SD; bahkan yang tidak bersekolah lebih dari 30 persen. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, sulit bagi petani untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan produktivitas usaha tani, apalagi ketika harus berhubungan dengan teknologi pertanian.

Pelaku usaha tani lain adalah tenaga penyuluh, pengamat organisme pengganggu tanaman, pengawas benih tanaman, serta tenaga kesehatan hewan. Selama ini jumlah para petugas tersebut sangat terbatas. Sebagai contoh, pada tahun 2014 jumlah penyuluh pertanian mencapai sekitar 48 ribu orang, sementara itu terdapat 75 ribu desa/kelurahan. Jika mengacu pada target satu penyuluh untuk setiap desa sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, masih diperlukan tambahan 27 ribu penyuluh pertanian. Oleh sebab itu para sarjana pertanian harus mampu dimanfaatkan secara optimal menjadi tenaga penyuluh pertanian dan tidak mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Meningkatkan Akses Petani ke Sumber Daya Produktif

Dukungan kredit bagi petani saat ini masih terbatas. Salah satu jenis kredit yang ditujukan bagi petani adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi untuk mendukung program ketahanan pangan. Namun, persyaratan agunan berupa sertifikat menjadi penghambat dalam hal penyaluran kredit. Oleh sebab itu akses petani dalam hal finansial menjadi terkendala. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki petani, maka penerapan teknologi baru dalam upaya peningkatan produktivitas menjadi terbatas. Pada gilirannya hal itu akan membatasi peningkatan nilai tambah. Di sisi lain akan mengakibatkan ketergantungan petani kepada rentenir dan pengijon. Untuk menghindari hal tersebut, revisi terhadap kebijakan lembaga keuangan seperti memperingan persyaratan kredit khususnya bagi petani sangat dibutuhkan.

Peningkatan usaha tani juga perlu didukung lembaga penyuluhan dan kelompok tani. Saat ini lembaga penyuluhan pertanian kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan, dukungan, dan diseminasi teknologi. Ini menghambat penerapan teknologi dan efisiensi usaha tani. Data SPP 2013 menunjukkan hanya 18,5 persen rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Sementara kelompok tani juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Tercatat hanya sekitar 30 persen petani yang menjadi anggota kelompok tani (SPP 2013). Menurut Wahyuni (2003), kelompok tani sering diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum berperan sebagai upaya pemberdayaan yang lebih mendasar. Oleh sebab

itu perlu adanya evaluasi mengenai kedua lembaga petani ini agar berfungsi optimal untuk meningkatkan kinerja usaha tani sekaligus menambah pendapatan petani

Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015 memaksa setiap negara di ASEAN wajib menghilangkan batas dan rintangan perdagangan, investasi serta membuka kran ekspor impor seluas-luasnya. Oleh sebab itu, produk pertanian Indonesia harus mampu bersaing dengan produk luar, jika tidak ingin pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Saat ini beberapa komoditi pangan masih tergantung kepada impor, seperti beras, jagung, gandum, dan kedelai. Disamping itu, produk-produk impor hortikultura seperti buah-buahan dari luar juga membanjiri pasar dalam negeri. Jika hal ini tidak tidak diatasi, maka petani kita akan semakin terpuruk.

Terkait daya saing, saat ini sektor pertanian menghadapi beberapa permasalahan seperti standardisasi produk dan prosesnya, kandungan pangan yang aman dan rendah residu kimia, integrasi pengelolaan rantai pasok, serta peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan (Kementan, Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019). Keempat hal tersebut harus dipenuhi, agar produk pertanian kita bisa diterima konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu upayanya melakukan standardisasi produk pertanian dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Standardisasi meliputi pengolahan pertanian, penanganan, pengolahan, distribusi, sampai dengan penjualannya. Dengan komitmen yang tinggi, seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, produk Indonesia akan diterima dan memiliki harga yang kompetitif.

Saat ini, beberapa komoditi pertanian Indonesia sudah mampu menjadi andalan ekspor Indonesia, seperti produk perkebunan dan perikanan laut. Tidak menutup kemungkinan, komoditi lainnya yang menyimpan potensi yang besar sebagai andalan ekspor Indonesia, seperti produk buah-buahan lokal, tanaman hias, ikan hias, dan lain-lain. Peningkatan daya saing secara langsung akan memperluas pasar produk pertanian Indonesia. Dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri.

2

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERTANIAN

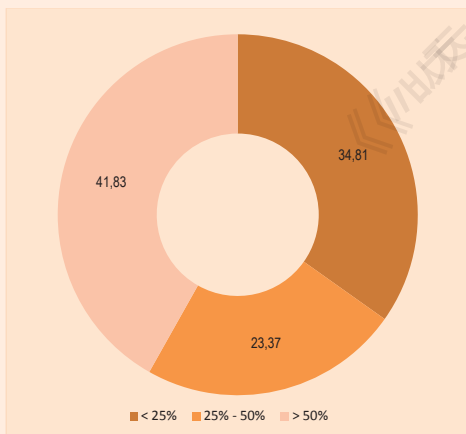
“Rata-rata pendapatan perbulan bagi rumah tangga usaha pertanian sangat rendah, hanya sekitar 2,2 juta rupiah. Kontribusi pendapatan dari usaha pertanian hanya kurang dari setengahnya, yaitu hanya sekitar 1 juta rupiah.”



BAB 2 KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERTANIAN

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi sektor andalan karena sebagian besar rumah tangga di Indonesia masih menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Akan tetapi, pendapatan yang diperoleh RTUP masih minim, walaupun penguasaan lahan secara rata-rata meningkat. Dengan demikian, banyak anggota rumah tangga RTUP yang bekerja lagi di luar kegiatan usaha tani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, rumah tangga tani menanggung beban ketergantungan jumlah anggota rumah tangga yang relatif tinggi sehingga menambah beban biaya hidup rumah tangga tani.

SEKTOR PERTANIAN MASIH MENJADI TUMPUAN HIDUP



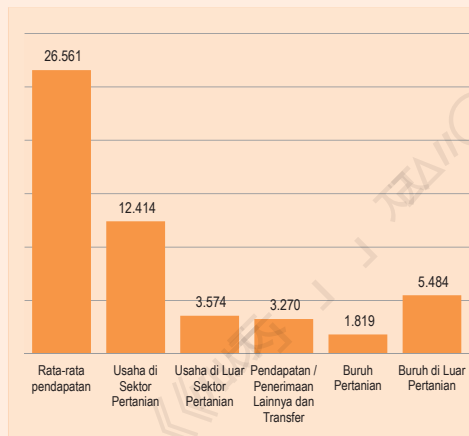
Gambar 2.1
Persentase RTUP Menurut Kontribusi Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013

Sumber: ST2013-SPP, BPS

Sektor pertanian masih menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar rumah tangga di Indonesia. Data hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) Sensus Pertanian 2013 dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa sekitar 40 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia berusaha di sektor pertanian. Hasil ST2013 juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 42 persen dari RTUP yang memperoleh pendapatan lebih dari setengahnya berasal dari sektor pertanian (Gambar 2.1). Tetapi, hasil ST-2013-L juga menunjukkan bahwa ketertarikan RTUP untuk berusaha di sektor pertanian semakin berkurang. Selama satu dekade terakhir jumlah RTUP menurun cukup signifikan, yaitu dari sekitar 31 juta rumah tangga pada tahun 2003 menjadi sekitar 26 juta pada tahun 2013.

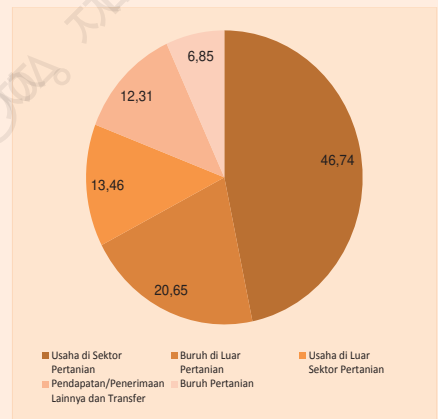
PENDAPATAN DARI USAHA PERTANIAN MASIH MINIM

Tingkat kesejahteraan petani sangat erat berhubungannya dengan keadaan usaha tani karena usaha tani merupakan sumber pendapatan petani. Berdasarkan hasil SPP 2013, rata-rata pendapatan RTUP berjumlah Rp 26,6 juta per tahun atau sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Dan ternyata pendapatan dari usaha pertanian secara rata-rata hanya menghasilkan Rp 12,4 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan. Demikian sulit bagi RTUP untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidup tanpa bekerja di luar usaha pertanian. Secara persentase, pendapatan dari usaha di sektor pertanian hanya mencakup 46,7 persen dari total pendapatan RTUP. Sementara pendapatan yang disumbang dari luar usaha pertanian mencapai 53,3 persen. Sepertinya RTUP juga berusaha mendapatkan tambahan pendapatan diluar usaha pertanian. Kondisi tersebut juga didukung oleh hasil *indepth study*¹, dimana mereka bekerja di sektor informal seperti tukang ojek, tukang cuci dan setrika, dan lain-lain.



Gambar 2.2 Rata-rata Pendapatan RTUP Menurut Sumber Pendapatan (Juta/Tahun), 2013.

Sumber : ST2013-SPP, BPS



Gambar 2.3. Kontribusi Pendapatan RTUP Menurut Sumber Pendapatan (Persen), 2013.

BEBAN DAN RASIO KETERGANTUNGAN RELATIF TINGGI

Rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada RTUP memberikan gambaran beban jumlah tanggungan dalam rumah tangga tersebut. Dari sudut pandang yang positif, jumlah anggota rumah tangga merupakan aset bagi petani karena anggota rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai pekerja dalam

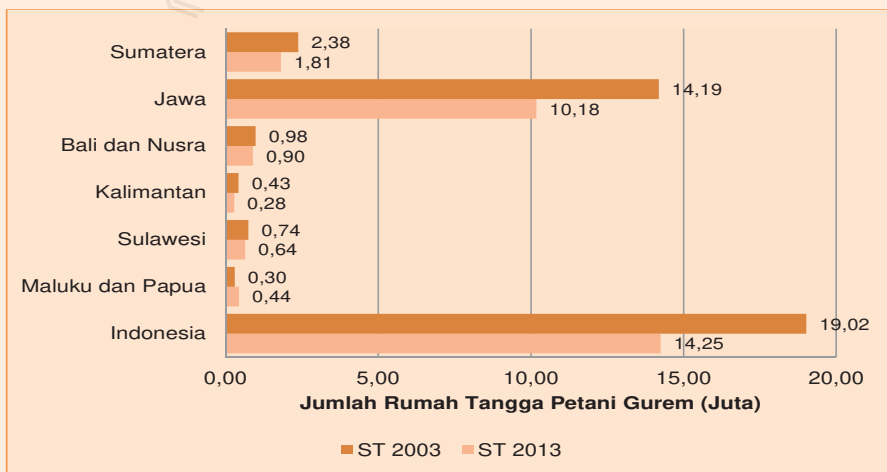
¹ Dilakukan di 8 provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan) dengan mewawancarai rumah tangga pertanian dan kelompok tani terkait dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga.

mengelola usaha tani. Namun pada sisi lain, jumlah tanggungan keluarga merupakan beban bagi kepala keluarga karena berarti harus membiayai segala macam kebutuhan hidup yang diperlukan; terlebih lagi jika banyak anggota rumahtangga yang berusia tidak produktif.

Hasil SPP 2013 menunjukkan bahwa rata-rata RTUP harus menanggung sekitar 4 anggota rumah tangga, dengan rasio ketergantungan RTUP sebesar 51,1 persen. Ini berarti bahwa dari 100 anggota rumah tangga terdapat sekitar 51 orang diantaranya yang berusia tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan artinya semakin banyak penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Artinya dengan pendapatan yang minim, RTUP harus menanggung beban hidup yang cukup tinggi. Provinsi NTT merupakan propinsi dengan rasio ketergantungan yang mencapai hampir 79 persen, sedangkan rasio ketergantungan di DKI Jakarta merupakan yang terendah (38 persen).

JUMLAH PETANI GUREM BERKURANG

Rendahnya rata-rata pendapatan dari usaha pertanian berkaitan erat dengan fakta bahwa sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani tanaman pangan dengan penguasaan lahan yang sempit. Berdasarkan hasil ST 2013, hampir sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar atau kerap disebut sebagai petani gurem. Jumlah rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 14,2 juta rumah tangga atau sebesar 55,3 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 4,8 juta rumah tangga atau turun 25,1 persen dibandingkan tahun 2003.



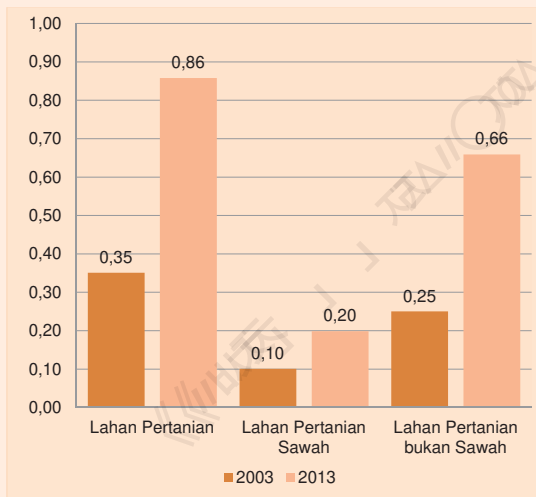
Gambar 2.4.
Jumlah Rumah
Tangga Petani Gurem
Menurut Pulau, 2003
dan 2013.

Sumber : ST2013-SPP, BPS

Berkurangnya jumlah rumah tangga petani gurem dapat mengindikasikan dua hal, yaitu semakin membaiknya kehidupan petani atau justru memberikan gambaran petani dengan lahan sempit semakin terpinggirkan karena kalah bersaing dengan para petani kaya dan mereka kemudian lebih memilih untuk beralih ke sektor lainnya. Hasil ST 2013 menunjukkan bahwa indikasi pertama merupakan alasan terkuat dalam kasus petani gurem di Indonesia saat ini. Hal ini sesuai dengan hasil penguasaan lahan yang semakin meningkat.

Jika dilihat menurut pulau, kontribusi terbesar berada di Pulau Jawa sebanyak 10,2 juta rumah tangga atau 76,4 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Sedangkan komposisi rumah tangga petani gurem terkecil berada di Pulau Kalimantan sebanyak 0,3 juta rumah tangga atau 18,5 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan (Gambar 2.4).

PENGUSAHAAN LAHAN PERTANIAN YANG MENINGKAT



Gambar 2.5.
Rata-rata Luas Penguasaan Lahan Pertanian oleh RTUP, 2003 dan 2013

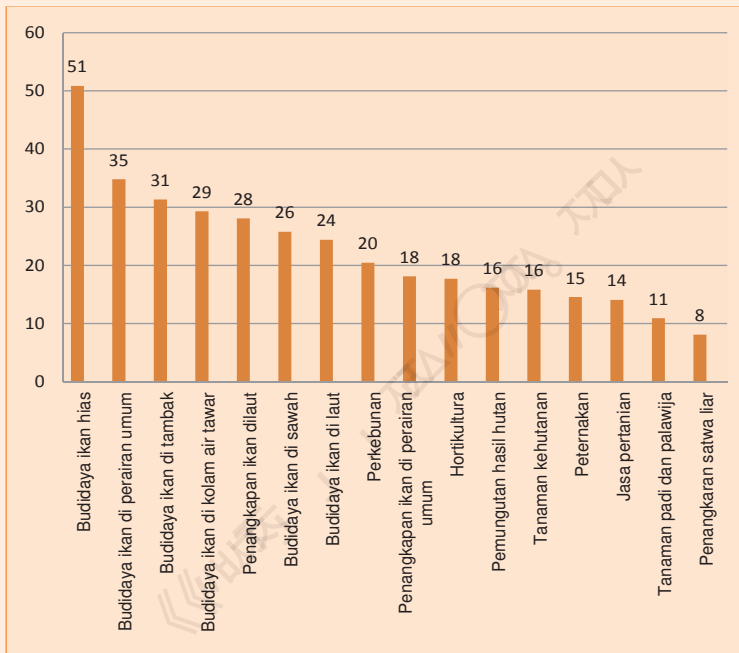
Sumber : ST2013-SPP, BPS

Luas lahan yang dikuasai petani sangat menentukan tingkat pendapatan yang mereka terima. Lahan yang luas akan menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi sehingga penghasilan petani semakin tinggi. Berdasarkan hasil ST 2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai RTUP adalah sebesar 0,86 Ha. Rata-rata penguasaan lahan tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2003 yang hanya 0,35 Ha (Gambar 2.5.). Peningkatan rata-rata penguasaan lahan pertanian bisa dipandang sebagai keberhasilan program pemerintah dalam mencetak lahan pertanian baru baik lahan sawah maupun lahan kering pada tahun 2006-2010.

Namun, upaya pencetakan lahan pertanian yang baru, terutama lahan sawah, masih perlu digalakkan. Rata-rata penguasaan lahan sawah tahun 2013 hanya 0,2 Ha. Peningkatannya juga sangat kecil yaitu hanya 0,1 Ha selama periode sepuluh tahun. Hal ini terkait dengan peran penting lahan sawah, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi kebutuhan masyarakat.

USAHA PERIKANAN LEBIH MENJANJIKAN

Berdasarkan hasil ST2013-SPP, usaha dari subsektor perikanan terutama usaha budidaya ikan hias lebih memberikan hasil usaha yang lebih baik dibandingkan dengan subsektor lainnya. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut berjumlah sekitar Rp 51 juta per tahun atau setara dengan Rp 4 juta per bulan (Gambar 2.6). Karena dijual dengan sistem per ekor bukan per kilogram, dan pola pemeliharaan ikan hias yang sama dengan ikan konsumsi, maka budidaya ikan hias mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar.



Gambar 2.6.

Rata-rata Pendapatan RTUP dari Usaha di Sektor Pertanian (Rp Juta/Tahun) Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber : ST2013-SPP, BPS

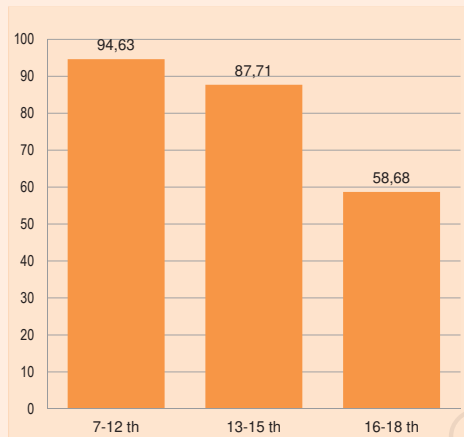
Rata-rata pendapatan yang cukup tinggi dari usaha di subsektor perikanan sayangnya tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja. Jumlah rumah tangga yang berusaha di subsektor tersebut masih relatif sedikit, yaitu hanya 3 persen dari seluruh RTUP. Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan nampaknya masih perlu dioptimalkan lagi, salah satunya dengan mendorong rumah tangga untuk berusaha di subsektor perikanan.

Sementara itu rata-rata pendapatan RTUP yang berusaha di subsektor tanaman padi dan palawija merupakan yang terendah kedua setelah usaha penangkaran satwa liar. Padahal jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi dan palawija paling banyak dibandingkan dengan usaha lainnya. Rata-rata pendapatan yang berusaha di subsektor tanaman padi dan palawija berjumlah hanya Rp 11 juta per tahun atau sekitar Rp 900 ribu per bulan. Rendahnya rata-rata pendapatan dari subsektor

tanaman pangan tersebut patut menjadi perhatian mengingat perannya yang cukup strategis terutama dalam hal penyediaan pangan bagi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

PARTISIPASI SEKOLAH ANGGOTA RTUP MASIH RENDAH

Berdasarkan hasil ST2013-SPP, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anggota

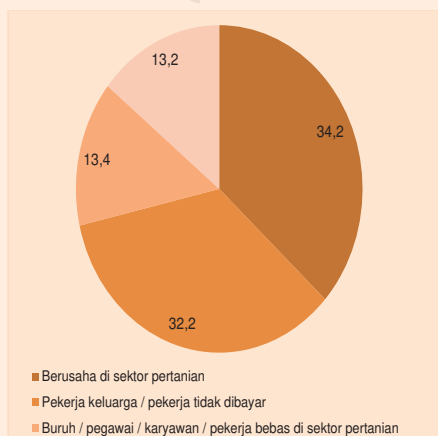


Gambar 2.7.
Angka Partisipasi Sekolah Anggota RTUP Menurut Kelompok Umur, 2013

Sumber : ST2013-SPP, BPS

RTUP yang berusia 7-12 tahun berada di sekitar 95 persen. Hal ini berarti belum semua anak usia 7-12 mengenyam pendidikan dasar. Akan tetapi, APS terlihat memiliki tendensi yang semakin rendah seiring dengan bertambahnya umur (Gambar 2.7). Rendahnya partisipasi sekolah pada umur yang lebih tinggi berkaitan erat dengan biaya pendidikan yang relatif mahal (BPS, 2011). Pendapatan dari sektor pertanian yang minim membuat RTUP lebih menitikberatkan pengeluarannya untuk konsumsi makanan. Sedangkan untuk konsumsi non makanan seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan tidak ditempatkan sebagai kebutuhan utama. Selain biaya, akses ke sekolah yang jauh juga menjadi penghambat penyerapan anak usia sekolah (BPS, 2011).

ANGGOTA RTUP BEKERJA SEBAGAI PEKERJA KELUARGA



Gambar 2.8.
Persentase Anggota RTUP Menurut Kegiatan Utama, 2013

Sumber : ST2013-SPP, BPS

Pendapatan petani yang minim dan jumlah tanggungan keluarga yang tidak sedikit mendorong anggota RTUP turut bekerja untuk meringankan beban keluarga.

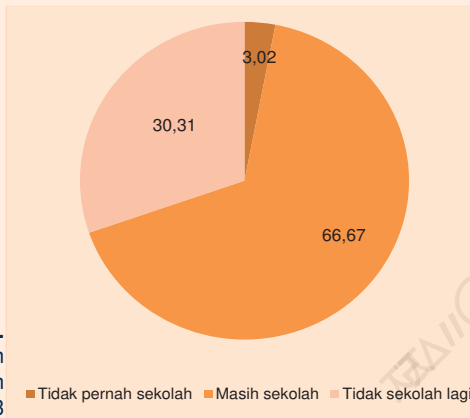
Masih banyak anggota RTUP yang menjadi pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (32 persen). Hasil Sakernas Februari 2014 menunjukkan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar banyak terdapat di lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, yaitu sekitar 13,2 juta orang. Karakteristik pekerja keluarga/pekerja

tidak dibayar ini didominasi perempuan atau mereka yang hanya lulusan Sekolah Dasar.

PEKERJA ANAK MASIH BERSTATUS PELAJAR

Seseorang dianggap sebagai pekerja anak jika (BPS, 2009):

- Berumur 10-12 tahun,
- Anak-anak yang berumur 13-14 tahun tetapi memiliki jam kerja lebih dari 15 jam seminggu, dan
- Anak-anak yang berumur 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu.

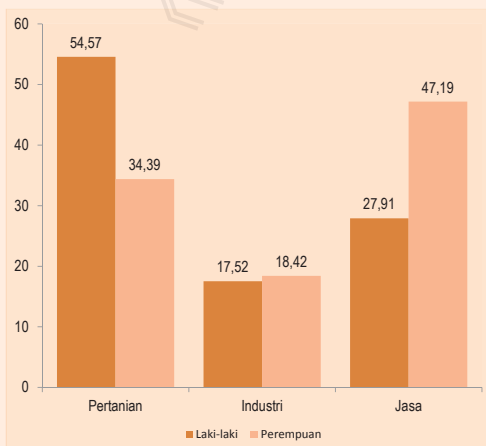


Gambar 2.9.
Persentase Pendidikan
Pekerja Anak Tahun
2013

Sumber: ST2013-SPP, BPS

Hasil dari ST2013-SPP menunjukkan bahwa masih ada sekitar seperlima anggota rumah tangga yang berusia 10-17 tahun yang menjadi pekerja anak. Keputusan anak-anak masuk ke dalam dunia kerja dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah faktor orang tua (Chang, 2006 dalam BPS, 2011). Berdasarkan penelitian mereka dalam *Indonesia Family Life Survey (IFLS)* tahun 1997 dan

2000, Chang menyebutkan bahwa pendidikan ayah dan ibu berpengaruh terhadap prevalensi anak bekerja di rumah tangga.



Gambar 2.10.
Persentase Anak
Berusia 10-17 Tahun
Yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan
Utama Dan Jenis
Kelamin, 2012

Sumber: Sakernas 2012, BPS

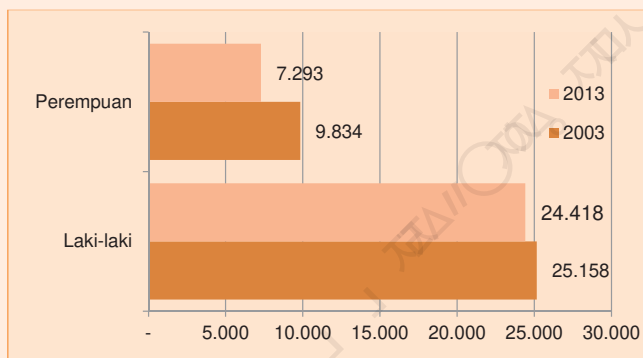
Pendidikan anggota RTUP yang menjadi pekerja anak, sebagian besar masih berstatus pelajar yaitu mencapai 67 persen (Gambar 2.9). Tentu sangat disayangkan bahwa anak-anak ini harus melakukan pekerjaan disamping kewajibannya dalam menuntut ilmu. Keadaan ini terjadi akibat pendapatan petani yang sangat minim dan tidak mencukupi untuk biaya sekolah sehingga anak yang bersekolah harus turut bekerja agar memperoleh

uang untuk membantu keluarga. Bagi anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak pernah sekolah karena kesulitan biaya maka pilihan yang ada hanyalah turut bekerja mencari nafkah untuk membantu pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2012, sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang menampung pekerja anak. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja anak laki-laki mendominasi di sektor pertanian (Gambar 2.10) karena pekerjaan di sektor ini cenderung membutuhkan daya tahan fisik yang kuat seperti membajak sawah, menggembalakan ternak, merawat tanaman pertanian, dan lain-lain. Sedangkan pekerja anak perempuan banyak berkecimpung di sektor jasa seperti menjadi pembantu rumah tangga, penjaga toko, atau pelayan restoran.

PROFESI PETANI SEMAKIN TIDAK DIMINATI

Gambar 2.11.
Jumlah Petani Menurut Jenis Kelamin (000 Orang), 2003 dan 2013



Sumber: ST2013-SPP, BPS

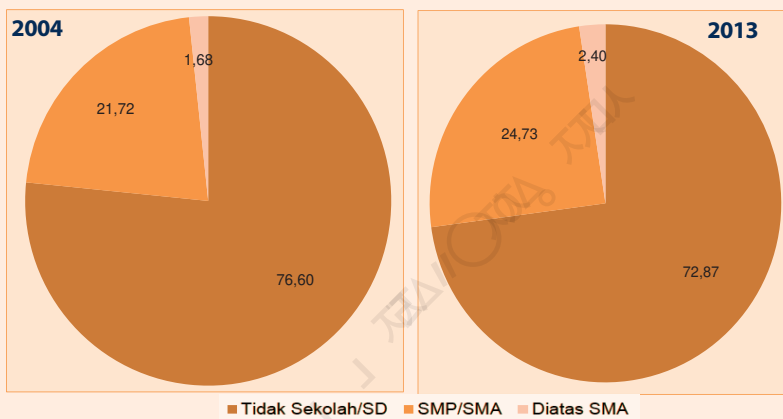
Berdasarkan data Sensus Pertanian, jumlah petani selama periode 2003-2013 menurun. Pada tahun 2003, jumlah petani Indonesia tercatat sekitar 35 juta orang pada tahun 2003, kemudian berkurang menjadi 32 juta orang pada tahun 2013.

Terjadi penurunan sekitar 3,2 juta orang dalam 10 tahun terakhir (Gambar 2.11). Penurunan jumlah petani yang cukup besar tersebut, mengindikasikan bahwa menjadi petani bukanlah menjadi pilihan yang menarik dan kurang diminati bagi masyarakat kita dan lebih merupakan warisan turun-temurun.

Penurunan jumlah petani terjadi baik pada petani laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, jumlah petani laki-laki masih mendominasi sebagai pengelola usaha pertanian. Tercatat proporsi petani laki-laki meningkat dari sekitar 72 persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 78 persen pada tahun 2013. Dominasi petani laki-laki juga tercermin dari penurunan perbandingan jumlah petani perempuan terhadap petani laki-laki (*sex ratio*), yaitu dari 391 pada tahun 2003 menjadi 290 pada tahun 2013. Indikasi menurunnya petani perempuan dibandingkan petani laki-laki menunjukkan bahwa menjadi petani semakin tidak menarik bagi perempuan. Dengan kata lain, bahwa perempuan lebih mudah keluar dari sektor pertanian karena status sosialnya di masyarakat bukan sebagai pencari nafkah atau penanggung jawab sumber pendapatan.

PENDIDIKAN PETANI RENDAH

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan petani Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh lebih dari 70 persen petani tidak sekolah atau hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Namun, dari data dua sensus pertanian memberi harapan baru karena ada indikasi semakin membaiknya kualitas pendidikan petani kita. Petani Indonesia yang tidak sekolah atau tamat SD semakin berkurang dari 76,6 persen pada tahun 2004 menjadi 72,9 persen pada tahun 2013. Pada periode yang sama petani yang tamat SMP/SMA meningkat dari 21,7 persen menjadi 24,7 persen yang diikuti juga oleh peningkatan petani yang tamat di atas SMA dari 1,7 persen menjadi 2,40 persen (Gambar 2.12).



Gambar 2.12.
Persentase Petani Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2004 dan 2013

Sumber: ST2003-SPP dan ST2013-SPP, BPS

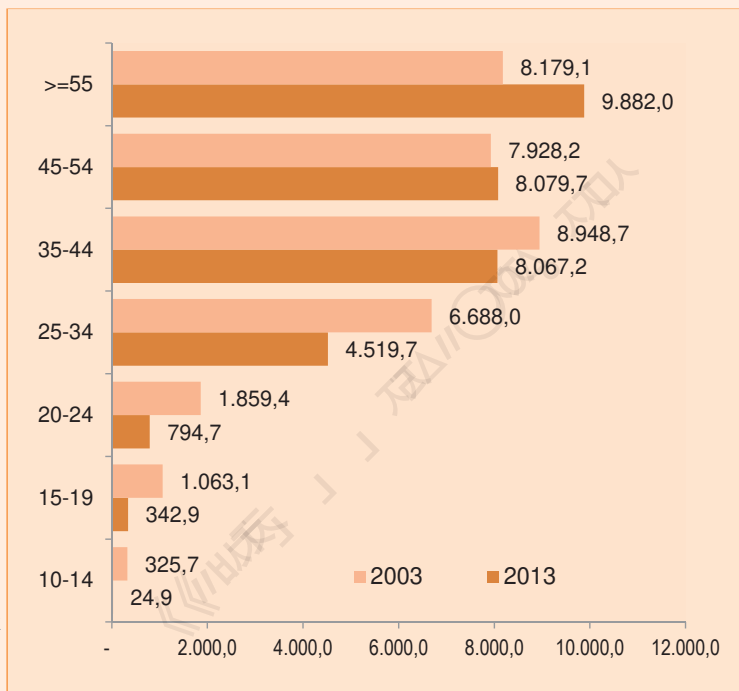
Banyaknya petani yang pendidikannya rendah, menjadi faktor penghambat bagi upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendidikan petani menjadi dasar pengembangan kemampuan petani dalam mengadopsi berbagai teknologi baru melalui pelatihan dan penyuluhan di sektor pertanian. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan petani menjadi hal yang sangat penting. Tanpa peningkatan pendidikan dan keterampilan petani maka sulit untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang harus mengadopsi teknologi baru.

USAHA TANI DIDOMINASI PETANI USIA SENJA

Disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah, usia petani yang semakin tua juga menjadi salah satu faktor penghambat lain untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hasil ST2013-SPP menunjukkan bahwa rata-rata umur petani Indonesia sekitar 48 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selama periode 2003-2013, terjadi peningkatan jumlah petani pada kelompok usia petani produktif senja yaitu berusia 45

tahun ke atas. Bahkan peningkatan yang tajam terjadi pada kelompok usia 55 tahun ke atas, yaitu meningkat sekitar 1,7 juta orang.

Secara umum, jumlah petani pada periode 2003-2013 menurun. Penurunan tertinggi terjadi pada kelompok umur 25-34 tahun, yaitu berkurang sekitar 2,2 juta orang (Gambar 2.13). Dari sudut pandang lain, mereka yang tergolong generasi muda tidak mau berkecimpung dalam mengembangkan usaha pertanian di Indonesia. Indikasi ini menguatkan pendapat bahwa menjadi petani bagi generasi muda juga bukanlah menjadi suatu pilihan yang menjanjikan bagi masa depan mereka.



Gambar 2.13.
Jumlah Petani Menurut Kelompok Umur (Ribu Orang), 2004 dan 2013

Sumber: ST2003-SPP dan ST2013-SPP, BPS

ST2013 SURVEI PERTANIAN

3

PERKEMBANGAN LAHAN PERTANIAN

“Selama kurun waktu lima tahun terakhir, luas lahan sawah yang ditanami padi di Jawa mengalami penurunan, namun di luar Jawa khususnya di Sulawesi mengalami peningkatan. Penurunan lahan sawah di Jawa searah dengan penurunan infrastruktur lahan pertanian. Luas lahan sawah yang dilengkapi sarana irigasi menurun, dilain pihak luas lahan sawah non irigasi meningkat.”





BAB 3 PERKEMBANGAN LAHAN PERTANIAN

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting dan mendasar bagi usaha atau kegiatan produksi pertanian secara umum, terutama bagi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat. Oleh sebab itu, perlu diimbangi dengan penyediaan lahan pertanian yang memadai. Penyediaan pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia. Dengan demikian, penyediaan lahan pertanian berkelanjutan perlu dikelola dan diagendakan oleh pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kecukupan bahan pangan bagi penduduk Indonesia.

Program pembangunan bukan hanya di sektor pertanian, namun juga harus terintegrasi dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya. Potensi pertanian di pulau Jawa sebagai sentra produksi pada hampir semua komoditi pertanian tak luput dari ancaman pengurangan lahan pertanian. Pengurangan tersebut akibat dari berbagai pembangunan infrastruktur bagi pengembangan kota dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, potensi pertanian di luar pulau Jawa perlu dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan bagi penduduk dan untuk mengganti lahan pertanian yang hilang di pulau Jawa. Dengan demikian, penguasaan lahan pertanian di tingkat rumah tangga usaha pertanian atau petani tidak semakin tergerus.

Walaupun terjadi konversi lahan pertanian terutama di pulau Jawa, namun secara keseluruhan luas lahan sawah meningkat (BPS, Statistik Penggunaan Lahan Pertanian). Peningkatan luas lahan sawah tersebut terutama terjadi di luar pulau Jawa. Namun demikian, pengembangan lahan sawah di luar pulau Jawa memiliki kendala-kendala seperti lahan yang kurang subur dan ketersediaan sumber air yang terbatas.

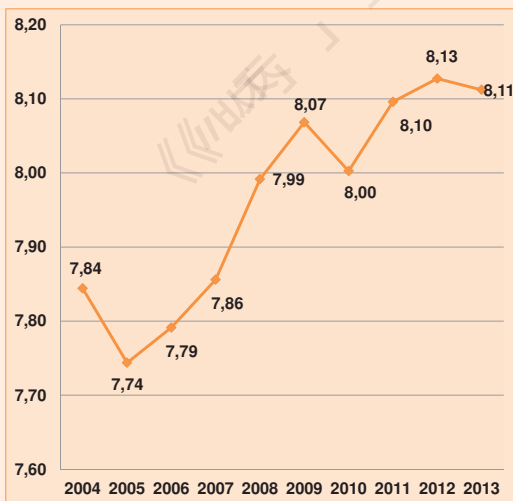
Dari sisi irigasi, luas lahan sawah irigasi cenderung berkurang, sebaliknya luas lahan sawah non-irigasi cenderung meningkat. Hal ini akan sangat mengganggu produksi padi, khususnya pada musim kemarau.

Masalah lain yang perlu memperoleh perhatian terkait lahan adalah sertifikasi lahan. Aspek sertifikasi lahan ini sangat penting, karena dapat menjadi akses kepada sumber permodalan bagi para petani khususnya di Bank. Tanpa akses ini, dikhawatirkan modal petani minim sehingga sulit mengembangkan usaha. Disamping itu, dikhawatirkan petani mencari sumber modal lain yang bersifat informal, seperti tengkulak atau rentenir.

PERKEMBANGAN LAHAN SAWAH

Peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi oleh peningkatan produksi bahan pangan. Kebutuhan bahan pangan, seperti beras, jagung, gula, kedelai, dan lainnya seyogianya harus mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri sejalan dengan salah satu agenda prioritas Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu membangun kedaulatan pangan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh sebab itu, selain upaya peningkatan produktivitas, peningkatan luas lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi prioritas pembangunan pertanian. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Luas Lahan Sawah Meningkat



Gambar 3.1.
Perkembangan Luas Lahan Yang Ditanami Padi (Juta Hektar), 2004-2013.

Sumber: BPS, Statistik Penggunaan Lahan 20013

Data Statistik Penggunaan Lahan (BPS, 2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas sawah yang ditanami padi selama periode 2004-2013 sebesar 267,8 ribu hektar, atau sekitar 3,4 persen (Gambar 3.1). Penambahan luas sawah merupakan salah satu bentuk capaian program pemerintah seperti perluasan area sawah yang ditargetkan setiap tahun. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mencetak sawah seluas 143,3 ribu hektar selama 2011-2012. Target penambahan sawah untuk tahun 2013 dan 2014 masing-masing seluas 65 ribu hektar dan 40 ribu hektar (Kementan, 2013).

Pulau Jawa sebagai sentra produksi padi di Indonesia, dalam jangka panjang akan menjadi sulit diandalkan sebagai penopang kebutuhan beras nasional karena laju penduduk dan keterbatasan lahan. Laju pertumbuhan produksi padi di pulau Jawa cenderung melambat. Hal ini juga terlihat dari luas lahan sawah yang cenderung menurun di pulau Jawa selama kurun waktu 2004-2013 (Tabel 3.1). Untuk mengimbanginya, Pemerintah terus berupaya menciptakan sentra penghasil beras di luar Jawa, seperti Sulawesi Selatan, NTB, Lampung, Kalimantan Selatan, dan lain-lain (Kementan, Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pertanian 2015-2019). Data Statistik Penggunaan Lahan 2013 menunjukkan bahwa peningkatan lahan sawah untuk tanaman padi terjadi di luar pulau Jawa. Namun demikian, pembukaan lahan sawah baru di luar Jawa harus menghadapi kendala seperti kesuburan lahan yang relatif rendah, ketersediaan sumber air yang relatif terbatas, dan penerapan teknologi yang belum optimal (Balitbang Kementan, 2013).

Tabel 3.1.
Luas lahan Sawah yang Ditanami Padi Menurut Pulau (000 Ha) 2008-2013

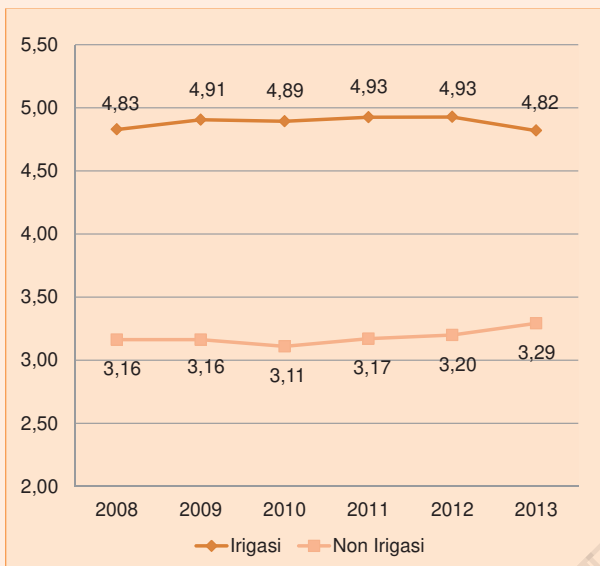
Pulau	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera	2.209,0	2.170,2	2.178,8	2.210,1	2.285,1	2.347,3
Jawa	3.293,0	3.244,1	3.240,9	3.247,5	3.270,2	3.251,0
Kalimantan	964,5	976,5	1.020,0	1.013,4	1.011,7	1.025,2
Sulawesi	901,5	890,4	869,5	894,3	925,0	932,3
Pulau Lainnya	476,3	462,5	482,0	490,6	499,5	512,4
Indonesia	7.844,3	7.743,8	7.791,3	7.855,9	7.991,5	8.068

Sumber: BPS, Statistik Penggunaan Lahan 20013

Luas Lahan Sawah Irigasi Berkurang

Untuk meningkatkan produktivitas padi, ketersediaan irigasi yang baik pada lahan sawah menjadi keharusan. Pembangunan irigasi merupakan salah satu program kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar seperti bendungan/waduk, saluran primer, saluran sekunder, kanal drainase dan jalan pemukiman untuk mendukung perbaikan sektor pertanian. Ketersediaan air menjadi faktor penting di samping lahan yang memengaruhi produktivitas tanaman. Dengan adanya sumber air untuk irigasi, RTUP tidak lagi mengandalkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Disamping itu, gagal panen akibat kesulitan air dapat dikurangi. Dengan sistem irigasi yang baik dan jumlah sawah irigasi yang semakin besar, diharapkan hasil produksi tanaman pangan semakin meningkat.

Gambar 3.2.
Perkembangan Luas Sawah Irigasi dan Sawah Non Irigasi (Juta Hektar), 2004-2013.



Sumber: BPS, Statistik Penggunaan Lahan 20013

Berdasarkan data BPS (2013), masih terdapat sekitar 40 persen luas sawah yang non-irigasi. Perkembangan sawah non-irigasi cenderung meningkat, sementara sawah irigasi menurun selama periode 2008-2013 (Gambar 3.2.). Penurunan luas sawah irigasi terjadi di Jawa dan Kalimantan, sementara pulau lainnya meningkat. Penurunan luas lahan sawah irigasi di Kalimantan disebabkan penambahan sawah baru di Kalimantan belum disertai pembangunan

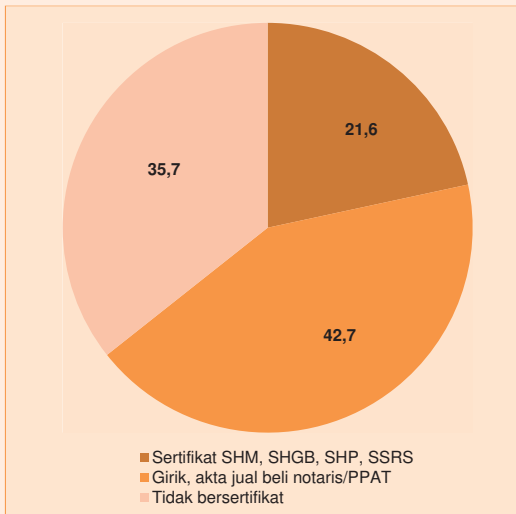
infrastruktur irigasi seperti bendungan/waduk. Anggaran untuk membangun sebuah waduk tidaklah sedikit, dan pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut. Program perluasan sawah harus didukung dengan pembangunan sistem irigasi yang baik agar produktivitas sawah tinggi dan mencapai hasil yang diharapkan.

SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN

Status lahan pertanian yang diusahakan petani berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan produksi pertanian. Lahan pertanian yang berstatus milik sendiri atau pemberian pihak lain secara cuma-cuma akan mengurangi beban biaya produksi dibandingkan RTUP yang mengusahakan lahan pertanian berstatus sewa/kontrak dan bagi hasil. Kepemilikan lahan pertanian menjadi faktor yang sangat penting bagi rumah tangga usaha pertanian sebagai barang modal. Bagi RTUP, kepemilikan lahan pertanian memiliki korelasi yang besar dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha tani.

Lahan pertanian sebagai barang modal seharusnya memenuhi syarat dari aspek hukum berupa pemilikan sertifikat. Kepemilikan sertifikat lahan pertanian sangat bermanfaat bagi RTUP sebagai jaminan untuk mengakses berbagai program pembiayaan usaha melalui perbankan. Kesadaran mengurus sertifikat lahan yang dimiliki oleh rumahtangga usaha pertanian masih tergolong rendah. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya sekitar seperlima dari luas lahan

Gambar 3.3.
Persentase Luas Lahan Yang Dimiliki Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Surat Kepemilikan Lahan



Sumber: ST2013-SPP, BPS

yang dimiliki rumah tangga usaha pertanian yang sudah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan sertifikat lain seperti SHP SRSS (Gambar 3.3). Dua perlima dari luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga usaha pertanian hanya dengan bukti kepemilikan lainnya berupa girik atau akta jual beli notaris/PPAT. Bahkan lebih dari sepertiga luas lahan yang dimiliki rumah tangga usaha pertanian tidak

memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum (tidak bersertifikat).

Oleh karena itu, reformasi agraria menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah kegiatan sertifikasi lahan. Aspek hukum dari kepemilikan lahan tersebut dapat membuka kesempatan dan menjadi jaminan untuk memperoleh akses modal ke bank, disamping dapat digunakan sebagai sarana mengelola dan kontrol terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan-lahan pertanian. Konversi atau mutasi terhadap lahan-lahan pertanian produktif harus dijaga untuk mendukung keberlanjutan ketahanan dan kedaulatan pangan.

4

AKSES PETANI KE SUMBER DAYA PRODUKTIF

"Akses terhadap sumber daya produktif belum banyak dijangkau oleh petani. Fasilitas kredit hanya dinikmati oleh rumah tangga usaha pertanian yang berpendapatan tinggi. Sementara akses terhadap lembaga petani seperti kelompok tani hanya diikuti oleh sekitar 30 persen rumah tangga usaha pertanian."





BAB 4 AKSES PETANI KE SUMBER DAYA PRODUKTIF

AKSES TERHADAP PERMODALAN

Permodalan merupakan unsur yang sangat esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Fungsi modal dalam tataran mikro (usaha tani) tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk berimbang, ataupun teknologi pasca panen (Ashari, 2009). Untuk itu, pemerintah dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 telah mencetuskan kebijakan penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai salah satu strategi pemberdayaan petani.

Aspek permodalan bagi petani hingga saat ini masih menjadi masalah klasik yang sepertinya tidak kunjung selesai di samping distribusi penguasaan lahan. Permasalahan ini menjadi lebih rumit ketika dihadapkan dengan persoalan petani gurem dan penggarap. Data SPP 2013 memberikan fakta yang cukup mencengangkan, tercatat hanya sekitar 3 persen RTUP saja yang mendapatkan kredit dari bank; sebagian besar masih mengandalkan modal sendiri.

Akses Terhadap Permodalan Lebih Banyak Dinikmati Petani Berpendapatan Tinggi

Pemerintah tentu saja tidak dapat tinggal diam dengan situasi seperti ini. Selama lebih dari empat dekade, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Bantuan modal ini diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga maupun yang mengarah komersial (Ashari, 2009). Namun demikian, hingga saat ini belum semua petani bisa merasakan manfaatnya. Fasilitas kredit hanya dinikmati oleh rumahtangga usaha pertanian (RTUP) yang berpendapatan tinggi, dibandingkan yang berpendapatan rendah (Tabel 4.1).

Jika ditinjau menurut kelompok pendapatan, karakteristik RTUP yang memperoleh bantuan kredit ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi RTUP yang pendapatannya rendah, memanfaatkan bantuan kredit selain untuk menjalankan usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, RTUP yang berpendapatan tinggi, membutuhkan bantuan

kredit dengan orientasi lebih kepada peningkatan keuntungan dibanding sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun persentase kedua kelompok ini terpaut cukup jauh, setidaknya hal ini dapat menjadi masukan untuk para pembuat kebijakan agar juga memperhatikan nasib para petani yang berpendapatan rendah, sehingga tidak terjerumus dalam cengkleraman para tengkulak atau rentenir.

Tabel 4.1.

Persentase RTUP yang Memperoleh Bantuan Kredit menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kelompok Pendapatan, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kelompok Pendapatan			
	<1 juta	1-2 juta	2-3 juta	>3 juta
Sektor Pertanian	3.99	3.03	3.38	89.59
Tanaman Pangan	4.07	3.84	4.98	87.10
Hortikultura	5.16	3.65	2.85	88.34
Perkebunan	2.99	1.62	1.63	93.76
Pternakan	6.24	3.54	3.36	86.86
Perikanan	2.96	3.43	1.71	91.90
Kehutanan	9.60	1.63	5.17	83.59
Jasa Pertanian	4.98	3.65	3.23	88.15
Sektor Non Pertanian	18.19	9.55	8.98	63.28
Lainnya	21.93	11.42	8.46	58.19

Sumber: BPS, ST2013-SPP

Mengingat kredit sangat penting bagi usaha tani, ketersediaan sumber pembiayaan yang mudah diakses petani masih terus menjadi sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pemerintah, berbagai lembaga permodalan berbunga rendah telah berkembang di tingkat petani, seperti BRI Unit Desa, BPR, pegadaian, dan koperasi (Supriatna, 2009). Namun kenyataannya menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian Nurmanaf (2007), pembiayaan informal yang justru lebih diminati oleh petani. Para petani di tingkat pedesaan lebih cenderung memanfaatkan pinjaman dari para tengkulak, pelepas uang (*money lender*) ataupun pedagang sarana produksi meski suku bunga yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dibanding oleh lembaga komersial.

Proses Administrasi Menjadi Kendala dalam Akses Permodalan

Salah satu sebab rendahnya akses terhadap bank adalah kesulitan dalam memperoleh kredit. Rumitnya proses administrasi pengajuan kredit menjadi alasan terbesar mengapa petani tidak menikmatinya. Lebih dari 50 persen RTUP yang pernah mengajukan kredit mengaku kesulitan karena prosesnya yang terlalu formal, rumit dan membutuhkan waktu yang lama (Tabel 4.2). Kesulitan ini terutama dirasakan oleh RTUP yang berada di wilayah Provinsi Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, serta di sebagian besar Kepulauan Maluku dan Papua.

Tabel 4.2.
 Persentase RTUP Menurut Alasan Kesulitan Pengajuan Kredit dan Sumber
 Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kesulitan Pengajuan Kredit			
	Lokasi Terpencil	Tidak Memiliki Agunan	Proses Administrasi Kredit Rumit	Lainnya
Sektor Pertanian	8.34	25.92	58.16	7.57
Tanaman Pangan	7.05	29.09	58.18	5.68
Hortikultura	5.02	30.89	56.15	7.94
Perkebunan	11.12	19.52	59.36	10.00
Peternakan	6.66	26.12	61.89	5.33
Perikanan	6.58	32.34	52.36	8.72
Kehutanan	11.80	27.05	57.78	3.37
Jasa Pertanian	19.18	28.89	48.67	3.26
Sektor Non Pertanian	7.37	25.97	57.37	9.29
Lainnya	9.13	27.47	48.23	15.17
Indonesia	8,10	25.95	57.84	8.11

Sumber: BPS, ST2013-SPP

Alasan berikutnya yang mempersulit akses petani terhadap kredit permodalan adalah masalah agunan. Alasan ini dikemukakan oleh sekitar 25 persen RTUP yang mengalami kesulitan untuk pengajuan kredit ke bank. Umumnya, bank mensyaratkan kepemilikan agunan yang berupa sertifikat tanah dan bangunan untuk bisa memperoleh kredit. Persyaratan ini tentu sulit dipenuhi petani, terutama oleh petani gurem dan petani penggarap, karena mereka biasanya tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan.

Berbagai temuan di atas mengindikasikan bahwa peran bank dalam melayani permodalan petani kecil belum optimal. Supriatna (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masih ada jurang pemisah antara pola pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan dan karakteristik petani sebagai pengguna. Hal ini menjadi kendala bagi petani untuk mengakses lembaga pembiayaan.

AKSES TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH

Selain kredit atau pinjaman, bantuan pertanian dari pemerintah yang berupa subsidi ataupun hibah menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah permodalan petani. Bantuan pada umumnya disalurkan melalui kelompok tani/Gapoktan/UPJA yang dinyatakan layak untuk menyalurkan pembiayaan, bibit/benih/induk, pupuk, dan lain sebagainya.

Secara umum bantuan baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk usaha tani belum optimal atau belum sepenuhnya dirasakan oleh RTUP (Tabel 4.3) RTUP di Jawa lebih banyak mendapat bantuan dibandingkan di luar Jawa baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan/subsidi dari pemerintah masih belum merata atau belum tepat sasaran

Tabel 4.3.
Persentase RTUP Menurut Sumber Bantuan dan Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Jawa		Luar Jawa	
	Pemerintah	Non Pemerintah	Pemerintah	Non Pemerintah
Sektor Pertanian	15.08	1.01	14.49	1.26
Tanaman Pangan	22.19	1.29	15.29	1.11
Hortikultura	15.42	1.37	8.88	0.91
Perkebunan	3.08	0.27	16.02	1.68
Peternakan	14.50	1.62	9.89	0.94
Perikanan	5.20	0.86	13.34	1.53
Kehutanan	22.41	1.41	7.13	0.60
Jasa Pertanian	11.95	1.33	12.01	1.51
Sektor Non Pertanian	17.32	1.01	9.33	0.69
Lainnya	17.32	1.19	6.97	0.68

Sumber: BPS, ST 2013-SPP.

RTUP dengan sumber pendapatan utama dari subsektor tanaman pangan dan kehutanan di Pulau Jawa lebih banyak merasakan bantuan. Sedangkan di luar Jawa, bantuan lebih banyak ditujukan bagi usaha tanaman pangan dan perkebunan. Hal ini wajar, karena di luar Jawa banyak RTUP yang mengusahakan tanaman perkebunan.

Belum optimalnya penyaluran bantuan pertanian kepada RTUP bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena rendahnya aksesibilitas. Bantuan pertanian, dalam hal ini misalnya pupuk bersubsidi, alat-alat pertanian, dan benih, lebih sering disalurkan melalui kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan). Tetapi pada umumnya, petani berskala kecil jarang terlibat dalam lembaga ini sehingga kemungkinan untuk mendapatkan bantuan lebih kecil dibanding petani yang menjadi anggota.

AKSES TERHADAP KELEMBAGAAN PERTANIAN

Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan penguatan kelembagaan petani sebagai salah satu tujuan dari pemberdayaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Dalam undang-undang itu disebutkan definisi kelembagaan petani sebagai

lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Dengan demikian, tinjauan mengenai aksesibilitas petani terhadap kelembagaan sangat diperlukan untuk melihat peluang pemberdayaan petani di masa yang akan datang. Peningkatan akses kelembagaan ini antara lain dapat dilihat melalui efektifitas kegiatan penyuluhan pertanian, keterlibatan dalam kelompok tani dan pemanfaatan fasilitas koperasi.

Akses Petani terhadap Kelembagaan Pertanian Masih Rendah

Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 memberikan gambaran bahwa minimnya jumlah serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian masih menjadi persoalan di Indonesia. Di sinilah peran penyuluh pertanian dibutuhkan, tidak hanya dalam hal peningkatan produksi tetapi juga pendidikan mental petani agar siap bersaing di era globalisasi. Dalam literatur lain disebutkan bahwa penyuluh pertanian juga menjadi motor penggerak pengembangan agribisnis yang mensejahterakan petani, terutama sejak dilaksanakannya program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di tahun 2008.

Tabel 4.4.

Persentase RTUP Menurut Akses Terhadap Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Jenis Akses Kelembagaan		
	Mengikuti Penyuluhan Pertanian	Menjadi Anggota Kelompok Tani	Memanfaatkan Fasilitas Koperasi
Sektor Pertanian	19.14	31.90	3.83
Tanaman Pangan	22.45	36.70	3.57
Hortikultura	23.23	28.74	3.81
Perkebunan	13.38	26.43	4.19
Peternakan	16.84	26.14	5.37
Perikanan	13.27	25.16	3.10
Kehutanan	17.57	26.61	2.96
Jasa Pertanian	16.33	25.35	3.41
Sektor Non Pertanian	17.31	26.32	3.45
Lainnya	14.09	22.18	2.41
Indonesia	18,53	30,17	3,70

Sumber: BPS, ST2013-SPP

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya diimplementasikan di seluruh sektor usaha pertanian. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah RTUP yang mengikuti kegiatan ini, yaitu kurang dari 20 persen. Padahal, materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi mereka, antara lain mencakup penerapan teknologi pertanian, optimalisasi penggunaan sumberdaya tani, diversifikasi pertanian, manajemen usaha

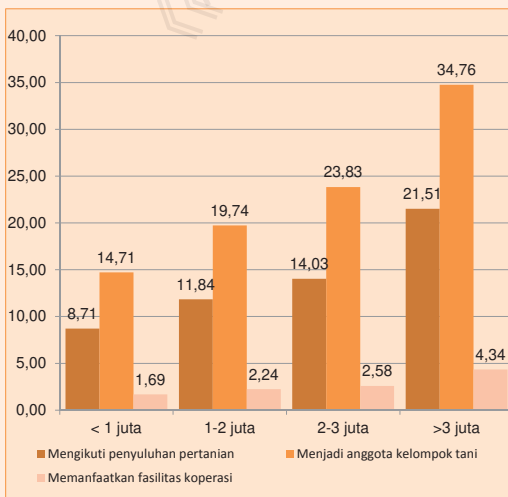
tani, manajemen pemasaran, hingga peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian.

Begitu juga dengan koperasi, kurang dari 6 persen RTUP yang memanfaatkan fasilitas ini untuk mendukung kegiatan usahanya. Lemahnya manajemen dipercaya sebagai pemicu paradigma bahwa koperasi tidak lagi memberikan keuntungan bagi petani. Kebijakan pemerintah terhadap koperasi yang tidak konsisten serta kelemahan manajemen koperasi menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada koperasi (Susilo, 2013).

Di sisi lain, meski peminatnya relatif lebih banyak dibanding jenis kelembagaan yang lain, keberadaan kelompok tani juga tak luput dari masalah. Sebagian besar kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok, sebagai contoh: penyaluran subsidi dalam bentuk pupuk maupun kredit (Nuryati dkk, 2011). Peran kelompok tani sangat vital pada era pembangunan pertanian saat ini, terutama dalam pengaliran informasi secara vertikal antara pemerintah kepada petani.

Petani Berpendapatan Tinggi Lebih Banyak Memperoleh Akses Kelembagaan Pertanian

Jika ditinjau menurut kelompok pendapatan, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan RTUP, semakin tinggi pula akses terhadap lembaga pertanian, baik dalam kegiatan penyuluhan pertanian, kelompok tani maupun koperasi. Keikutsertaan RTUP dengan pendapatan yang tinggi dalam lembaga pertanian mengindikasikan tingginya kesadaran petani akan pentingnya peran lembaga pertanian dalam memajukan usahanya.



Gambar 4.1.
Persentase RTUP Menurut Akses Terhadap Kelembagaan Pertanian dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013

Sumber: BPS, ST2013-SPP

Sementara di sisi lain, diperlukan usaha ekstra dalam menyadarkan petani berpendapatan rendah akan pentingnya partisipasi dalam kelembagaan pertanian. Selain itu akses dan informasi tentang kelembagaan perlu dibuka seluas-luasnya agar fasilitas ini dapat dijangkau oleh seluruh petani secara merata.

Terlepas dari begitu banyaknya kelemahan yang harus segera diperbaiki, lembaga pertanian masih memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kapasitas petani yang perlu terus dikembangkan. Pada akhirnya, seiring dengan berkembangnya kelembagaan petani, diharapkan tujuan pemberdayaan petani dapat terwujud, ditandai dengan berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan.

AKSES TERHADAP SARANA PRODUKSI

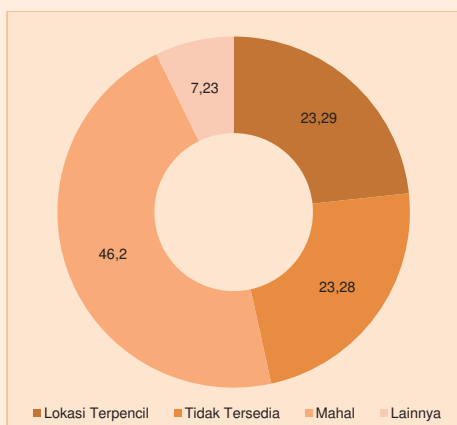
Penggunaan sarana produksi yang sesuai dan tepat akan memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan produksi. Sarana produksi pertanian meliputi bibit, pupuk, obat-obatan atau pestisida, dan alat alat pertanian. Secara umum RTUP tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses sarana produksi. Hanya sekitar 13 persen saja RTUP yang mengalami kesulitan mendapatkan sarana produksi pertanian (Tabel 4.5). Subsektor yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi paling banyak dialami oleh RTUP dengan sumber pendapatan utama subsektor perkebunan dan subsektor peternakan.

Tabel 4.5.
Persentase RTUP Menurut Akses Sarana Produksi dan Penjualan Hasil Pertanian Menurut Sumber Pendapatan Utama

Sumber Pendapatan Utama	Kesulitan dalam memperoleh sarana produksi	Kesulitan dalam menjual hasil pertanian
Sektor pertanian	20,80	12,96
Tanaman padi dan palawija	19,89	12,00
Hortikultura	17,76	14,04
Perkebunan	23,76	14,99
Kehutanan	16,33	10,38
Peternakan/Unggas	23,59	12,83
Perikanan	22,89	15,78
Jasa Pertanian	16,66	6,43
Sektor non pertanian	12,50	6,71
Lainnya	11,62	6,82
INDONESIA	18,34	11,12

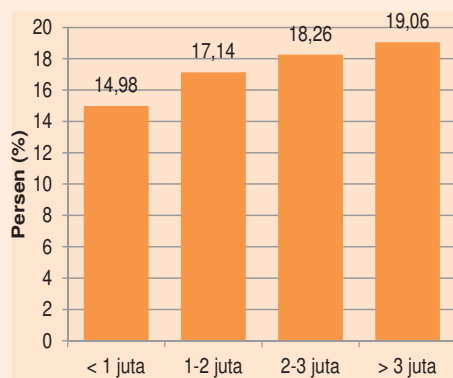
Sumber: Sensus Pertanian 2013.

Faktor finansial menjadi alasan utama RTUP yang mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi. Tercatat hampir 50 persen RTUP yang mengalami kesulitan memperoleh akses sarana produksi menyatakan harganya mahal. Subsektor Hortikultura dan Kehutanan paling tinggi RTUP yang menyatakan harga-harga sarana produksi mahal (Tabel 4.5).



Gambar 4.2. Persentase RTUP Menurut Alasan Mengalami Kesulitan Memperoleh Sarana Produksi ,2013

Sumber: BPS, ST2013-SPP



Gambar 4.3. Persentase RTUP yang Mengalami Kesulitan Dalam Memperoleh Sarana Produksi Menurut Kelompok Pendapatan Dari Sektor Pertanian, 2013

Jika dilihat menurut kelompok pendapatan, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam mengakses sarana produksi. Hanya RTUP yang pendapatannya kurang dari 1 juta yang lebih banyak mengalami kesulitan akses terhadap sarana produksi.

PEMASARAN BUKAN MASALAH UTAMA

Pemasaran merupakan ujung dari proses usaha tani. Semakin panjang mata rantai distribusi produk pertanian, maka harga di tingkat konsumen semakin tinggi. Dengan cara memangkas mata rantai distribusi, imbal hasil petani

Tabel 4.6.

Persentase RTUP Menurut Kesulitan dalam Menjual Hasil Pertanian

Sumber Pendapatan Utama	Menjual Hasil Pertanian	
	Mengalami Kesulitan	Tidak Mengalami Kesulitan
Sektor pertanian	16,60	16,15
Tanaman padi dan palawija	18,20	18,06
Hortikultura	11,22	12,68
Perkebunan	15,74	14,56
Kehutanan	14,92	14,19
Peternakan/Unggas	13,85	13,31
Perikanan	23,29	19,70
Jasa Pertanian	17,53	18,95
Sektor non pertanian	8,75	9,38
Lainnya	13,74	7,95
INDONESIA	15,87	15,48

Sumber: BPS, ST2013-SPP.

bisa ditingkatkan sehingga kesejahteraan RTUP akan terangkat. Dengan demikian, hambatan-hambatan dalam proses pemasaran produk pertanian harus dihilangkan. Hasil SPP2013 menunjukkan hal yang positif bahwa sebagian besar RTUP tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian (Tabel 4.8). Namun hal ini belum menjawab apakah harga yang diterima oleh petani masih layak.

Indikasi harga di tingkat petani yang rendah terlihat dari alasan RTUP yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian. Hampir 60 persen RTUP yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian beralasan bahwa harga rendah (Tabel 4.9). Indikasi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memutus mata rantai distribusi produk pertanian.

Tabel 4.7.

Persentase RTUP Menurut Alasan Mengalami Kesulitan Menjual Hasil Pertanian dan Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Alasan utama mengalami kesulitan				
	Akses ke pasar sulit	Biaya transportasi mahal	Pasar tidak tersedia	Harga rendah	Lainnya
Sektor pertanian	16,60	16,15	7,11	57,23	2,91
Tanaman padi dan palawija	18,20	18,06	7,85	53,01	2,88
Hortikultura	11,22	12,68	3,88	69,30	2,93
Perkebunan	15,74	14,56	5,69	61,17	2,84
Kehutanan	14,92	14,19	5,75	61,80	3,34
Peternakan/Unggas	13,85	13,31	12,17	57,21	3,45
Perikanan	23,29	19,70	19,24	35,75	2,02
Jasa Pertanian	17,53	18,95	7,09	51,31	5,11
Sektor non pertanian	8,75	9,38	5,10	72,90	3,87
Lainnya	13,74	7,95	4,05	72,16	2,09
INDONESIA	15,87	15,48	6,91	58,75	2,99

Sumber: BPS, ST2013-SPP.

5

ANCAMAN KEMISKINAN BAGI PETANI

“Rumah tangga usaha pertanian dengan sumber kehidupan sektor pertanian lebih rentan mengalami kemiskinan multidimensional dibandingkan dengan sektor non pertanian. Jika dilihat keterbandingan antar wilayah, kemiskinan multidimensi provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur lebih tinggi daripada di wilayah Indonesia Barat.”





BAB 5 ANCAMAN KEMISKINAN BAGI PETANI

Pengertian kemiskinan secara umum adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Chambers, 1985). Salah satu ukuran kemiskinan yang selama ini digunakan menggunakan garis kemiskinan. Sehubungan dengan pengukuran kemiskinan pada tahun 2010, *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) memperkenalkan pengukuran kemiskinan baru, yaitu *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Berbeda dari pengukuran selama ini yang memperhitungkan aspek pendapatan atau konsumsi saja, *Multidimensional Poverty Index* atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) merupakan indeks komposit yang mengukur kemiskinan secara lebih luas, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup.

Dalam kaitan ini, kesejahteraan tidak sekedar dipandang sebagai pemilikan barang. Kesejahteraan juga tidak dinilai dari capaian keberfungsian, misalnya status kesehatan yang tinggi. Di sini yang diukur ialah kapabilitas, yaitu himpunan kesempatan dari sejumlah keberfungsian. Kesempatan yang riil digunakan tersebut diindikasikan oleh pengalaman penggunaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Ketika IKM digunakan untuk melihat kemiskinan RTUP, setiap rumah tangga tersebut dihitung menurut skor kekurangan dalam 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing terdiri dari 2 indikator, sementara dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator. Kesepuluh indikator tersebut adalah :

1. Tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP)
2. Memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah

3. Memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi
4. Memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .
5. Tidak memiliki listrik
6. Tidak memiliki akses air minum bersih
7. Tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai
8. Menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar
9. Memiliki rumah dengan lantai tanah
10. Tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon , atau televisi .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumahtangga secara multidimensional, seluruh skor dari 10 indikator tersebut dijumlahkan. Sebuah garis pemisah atau *cut off point* (*c*) sebesar 33,3 persen digunakan untuk membedakan antara RTUP yang miskin dan tidak miskin. Rumahtangga dengan skor kekurangan akses sebesar 33,3 persen atau lebih, dianggap mengalami kemiskinan multidimensi. Garis potong serupa juga berlaku untuk anggota RTUP. Melalui skor kekurangan tersebut RTUP juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Jika $c < 20\%$ maka RTUP dan seluruh anggota rumah tangga dianggap tidak miskin multidimensional
- Jika $20\% \leq c < 33,3\%$, maka RTUP dan seluruh anggota rumah tangga dianggap rentan miskin multidimensional
- Jika $33,3\% \leq c < 50\%$ maka RTUP dan seluruh anggota rumah tangga dianggap miskin multidimensional
- Jika $c \geq 50\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensional

Tabel 5.1
Indikator Kemiskinan Multidimensi

Indikator Kemiskinan	Persentase
RTUP miskin	21,12
Penduduk miskin (<i>headcount</i>)	18,21
Intensitas kemiskinan	39,12
IKM	7,12

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Hasil Survei Pendapatan RTUP 2013 terlihat dari sisi rumah tangga, secara nasional RTUP yang terkategori miskin multidimensi sebesar 21 persen. Sedangkan dari sisi penduduk dalam RTUP, penduduk yang terkategori miskin multidimensi hanya 18 persen. Perbedaan angka tersebut

disebabkan oleh rata-rata jumlah anggota RTUP tidak miskin yang lebih besar daripada RTUP yang miskin.

Jika dilihat dari 10 indikator yang menyusun IKM, maka diperoleh nilai intensitas kemiskinan, yang merupakan skor kekurangan terhadap akses kepada 10 indikator kemiskinan oleh RTUP miskin. Dari angka intensitas kemiskinan RTUP diperoleh angka intensitas kemiskinan sebesar 39 persen. Dengan kata lain, secara rata-rata RTUP miskin kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) sebanyak 39 persen atau sekitar 4 indikator.

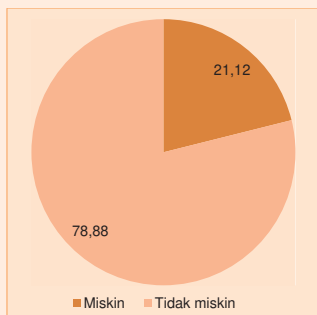
Dari sisi keseluruhan penduduk dalam RTUP, dapat dihitung nilai IKM yaitu skor kekurangan terhadap akses 10 indikator tersebut. Nilai IKM RTUP diperoleh sebesar 7 persen. Artinya bahwa kekurangan yang dialami seluruh RTUP sebesar 7 persen dari 10 indikator yang ada.

JUMLAH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN MISKIN

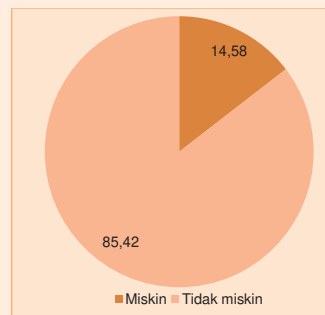
RTUP Miskin Multidimensi Lebih Besar daripada Kemiskinan Pertanian

Berdasarkan hasil penghitungan kemiskinan dengan pendekatan multidimensi, masih terdapat 21 persen RTUP miskin. Sedangkan data kemiskinan yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran terdapat 14,9 persen rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tergolong miskin (BPS, Maret 2013). Perbedaan angka tersebut menunjukkan terdapat rumah tangga yang pendapatannya di atas garis kemiskinan, namun belum mampu mencukupi kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan standard hidup. Meskipun kedua metode pengukuran kemiskinan menghasilkan angka yang berbeda, namun keduanya menunjukkan bahwa kemiskinan di sektor pertanian masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan.

Gambar 5.1
Persentase RTUP yang Miskin Multidimensi, 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP



Sumber: BPS, 2013

Gambar 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Pertanian Menurut Tingkat Kemiskinan Pengeluaran

RTUP dengan Sumber Kehidupan Sektor Pertanian Lebih Rentan Miskin Multidimensional

Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan di sektor pertanian erat kaitannya dengan pendapatan yang relatif rendah dari sektor ini dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya pendapatan tersebut menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar RTUP, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Fenomena ini tergambar dari hasil pengukuran kemiskinan multidimensi, di mana RTUP yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian lebih rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi (Tabel 5.2). RTUP dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian juga mengalami kemiskinan multidimensi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan RTUP dengan sumber pendapatan utama dari sektor non pertanian.

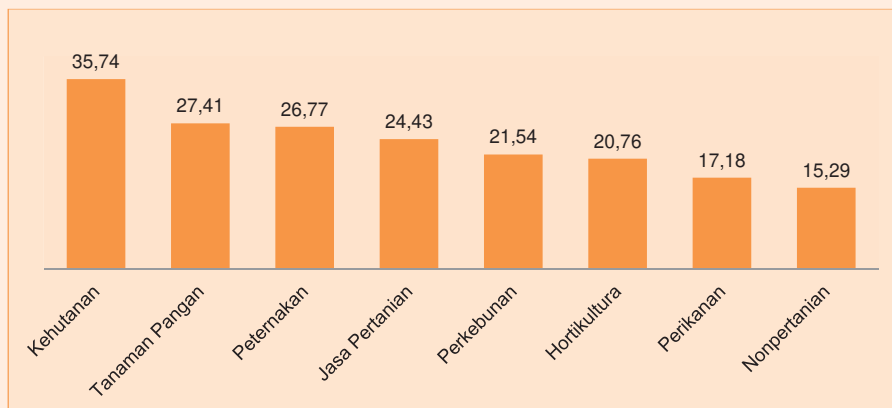
Tabel 5.2
Persentase RTUP menurut Kategori Kemiskinan Multidimensi dan Sumber Pendapatan Utama (persen), 2013

Sumber Pendapatan Utama	Kategori Kemiskinan			
	Tidak miskin multidimensi ($c < 33,3\%$)		Miskin multidimensi ($c \geq 33,3\%$)	
	Tidak miskin multidimensi ($c < 20\%$)	Rentan Miskin Multidimensi ($20\% \leq c < 33,3\%$)	Miskin Multidimensi ($33,3\% \leq c < 50\%$)	Sangat miskin multidimensi ($c \geq 50\%$)
Pertanian	49,97	25,13	22,47	2,44
Non pertanian	68,91	19,05	11,25	0,80

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Selama ini subsektor tanaman pangan disebut-sebut sebagai salah satu pusat kemiskinan. Perhatian pemerintah sebagian besar juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku subsektor tersebut. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena hampir sepertiga rumah tangga usaha subsektor tanaman pangan menderita kemiskinan multidimensi (Gambar 5.3).

Gambar 5.3
Persentase RTUP yang Miskin Multidimensi ($c \geq 33,3$) menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013



Sumber: Diolah dari ST2013-SPP, BPS

Namun demikian subsektor kehutanan tampaknya perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, karena mengalami kemiskinan multidimensi paling besar (sekitar 36 persen). Rumah tangga usaha subsektor kehutanan biasanya bermukim di sekitar hutan dengan penguasaan lahan yang sempit. Sebagian besar dari mereka juga kurang mampu mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Menurut Dewan Kehutanan Nasional, kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga usaha kehutanan juga merupakan dampak dari kesenjangan penguasaan lahan. Sebagian besar perizinan konsesi kawasan hutan diberikan kepada perusahaan negara bidang kehutanan (Perum Perhutani). Sangat sedikit izin konsesi kawasan hutan yang diberikan kepada koperasi warga.

Kemiskinan Menurun Seiring Meningkatnya Pendapatan dan Penguasaan Lahan

Akses RTUP terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang mereka terima. Terlihat dari Tabel 5.3, persentase RTUP yang mengalami kemiskinan multidimensi semakin menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Kerentanan dan kemiskinan multidimensi tertinggi dialami oleh RTUP dengan pendapatan dari sektor pertanian kurang dari Rp 1 juta per bulan, masing-masing sebesar 28 persen dan 35 persen. Sementara RTUP yang terkategori sangat miskin multidimensi pada pendapatan dibawah 1 juta sebesar 3 persen. Pendapatan yang rendah telah membatasi akses terhadap kualitas standar kehidupan. Sumber daya material yang dimiliki hanya dapat dipakai untuk memenuhi keperluan langsung berupa konsumsi sehari-hari.

Tabel 5.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Kategori Kemiskinan Multidimensional dan Kelompok Pendapatan dari Usaha Pertanian, 2013

Pendapatan dari Usaha Pertanian	Tidak miskin multidimensi		Miskin multidimensi	
	Tidak miskin multidimensi	Rentan Miskin Multidimensi	Miskin multidimensi	Sangat miskin multidimensi
< 1 juta	34,3	28,0	34,8	2,8
1 - 2 juta	52,9	26,0	19,0	2,1
2 - 3 juta	66,5	21,0	11,0	1,5
> 3 juta	79,9	14,0	5,2	0,9

Sumber : BPS , diolah dari ST2013-SPP

Penguasaan lahan juga memiliki kaitan dengan kemiskinan multidimensi. Lahan merupakan media utama bagi petani untuk melakukan aktivitas usahatani. Tingginya lahan yang dikuasai berpengaruh terhadap

peningkatan produktivitas pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani (Sulistiyowati, 2013). Pendapatan tersebut pada gilirannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar RTUP. Tabel 5.4 menunjukkan bahwa 23 persen RTUP dengan luas lahan pertanian yang dikuasai kurang dari 0,25 Ha mengalami kemiskinan multidimensi. Angka tersebut paling tinggi jika dibandingkan kelompok RTUP dengan penguasaan lahan yang lebih luas.

Tabel 5.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lahan dan Kategori Kemiskinan Multidimensi, 2013

Lahan yang Dikuasai	Kategori Kemiskinan			
	Tidak miskin multidimensi		Miskin multidimensi	
	Tidak miskin multidimensi	Rentan Miskin Multidimensi	Miskin multidimensi	Sangat miskin multidimensi
Tidak menguasai lahan	55,9	24,0	18,7	1,4
< 0,25 Ha	50,5	24,2	23,0	2,2
0,25 - 0,49 Ha	55,1	23,9	19,2	1,8
0,50 - 0,99 Ha	56,6	23,1	18,2	2,1
1,00 - 2,49 Ha	59,4	22,5	16,2	1,9
> 2,5 Ha	66,2	20,2	12,3	1,3

Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK

Tingkat Kemiskinan Penduduk

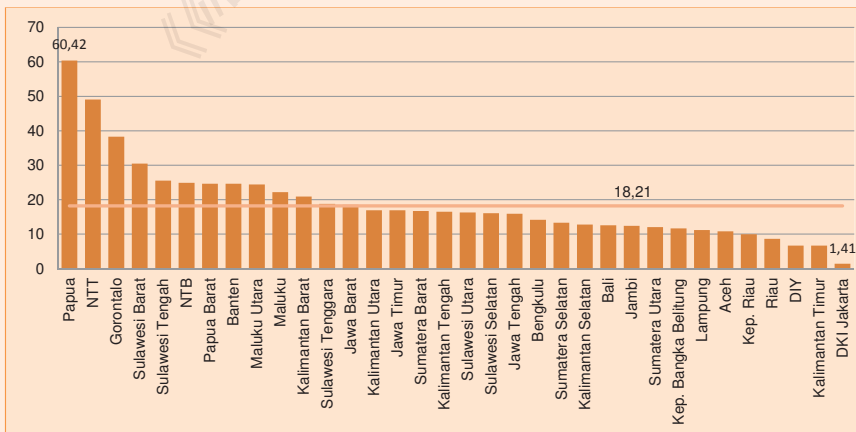
Selain jumlah RTUP miskin, ukuran lain yang bisa diperoleh adalah jumlah penduduk miskin di dalam RTUP atau *headcount ratio*. Jika suatu rumah tangga dikategorikan miskin maka secara otomatis semua anggota rumah tangganya juga dianggap miskin. *Headcount ratio* diperoleh dari jumlah penduduk yang terkategori miskin dibagi dengan total penduduk. Dari hasil penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) diperoleh *headcount ratio* sebesar 0,18. Hal ini berarti secara nasional terdapat sebanyak 18 persen penduduk miskin yang tinggal di dalam RTUP. Selanjutnya *headcount ratio* tersebut dilihat distribusinya menurut provinsi, sumber pendapatan utama RTUP, rata-rata pendapatan dari sektor pertanian, dan menurut luas lahan pertanian yang dikuasai.

Penduduk Miskin Di Provinsi Wilayah Timur Cukup Tinggi

Jika dilihat sebarannya menurut provinsi menunjukkan *headcount* (H) yang tertinggi terjadi di Papua yaitu mencapai mencapai 60 persen atau lebih dari separuh penduduk yang tinggal di dalam RTUP di Papua adalah penduduk miskin. Sedangkan *headcount* yang terendah di DKI Jakarta yaitu hanya 1,4 persen. Sebagai ibukota negara, ketersediaan sarana dan prasarana di DKI Jakarta membuat RTUP lebih mudah untuk mengakses kebutuhan dasar sehingga kemiskinan multidimensi di provinsi ini paling rendah. Selain itu rendahnya *headcount* di DKI Jakarta juga disebabkan oleh jumlah RTUP yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 5.4 menunjukkan kesenjangan antar provinsi di Indonesia dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Masih terdapat 13 provinsi dengan *headcount* di atas rata-rata nasional. Sebagian besar provinsi tersebut berada di kawasan Timur Indonesia, kecuali Provinsi Banten, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Capaian *headcount* pada ketiga provinsi tersebut berkisar antara 19-25 persen. Jika dibandingkan dengan pengukuran kemiskinan melalui pendekatan pengeluaran, Provinsi Kalimantan Barat termasuk ke dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan pertanian yang relatif rendah yaitu sekitar 8 persen (diolah dari Data Susenas Maret 2013). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pendapatan yang diterima sudah cukup tinggi, tidak semua aspek kualitas hidup dapat diakses dengan baik. Akibatnya kapasitas untuk keluar dari kemiskinan juga turut berkurang.

Gambar 5.4
Persentase Penduduk Miskin (*Headcount*) pada RTUP Menurut Provinsi (persen), 2013

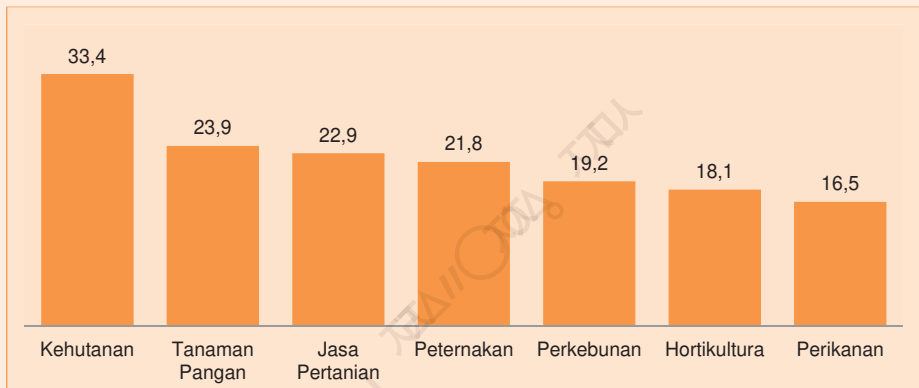


Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Penduduk Subsektor Kehutanan dan Tanaman Pangan Menderita Kemiskinan Multidimensi Paling Parah

Kemiskinan multidimensi terjadi di seluruh subsektor pertanian di Indonesia. Jasa pertanian pun tidak luput dari kemiskinan multidimensi. Ironisnya, meskipun memiliki hutan yang menjadi salah satu paru-paru terbesar di dunia, kemiskinan multidimensi paling parah terjadi di RTUP subsektor kehutanan. Di tengah laju deforestasi yang semakin tak terkendali, sepertiga penduduk pada RTUP subsektor ini mengalami kemiskinan multidimensi. Berikutnya yang mengalami kemiskinan multidimensi terparah adalah RTUP subsektor tanaman pangan. Sekitar 24 persen penduduk pada RTUP subsektor ini mengalami kemiskinan multidimensi.

Gambar 5.5
Persentase Penduduk Miskin (Headcount) Menurut Sumber Pendapatan Utama RTUP (persen), 2013



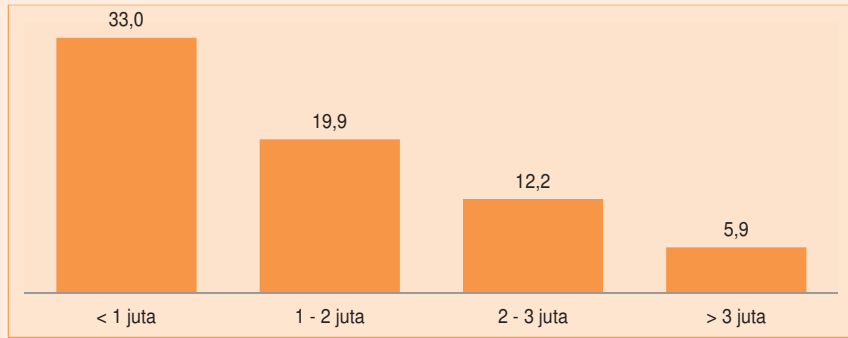
Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Perairan yang menutupi hampir dua pertiga wilayah Indonesia menyimpan banyak sumber daya dan biota laut. Kekayaan ini menjadi berkah tersendiri bagi petani di subsektor perikanan. Meskipun subsektor perikanan juga tidak luput dari kemiskinan multidimensi, RTUP subsektor ini terbilang lebih sejahtera dibandingkan subsektor lainnya. Hanya 16,5 persen penduduk pada RTUP subsektor perikanan yang mengalami kemiskinan multidimensi.

Pendapatan Petani Erat Dengan Kemiskinan Multidimensi

Untuk mengukur standar hidup, beberapa indikator dapat digunakan sebagai pendekatan, misalnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, pendapatan per kapita, atau pengeluaran per kapita. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seperti halnya kemiskinan. Dengan asumsi bahwa baik kemiskinan maupun pendapatan adalah ukuran dari kesejahteraan, keduanya dapat berhubungan atau berkorelasi

Gambar 5.6
 Persentase
 Penduduk
 Miskin Menurut
 (Headcount)
 Kelompok
 Pendapatan dari
 Sektor Pertanian
 (persen), 2013



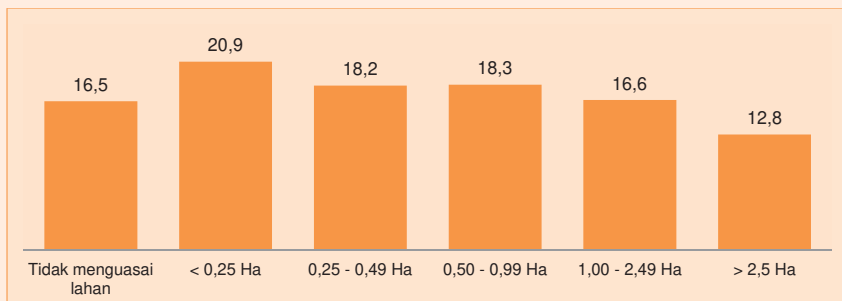
Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Survei Pendapatan Petani 2013 menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan dari sektor pertanian dan kemiskinan multidimensi. Pada RTUP dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta/bulan terdapat sekitar sepertiga penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi. Jumlah ini semakin turun hingga mencapai 6 persen pada RTUP dengan pendapatan di atas Rp 3 juta/bulan. Artinya, semakin tinggi pendapatan RTUP maka semakin rendah terjadinya kemiskinan multidimensi.

Penduduk Miskin Multidimensi Lebih Banyak pada RTUP dengan Lahan Sempit

Lahan pertanian ditujukan atau cocok sebagai lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Namun demikian terdapat usaha yang tidak menggunakan lahan seperti penangkapan ikan di laut maupun perairan umum. Lahan pertanian menjadi salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Lahan pertanian tidak mencakup lahan yang tidak mampu ditanami seperti hutan, pegunungan curam, dan perairan.

Gambar 5.7
 Persentase
 Penduduk
 Miskin Menurut
 (Headcount) Luas
 Lahan Pertanian
 yang Dikuasai
 RTUP (persen),
 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Kemiskinan multidimensi memiliki hubungan negatif dengan luas penguasaan lahan RTUP. Kemiskinan multidimensi diderita sekitar 20 persen penduduk dalam RTUP yang menguasai lahan pertanian di bawah 0,25 Ha. Jumlahnya semakin turun seiring dengan meningkatnya luas penguasaan lahan pertanian. Pada RTUP yang menguasai lahan pertanian lebih dari 2,5 Ha, persentase penduduk miskin multidimensi hanya 13 persen.

INTENSITAS KEMISKINAN PENDUDUK

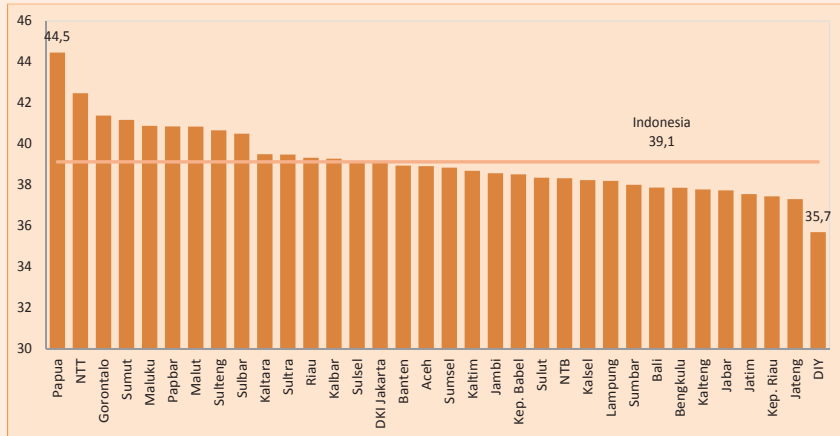
Kemiskinan multidimensi memberikan sisi pemahaman yang berbeda daripada kemiskinan makro berbasis garis kemiskinan. Pada kemiskinan makro, individu atau rumah tangga dikategorikan miskin apabila memiliki pengeluaran berada di bawah suatu garis kemiskinan (GK). Pada kemiskinan multidimensi, rumah tangga diberi skor terlebih dahulu sesuai dengan kondisi 10 indikator yang dimiliki (lihat catatan teknis). Rumah tangga akan memiliki skor antara 0 hingga 100. Skor ini dikenal dengan skor kekurangan multidimensi. Selanjutnya, rumah tangga dikategorikan miskin ketika mencapai skor di atas 33,3 persen.

Secara teknis, rata-rata skor kekurangan penduduk miskin terhadap akses 10 indikator merupakan intensitas kemiskinan multidimensi. Ini dihitung dari jumlah seluruh skor kekurangan dibagi dengan jumlah penduduk miskin. Ukuran ini menunjukkan rata-rata skor penduduk kekurangan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sebagaimana halnya *headcount ratio*, intensitas kemiskinan juga dilihat distribusinya menurut provinsi, rata-rata pendapatan dari sektor pertanian, dan luas lahan pertanian yang dikuasai RTUP.

Intensitas Kemiskinan Multidimensi Relatif Seragam Antarprovinsi

Rata-rata kemiskinan multidimensi yang terjadi pada penduduk miskin di dalam RTUP tercatat sebesar 39 persen. Angka ini hampir merata di seluruh provinsi yaitu berkisar antara 36 persen hingga 45 persen. Intensitas tertinggi terjadi di Provinsi Papua, sementara intensitas terendah terjadi di DI Yogyakarta. Terdapat 59 persen provinsi dengan intensitas di bawah nasional, sementara sisanya berada di atas nasional.

Jika dilihat pada kawasan pulau, terdapat temuan menarik. Di Pulau Sumatera, intensitas kemiskinan multidimensi tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Sementara di daratan Kalimantan, intensitas tertinggi terjadi di provinsi termuda (Kalimantan Utara).

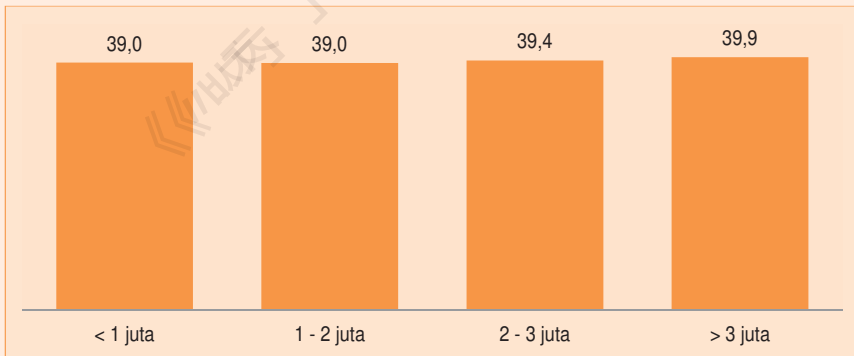


Gambar 5.8
Intensitas Kemiskinan Multidimensi Menurut Provinsi (persen), 2013

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Intensitas Kemiskinan Pada RTUP Relatif Seragam pada Berbagai Tingkat Pendapatan dan Penguasaan Lahan

Intensitas kemiskinan multidimensi relatif seragam untuk berbagai tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tidak berhubungan dengan intensitas kemiskinan multidimensi. Artinya, secara rata-rata tingkat kemiskinan multidimensi yang terjadi pada penduduk miskin relatif sama meskipun berbeda kelompok pendapatan.

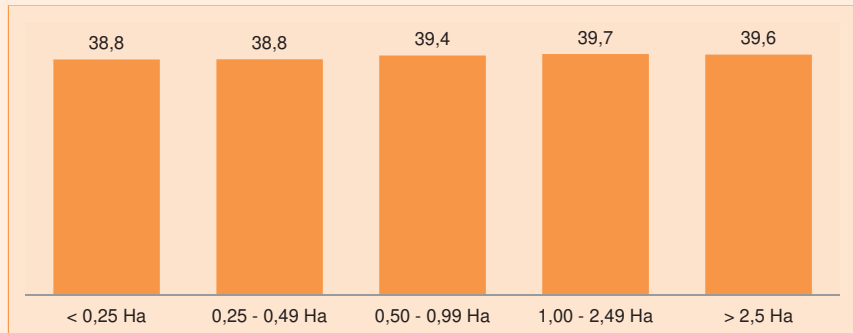


Gambar 5.9
Intensitas Kemiskinan Multidimensi pada RTUP Miskin Menurut Kelompok Pendapatan dari Usaha Pertanian (persen), 2013

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Intensitas kemiskinan multidimensi juga relatif seragam pada berbagai kelompok lahan yang dikuasai RTUP. Survei Pendapatan Petani 2013 memperlihatkan bahwa penguasaan lahan oleh RTUP tidak berhubungan dengan intensitas kemiskinan multidimensi. Artinya, secara rata-rata tingkat kemiskinan multidimensi yang terjadi pada penduduk miskin juga relatif sama meskipun berbeda kelompok luas lahan yang dikuasai. Kemampuan mereka tetap terbatas karena kurangnya kapasitas untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup.

Gambar 5.10
Intensitas
Kemiskinan
Multidimensi
Menurut Luas
Lahan Pertanian
yang Dikuasai
(persen), 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

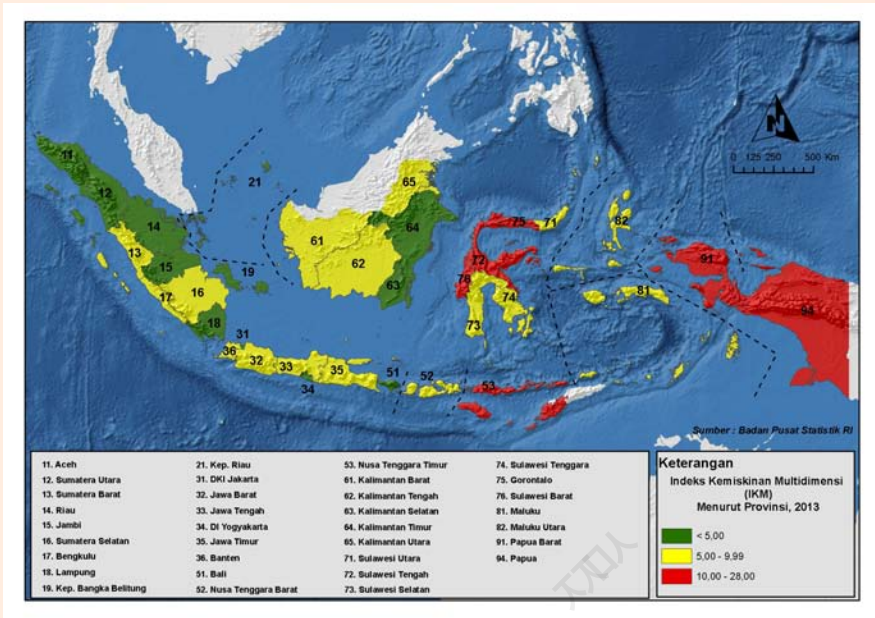
INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) merupakan sebuah indeks komposit yang mengukur kemiskinan secara lebih luas terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. IKM diperoleh dari perkalian antara *headcount ratio* dan intensitas kemiskinan. Jika disederhanakan, IKM merupakan pembagian dari jumlah seluruh skor kekurangan dibagi dengan total penduduk. Oleh karena itu, sementara intensitas kemiskinan menggambarkan rata-rata skor kekurangan yang dialami penduduk miskin terhadap indikator penyusun indeks. dengan kata lain, IKM menggambarkan rata-rata skor kekurangan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang terjadi pada penduduk. Dalam hal ini penduduk pada RTUP.

Dari hasil penghitungan IKM RTUP, rata-rata kekurangan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan standard hidup yang dialami penduduk sebesar 7,12 persen. Hal ini menunjukkan secara rata-rata kekurangannya akses yang dialami penduduk/seluruh ART pertanian adalah 7 persen. Dengan kata lain secara rata-rata hanya satu sampai dua indikator kemiskinan yang tidak bisa dipenuhi oleh rata-rata penduduk dalam RTUP.

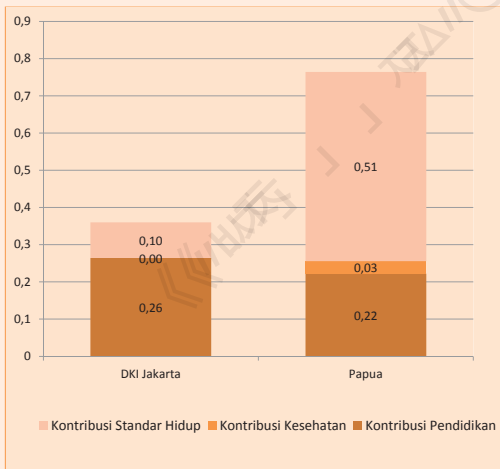
Jika dilihat sebarannya menurut provinsi, kemiskinan multidimensi tertinggi terjadi di Papua yaitu mencapai 26,86 persen, dan terendah di DKI Jakarta yaitu hanya 0,55 persen. Berdasarkan gambar 5.12 terlihat bahwa provinsi dengan capaian IKM tinggi tersebar di wilayah Timur Indonesia. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan antar wilayah, terutama antara Wilayah Barat dan Timur dalam hal akses RTUP terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Gambar 5.11
Peta Indeks Kemiskinan Multidimensi menurut Provinsi, 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Gambar 5.12
Kontribusi per Dimensi dari Provinsi dengan MPI Terbesar dan Terkecil, 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Di DKI Jakarta dimensi pendidikan memberikan kontribusi paling tinggi terhadap IKM (Gambar 5.12). Sedangkan kontribusi dimensi kesehatan terhadap IKM hampir mendekati nol. Hal ini mengindikasikan bahwa akses kesehatan bagi RTUP di DKI Jakarta sudah memadai. Sementara itu IKM di Provinsi Papua sebagian besar disumbang oleh dimensi standard hidup. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik, akses terhadap air minum bersih, sanitasi serta aspek-aspek standard hidup layak di provinsi ini masih sangat kurang.

6

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN

“Ketahanan pangan berhubungan erat dengan komoditi pangan dan wilayah. Rumah tangga usaha pertanian tanaman pangan lebih mempunyai ketahanan pangan tinggi dibandingkan rumah tangga usaha pertanian lainnya. Jika dilihat keterbandingan antar wilayah, ketahanan pangan di wilayah Indonesia Barat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur.”



BAB 6

KETAHANAN PANGAN

RUMAH TANGGA USAHA

PERTANIAN

Pangan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber kalori, protein, vitamin, dan zat gizi mikro/mineral. Ini dibutuhkan seseorang untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Oleh sebab itulah, ketersediaan pangan menjadi hal yang vital.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, dengan subsistem utama adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

Dalam rangka penghitungan indeks ketahanan pangan, terlebih dahulu dihitung indeks masing-masing dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan baik yang bersumber dari hasil produksi, cadangan maupun impor. Sayangnya, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kecepatan pertumbuhan impor produk pertanian jauh lebih cepat daripada ekspor produk serupa. Ketergantungan pemenuhan penyediaan pangan pada impor merupakan indikasi negatif bagi pembangunan.

Kelangsungan penyediaan pangan dari dalam negeri dapat ditempuh dengan meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan aneka ragam pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok, dengan harga yang wajar dan terjangkau (Suryana, 2013). Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka kondisi ketahanan pangan akan terwujud.

Tabel 6.1

Persentase RTUP Menurut Dimensi Ketersediaan Pangan dan Sumber Pendapatan Utama (persen), 2013

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Ketersediaan Pangan		
	Tidak Mempunyai Cukup Persediaan Pangan	Mengalami Kekurangan Pangan	Merasa Takut Kekurangan Pangan
Sektor Pertanian	44,8	8,54	27,14
Tanaman Pangan	39,29	8,64	26,63
Hortikultura	47,91	5,16	21,15
Perkebunan	51,51	9,02	29,54
Kehutanan	46,19	6,91	25,46
Peternakan	49,01	8,8	23,97
Perikanan	55,93	10,29	33,11
Jasa Pertanian	50,55	9,63	27
Sektor Non Pertanian	46,16	4,24	18,37
Lainnya	45,47	4,25	15,86
Indonesia	45,19	7,27	24,50

Sumber: BPS, ST2013-SPP

Secara umum, sekitar 45 persen RTUP tidak mempunyai ketersediaan pangan yang cukup untuk setahun. Namun, hanya sekitar 7 persen yang mengalami kekurangan pangan. RTUP dengan sumber pendapatan utamanya tanaman pangan mempunyai persentase terkecil yang tidak mempunyai ketersediaan pangan yang cukup. Hal ini terjadi karena bahan pangan diproduksi RTUP sendiri. Sementara, persentase RTUP yang tidak cukup persediaan pangannya adalah RTUP perikanan.

Yang cukup ironis adalah ketika RTUP ditanyakan tentang ketakutan kekurangan pangan dimana RTUP yang sumber pendapatan utamanya dari non pertanian justru yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena rata-rata pendapatan rumah tangga yang sumber pendapatan utamanya diluar sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dari sektor non pertanian.

Secara nasional Indeks Ketersediaan Pangan berada pada nilai 89,23 dengan sumbangan masing-masing indikator adalah 49,02 untuk kecukupan persediaan pangan, 26,89 untuk tidak kekurangan pangan, dan 24,0 untuk ketakutan kekurangan pangan. Dari hasil ini secara nasional Indeks Ketersediaan Pangan berada pada posisi yang cukup baik, sebagaimana tercermin dari sumbangan terbesar yang berasal dari indikator kecukupan persediaan pangan, dan yang terkecil berasal dari indikator ketakutan kekurangan pangan.

Indeks Ketersediaan Pangan Menurut Subsektor

Dimensi ketersediaan pangan menurut subsektor menunjukkan skor yang dicapai RTUP berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang berhubungan dengan ketersediaan pangan. Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik ketersediaan pangan RTUP di subsektor tersebut. Rata-rata skor atau indeks yang dicapai rumah tangga usaha tani di atas 85. Terdapat perbedaan antara RTUP yang mempunyai penghasilan utama non pertanian dari pertanian. Terlihat bahwa RTUP dengan penghasilan utama dari non pertanian mempunyai Indeks Ketersediaan Pangan lebih tinggi dari RTUP pertanian. Untuk RTUP pertanian indeks ketersediaan pangan tertinggi dicapai oleh RTUP tanaman pangan yaitu 89,82, kemudian disusul oleh subsektor hortikultura. Dimensi ketersediaan pangan terendah ada pada RTUP subsektor perikanan (Tabel 6.2).

Ketersediaan pangan pada RTUP tidak terlepas dari sifat produksi komoditas pangan itu sendiri. Perilaku produksi yang sangat tergantung pada iklim secara langsung berpengaruh terhadap ketersediaan pangan nasional. Hal ini bisa dilihat dari urutan ketersediaan pangan RTUP menurut penghasilan utama per subsektor. RTUP dengan penghasilan utama rumah tangga bukan berasal dari sektor pertanian menempati urutan pertama. Sementara rumah tangga dengan penghasilan utama berasal dari tanaman pangan menempati urutan kedua. Mengingat padi merupakan komoditas strategis yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah, produksinya relatif terjaga. RTUP perikanan menempati urutan terakhir dari sisi ketersediaan pangan. Ini berkaitan dengan produksi tangkapan ikan yang tergantung pada iklim atau cuaca.

Tabel 6.2
Skor Dimensi Ketersediaan Pangan menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan Utama	Skor Kecukupan		Skor Ketakutan Kekurangan Pangan	Total Skor Kecukupan Pangan	Dimensi Ketersediaan Pangan
	Persediaan Pangan	Skor Tidak Kekurangan Pangan			
Tn Pangan	5.37	2.86	2.53	10.75	89.62
Hortikultura	5.18	2.92	2.63	10.73	89.42
Perkebunan	5.12	2.85	2.49	10.47	87.21
Kehutanan	5.23	2.89	2.56	10.68	89.00
Peternakan	5.16	2.85	2.58	10.59	88.28
Perikanan	5.03	2.84	2.43	10.29	85.73
Jasa Pertanian	5.12	2.86	2.53	10.51	87.60
Sektor Lainnya	5.24	2.94	2.68	10.87	90.57
Total	5.25	2.88	2.57	10.71	89.23

Sumber: BPS, Ditolah dari ST2013-SPP

Dilihat berdasarkan skor per indikator, ternyata pola indikator kecukupan pangan tidak berbeda dari pola umum dimensi ini, di mana RTUP sektor non pertanian menempati urutan pertama diikuti oleh RTUP sektor pertanian. Pada indikator kedua, yaitu tidak kekurangan pangan, skor tertinggi juga dicapai oleh RTUP dengan penghasilan utama bukan dari sektor pertanian. Indikator ketiga juga menunjukkan pola yang sama.

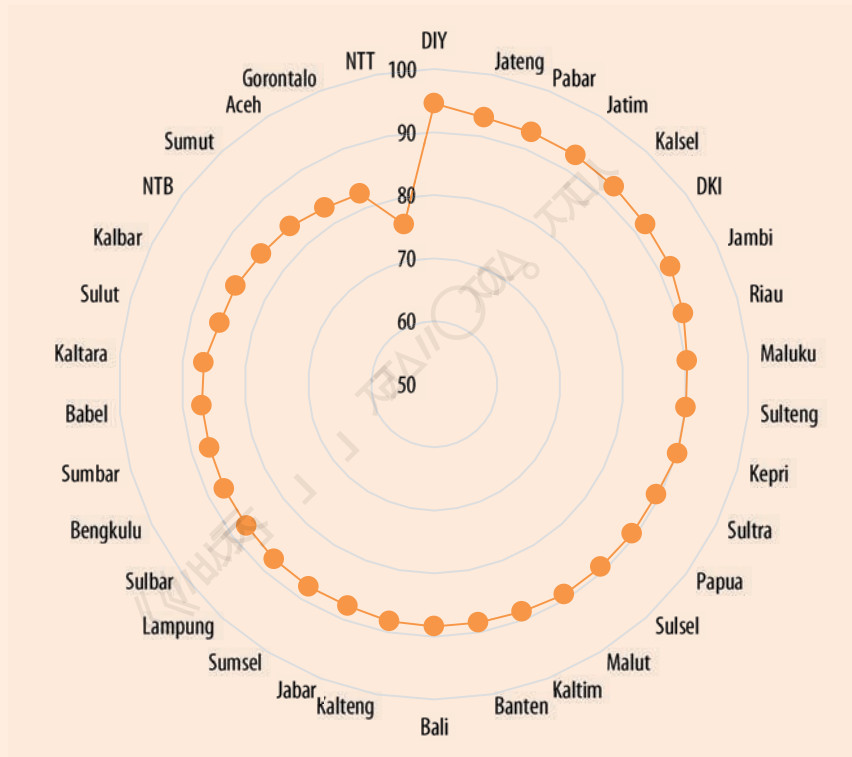
Indeks Ketersediaan Pangan menurut Provinsi

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia maka kebutuhan akan panganpun terus meningkat. Tingkat ketersediaan pangan secara nasional tidak langsung menggambarkan ketahanan pangan, karena harus diperhitungkan pula persebaran pangan antar provinsi.

Pada level provinsi nilai indeks ketersediaan pangan ini berkisar dari 75,83 hingga 94,53. Dengan rentang indeks tersebut, walaupun secara absolut terlihat dekat tetapi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar antar provinsi. Indeks Ketersediaan Pangan tertinggi dicapai oleh DI Yogyakarta, dan yang terendah oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bila dilihat dari struktur kependudukan tahun 2013, jumlah penduduk DI Yogyakarta hanya sekitar 3,6 juta orang atau sebanyak 1,0 juta rumah tangga, sekitar 50 persen rumah tangga di DI Yogyakarta adalah RTUP dimana sebagian besar adalah RTUP tanaman pangan. Dengan demikian ketersediaan pangan di DI Yogyakarta cukup memadai.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebaliknya, berada pada urutan terakhir untuk dimensi ketersediaan pangan. Jumlah rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 adalah 1,1 juta, dan sekitar 72,6 persen di antaranya adalah rumah tangga usaha tani (RTUP). Walaupun RTUP mendominasi, produksi padi di sini hanya mencapai 0,7 juta ton. Produktivitas petani padi di sini masih berada jauh di bawah DI Yogyakarta. NTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga lebih rendah dibandingkan DI Yogyakarta. Rendahnya kinerja pertanian tanaman pangan menyumbang pada rendahnya Indeks Ketersediaan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 6.1
Dimensi Ketersediaan Pangan menurut Provinsi, 2013

Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Wilayah dengan dimensi ketersediaan pangan pada peringkat lima teratas meliputi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 6.1). Sementara provinsi-provinsi yang berada pada peringkat lima terbawah adalah Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

KETERJANGKAUAN PANGAN

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik jumlah maupun keragamannya. Oleh karena itu, aksesibilitas pangan sangat erat berhubungan dengan strategi kebijakan kecukupan pangan. Selain itu, tingkat aksesibilitas pangan juga merupakan salah satu faktor yang mengintai krisis pangan, di mana krisis tidak hanya terlihat dari minimnya jumlah produk atau berkurangnya pangan di lapangan, namun lebih didasarkan atas ketidakmampuan masyarakat untuk membeli dan memperoleh pangan yang berkualitas (Soemarno, 2010).

Berdasarkan hasil ST 2013-SPP, sebagian besar pangan diproduksi didalam kecamatan. Ini menunjukkan kemudahan akses memperoleh pangan. Tabel 6.3 menunjukkan tidak lebih dari 35 persen RTUP yang mendapatkan pangan di luar kecamatan, baik pada RTUP dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian, non pertanian, maupun sektor lainnya. Bahkan, hanya 8,75 persen RTUP subsektor tanaman padi dan palawija yang mengalami kesulitan akses pangan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas RTUP mudah dalam memenuhi kebutuhan pangan karena kemudahan akses tanpa perlu mencari ke tempat yang lebih jauh. Dengan banyaknya produksi pangan lokal, ketersediaan pangan dapat diupayakan secara berkesinambungan. Ketahanan pangan semacam ini tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejala pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah.

Berdasarkan indikator kesulitan menjangkau lokasi pembelian, terlihat mayoritas RTUP tidak memiliki kesulitan untuk menjangkau lokasi pembelian pangan. Hanya kurang dari 9 persen RTUP yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan. Di sinipun RTUP sektor non pertanian dan subsektor jasa pertanian yang tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi pembelian pangan relatif lebih banyak. Kemudahan ini ditunjang oleh prasarana fisik pasar yang cukup, atau jumlah pasar dengan jarak kurang dari 3 km dari desa yang relatif banyak. Selain itu, sebagian besar RTUP berada di pulau Jawa, yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 6.3
 Persentase RTUP Menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan dan Sumber Pendapatan Utama (persen)

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Keterjangkauan Pangan		
	Pangan Tidak Diproduksi di Kecamatan	Kesulitan Menjangkau Lokasi Pembelian	Harga Pembelian Tinggi
Sektor Pertanian	18,45	7,04	27,24
Tanaman Pangan	8,75	6,36	23,51
Hortikultura	21,48	5,57	27,60
Perkebunan	35,00	8,75	32,59
Peternakan	14,31	7,53	27,55
Perikanan	13,64	7,19	28,93
Kehutanan	29,84	6,61	34,25
Jasa Pertanian	20,35	4,99	30,70
Sektor Non Pertanian	15,65	3,27	24,42
Lainnya	11,92	6,30	24,37

Sumber: BPS, diolah ST2013-SPP

Dimensi keterjangkauan terdiri dari satu aspek yaitu aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek ini dibentuk oleh tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian, dan indikator harga pembelian tidak tinggi. Secara nasional, Indeks Keterjangkauan Pangan berada posisi yang cukup baik, yakni berada pada nilai 83,35. Nilai ini merupakan hasil sumbangan dari indikator pangan yang diproduksi di kecamatan sebesar 32,8 persen, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian sebesar 37,6 persen, dan indikator harga pembelian sebesar 29,6 persen.

Indeks Keterjangkauan Pangan menurut Subsektor

Berkaitan dengan kemampuan yang berbeda untuk setiap rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan pangan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin agar rumah tangga memiliki akses terhadap pangan yang tersedia. Upaya atau kebijakan umum yang diterapkan adalah stabilisasi harga pangan pokok agar mekanisme pasar dan distribusi yang ada dapat menyediakannya dengan harga yang terjangkau. Ini juga memudahkan RTUP untuk membeli pangan.

Indeks Dimensi Keterjangkauan Pangan pada RTUP sudah mencapai di atas 74 (Tabel 6.4). Indeks tertinggi dicapai RTUP subsektor tanaman padi dan palawija, yaitu 87,12. Posisi tertinggi tersebut terjadi karena RTUP tanaman pangan menghasilkan padi/palawija yang dapat dikonsumsi sendiri, sehingga akses kepada pangan menjadi mudah.

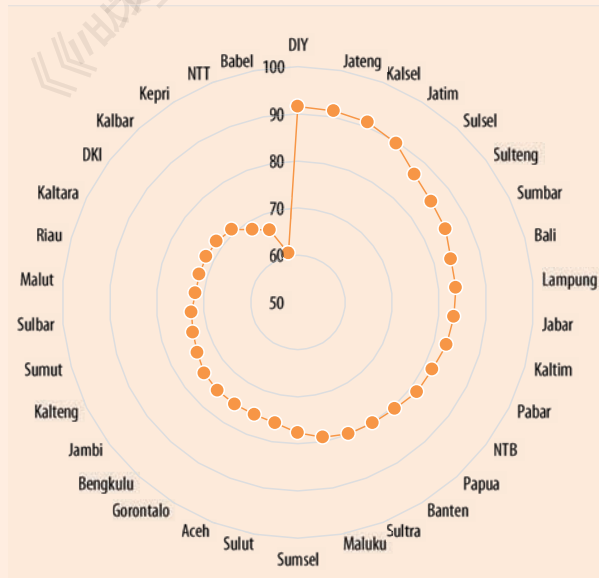
Tabel 6.4
Skor Dimensi Keterjangkauan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama

Sumber Pendapatan Utama	Skor Pangan Diproduksi di Kecamatan	Skor Kesulitan Menjangkau Lokasi Pembelian	Skor Harga Pembelian	Total Skor ke Terjangkauan Fisik, Ekonomi, Sosial	Dimensi Keterjangkauan Pangan
Tanaman Pangan	0,91	0,94	0,76	2,61	87,12
Hortikultura	0,79	0,94	0,72	2,45	81,78
Perkebunan	0,65	0,91	0,67	2,24	74,55
Kehutanan	0,86	0,92	0,72	2,51	83,54
Peternakan	0,86	0,93	0,71	2,50	83,41
Perikanan	0,70	0,93	0,66	2,29	76,43
Jasa Pertanian	0,80	0,95	0,69	2,44	81,32
Sektor Lainnya	0,85	0,96	0,76	2,57	85,57
Total	0,82	0,94	0,74	2,50	83,35

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Indeks Keterjangkauan Pangan menurut Provinsi

Aksesibilitas atau keterjangkauan pangan yang cukup ternyata berbeda-beda untuk tiap provinsi di Indonesia (Gambar 6.2). Keterjangkauan pangan oleh RTUP paling tinggi dicapai DI Yogyakarta, disusul Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Sedangkan di Provinsi Bangka Belitung RTUP memiliki keterjangkauan pangan paling rendah.



Gambar 6.2
Indeks Keterjangkauan Pangan menurut Provinsi, 2013

Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Keterjangkauan pangan yang tinggi di DI Yogyakarta tertinggi didukung oleh banyaknya sarana dan prasarana yang memudahkan RTUP untuk memperoleh pangan. Dengan luas geografis yang tidak terlalu besar, DI Yogyakarta memiliki 246 pasar dengan bangunan permanen, 66 pasar tanpa bangunan, 358 kios sarana produksi pertanian dan 195 kelompok pertokoan. Bahkan, dari 8.577 desa yang berada di DI Yogyakarta, hanya terdapat 83 desa yang tidak memiliki akses pasar dengan jarak kurang dari 3 km. Selain itu, harga pangan pokok di DI Yogyakarta pun tergolong murah, sehingga memudahkan RTUP menjangkau pangan.

PEMANFAATAN PANGAN

Indikator pemanfaatan pangan diwakili oleh dua aspek, yaitu, pertama, kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan, yang diukur dengan tidak ada balita yang kurang gizi dan tidak ada balita yang meninggal karena sakit. Kedua, kualitas air yang diukur oleh dua indikator, yaitu sumber air minum utama dan sumber air masak utama.

Tabel 6.5 menunjukkan sebagian besar RTUP tidak memiliki balita kurang gizi. Persentase RTUP sektor pertanian, non pertanian, dan lainnya yang memiliki balita kurang gizi relatif rendah dan nilainya tidak jauh berbeda, yaitu kurang dari 2 persen. Pola tersebut pun tak jauh berbeda dari indikator ada balita yang meninggal karena sakit. Sementara itu, RTUP yang menggunakan air yang buruk untuk minum dan masak hanya sedikit.

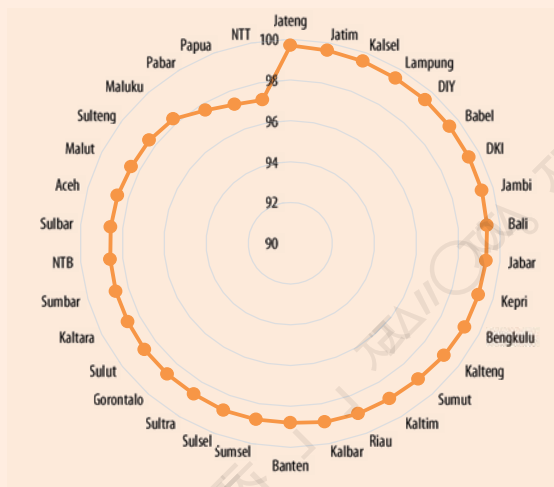
Tabel 6.5
Persentase RTUP Menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan dan Sumber Pendapatan Utama (persen), 2013

Sumber Pendapatan Utama	Pemanfaatan Pangan			
	Ada balita yang kurang gizi	Ada balita yang meninggal krn sakit	Sumber air minum dari air sungai/ hujan/ lainnya	Sumber air utama masak dari air sungai/ hujan/ Lainnya
Sektor Pertanian	0,88	0,91	9,13	9,78
Tanaman Pangan	0,87	0,83	6,85	7,43
Hortikultura	0,71	0,82	5,98	6,39
Perkebunan	0,87	1,12	14,27	14,95
Peternakan	0,86	0,72	13,00	13,90
Perikanan	0,80	0,59	4,50	4,81
Kehutanan	1,36	1,23	13,16	15,06
Jasa Pertanian	1,17	0,61	9,64	10,69
Sektor Non Pertanian	0,75	0,68	4,31	4,99
Lainnya	0,55	0,44	3,33	3,52
Indonesia	0,85	0,87	8,29	8,93

Sumber: BPS, ST2013-SPP

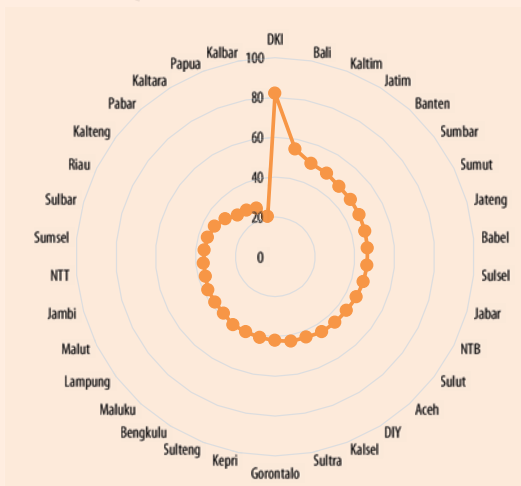
Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, terdapat perbedaan antar provinsi menurut aspek kecukupan asupan pangan dan kualitas air. Pada aspek kecukupan asupan, Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi pertama, disusul Jawa Timur dan Kalimantan Selatan (Gambar 6.3). Adapun DKI Jakarta menduduki posisi pertama dalam hal penggunaan air berkualitas baik sebagai sumber air minum dan air masak utama. Sementara itu Kalimantan Barat berada pada posisi paling rendah dalam hal penggunaan air berkualitas, yaitu sebanyak 20,63 persen RTUP (Gambar 6.4). Masih banyak penduduk yang bergantung pada air yang bersumber dari Sungai Kapuas menjadi kendala ketika musim kemarau tiba. Air baku dari Sungai Kapuas menjadi payau akibat intrusi air laut, sehingga air yang diakses masyarakat asin serta tidak layak untuk diminum.

Gambar 6.3
Indeks Pemanfaatan Pangan dari Aspek Kebutuhan Asupan menurut Provinsi, 2013



Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Gambar 6.4
Indeks Pemanfaatan Pangan dari Aspek Kualitas Air menurut Provinsi, 2013



Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Indeks Pemanfaatan Pangan menurut Subsektor

Secara keseluruhan, RTUP subsektor perikanan berada di posisi pertama dalam hal pemanfaatan pangan, disusul RTUP sektor non pertanian pada posisi kedua (Tabel 6.6). Meskipun rata-rata skor yang dicapai tidak terlalu tinggi, yakni tidak lebih dari 76 persen, namun pemanfaatan pangan dapat dikatakan sudah cukup baik. Sementara itu, kualitas air yang digunakan RTUP masih rendah. Ini perlu mendapat perhatian, mengingat penggunaan air bersih untuk minum dan memasak berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015 sebagaimana telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

Tabel 6.6
Skor Dimensi Pemanfaatan Pangan Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013

Sumber Pendapatan utama	Skor Asupan pangan	Skor Kualitas air	Dimensi Pemanfaatan pangan
Tanaman Padi & Palawija	99,15	43,33	71,24
Peternakan	99,31	44,38	71,84
Hortikultura	99,23	43,72	71,47
Kehutanan	99,21	36,42	67,81
Jasa Pertanian	99,11	41,34	70,23
Perikanan	98,70	51,76	75,23
Perkebunan	99,01	37,20	68,10
Sektor Non Pertanian	99,29	48,81	74,05
Lainnya	99,50	47,85	73,68
Total	99,17	43,90	71,53

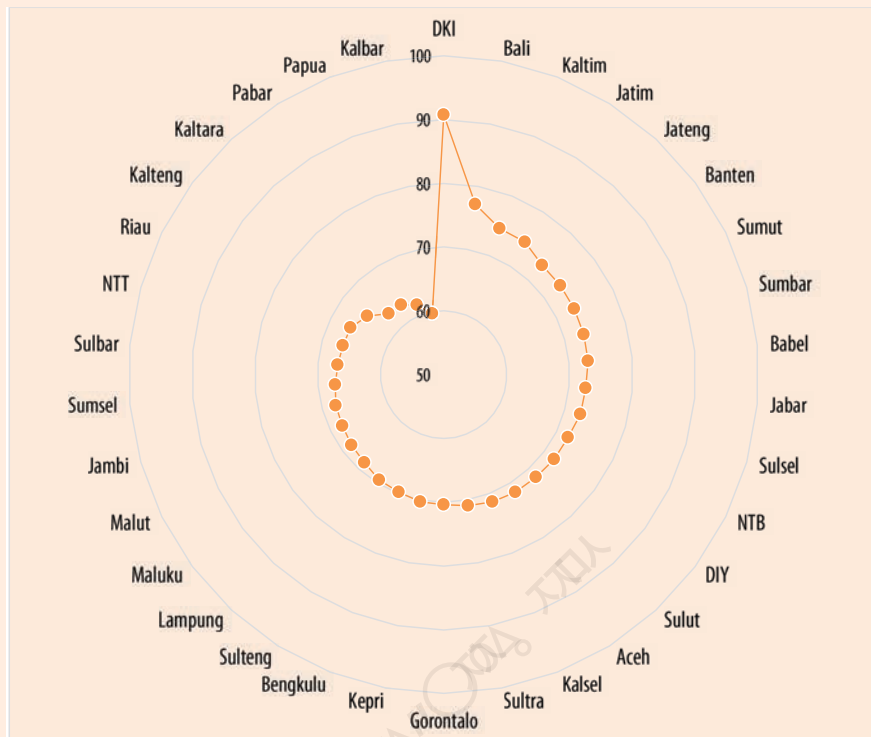
Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Indeks Pemanfaatan Pangan menurut Provinsi

Kemudahan akses terhadap pangan berdampak pada pemanfaatannya. Akses dan ketersediaan pangan yang tinggi meningkatkan peluang pemanfaatan pangan secara lebih besar pula. Dari letak geografisnya, Gambar 6.5 menunjukkan DKI Jakarta menduduki posisi pertama dalam pemanfaatan pangan, diikuti Provinsi Bali, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Sementara itu Provinsi Kalbar menempati posisi terakhir.

Tingginya pemanfaatan pangan di DKI Jakarta didukung oleh kemudahan sarana dan prasarana teknologi informasi serta layanan kesehatan meningkatkan akses individu terhadap pengetahuan mengenai pemanfaatan pangan yang dapat mencukupi asupan gizi dan memperbaiki status kesehatan rumah tangga.

Gambar 6.5
Indeks
Pemanfaatan
Pangan menurut
Provinsi, 2013



Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

KETAHANAN PANGAN INDONESIA

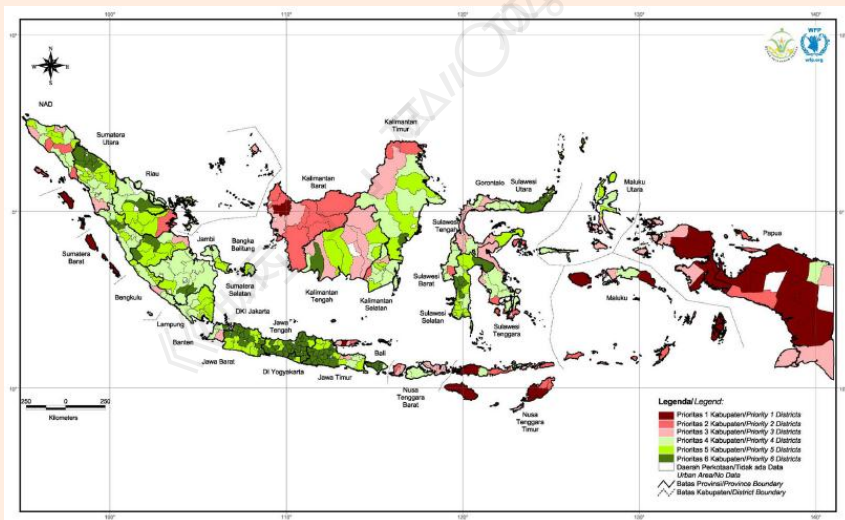
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Berada di jalur khatulistiwa serta memiliki banyak gunung api, menjadikan wilayah daratan Indonesia yang luasnya mencapai 1,9 juta Km² sangat subur dan ideal untuk bercocok-tanam. Luas wilayah perairan nusantara mencapai 5,8 juta Km², dan merupakan rumah bagi 37 persen spesies ikan di dunia. Beberapa di antaranya adalah komoditi perikanan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, tenggiri, udang, lobster, kerapu, serta rumput laut.

Dianugerahi negeri laksana surga, ternyata tidak serta merta membuat pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia menjadi mudah. Berdasarkan Indeks Kelaparan Global yang dirilis oleh IFPRI (*International Food Policy Research Institute*) tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat ke-23 dari total 78 negara dengan angka indeks 10,1. Capaian ini masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Malaysia (peringkat 6), Thailand (9), serta Vietnam (16). Masalah kelaparan sangat tergantung dari pasokan pangan. Saat ini pasokan pangan masih sangat rentan, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor bahan pangan dari negara lain. Dengan demikian, masalah ketahanan pangan juga belum sepenuhnya bisa diatasi.

Menyadari akan luas wilayah yang cukup besar dan kondisi geografis yang berpulau-pulau, pembangunan di Indonesia termasuk sektor pertanian sampai saat ini masih belum merata. Mayoritas suplai bahan makanan masih dihasilkan Pulau Jawa, sehingga tidak mustahil distribusi pangan juga belum sepenuhnya merata. Konsekuensinya adalah munculnya disparitas ketahanan pangan antar wilayah.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang diluncurkan Badan Ketahanan Pangan dan *World Food Programme* (WFP), sebanyak 346 kabupaten dibagi ke dalam enam kategori prioritas. Ini didasarkan pada Indeks Ketahanan Pangan Komposit. Perhatian lebih besar diberikan kepada kabupaten prioritas 1-3. Dari 100 wilayah yang menjadi perhatian utama, sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta jiwa. Beberapa penyebab utama rendahnya ketahanan pangan di wilayah tersebut meliputi kemiskinan, rendahnya kesehatan balita, serta buruknya kualitas sanitasi.

Gambar 6.6
Peta Kerentanan
Pangan Indonesia
(*Food Security and
Vulnerability Atlas*),
2009



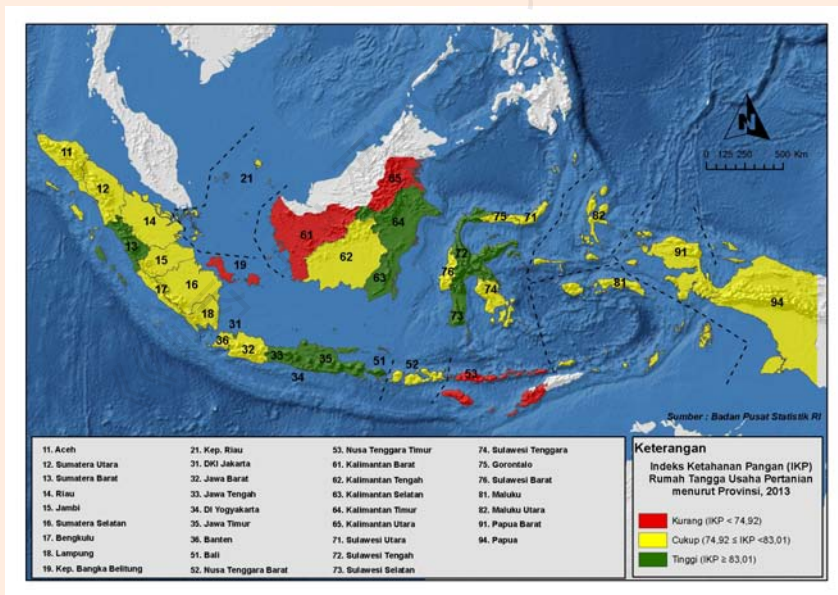
Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, *World Food Programme*

Indeks Ketahanan Pangan RTUP

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan kemampuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi penduduk Indonesia. Sebagai negara agraris, sejatinya Indonesia mampu mewujudkan mimpi untuk mandiri pangan serta berdaulat pangan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah seindah yang dibayangkan. Hasil Sensus Pertanian 2013 masih memperlihatkan kurangnya

ketahanan pangan RTUP di beberapa wilayah, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah di Kalimantan. Meski demikian, angin segar justru datang dari beberapa provinsi yang dalam FSVA 2009 termasuk dalam prioritas tinggi, namun memiliki capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) RTUP lebih baik, seperti di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat.

IKP RTUP membagi capaian 34 provinsi ke dalam tiga kategori yaitu: Tinggi (IKP $\geq 83,01$); Cukup ($74,92 < \text{IKP} \leq 83,01$); dan Kurang (IKP $< 74,92$). Sebanyak 24 provinsi memiliki capaian IKP Cukup, sementara hanya enam provinsi saja yang memiliki capaian IKP Tinggi yaitu DI Yogyakarta (IKP 86,03), Jawa Tengah (85,85), Jawa Timur (85,61), Kalimantan Selatan (84,94), DKI Jakarta (84,78), serta Bali (83,09). Sisanya, sebanyak empat provinsi masuk dalam kategori IKP Kurang yaitu Provinsi Kalimantan Utara (73,79), Kep. Bangka Belitung (73,58), Kalimantan Barat (71,91), dan Nusa Tenggara Timur (69,62). Sebagai catatan, sebagian besar kabupaten pada provinsi yang tergolong IKP Kurang juga masuk kategori Prioritas 1-3 dalam FSVA 2009.



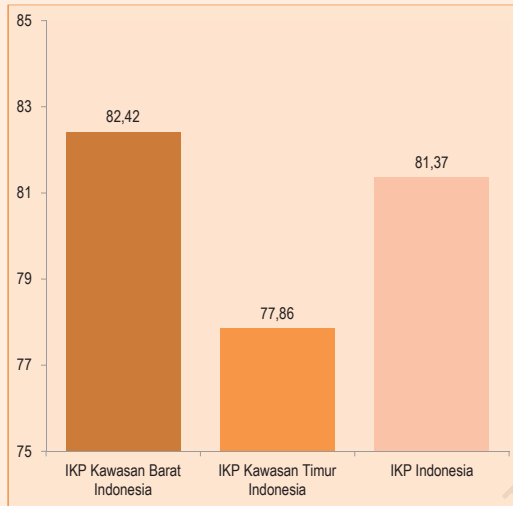
Sumber: BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI), IKP di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih tertinggal (Gambar 6.8). Banyak faktor yang berpengaruh terkait rendahnya IKP di KTI. Salah satunya, pembangunan ekonomi, termasuk pertanian yang belum merata antara wilayah Barat dan Timur telah menciptakan ketergantungan pangan masyarakat KTI, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di samping itu infrastruktur yang belum memadai berpengaruh terhadap

Gambar 6.7
 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, 2013

distribusi pangan di KTI. Dampaknya sebagian besar kasus rawan pangan terjadi di kawasan ini, biasanya di wilayah pegunungan dan terisolir.

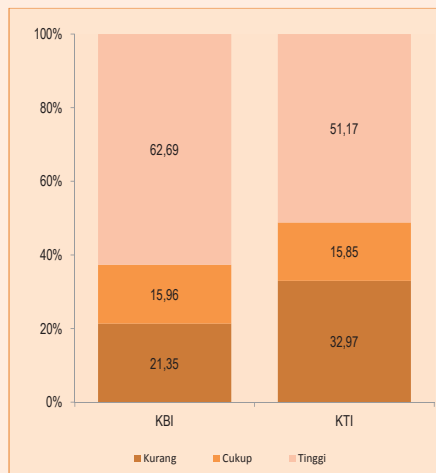
Gambar 6.8
Indeks Ketahanan Pangan menurut Kawasan Pembangunan Indonesia, 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

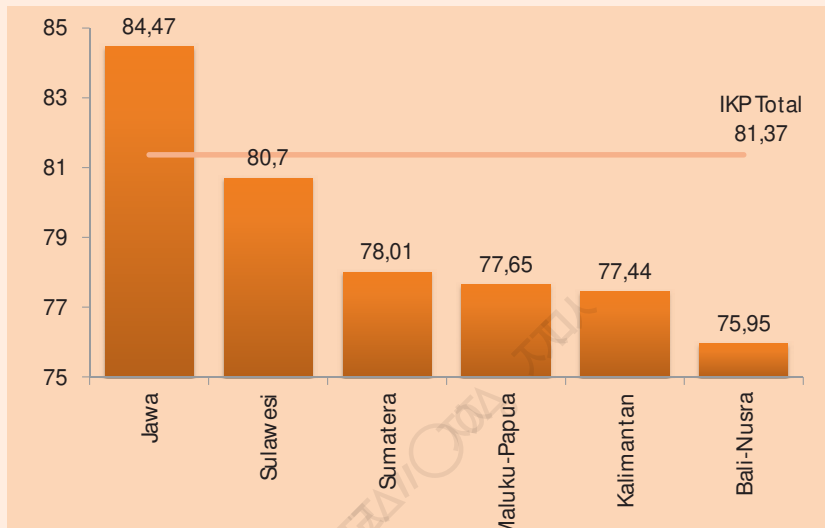
Rendahnya IKP di KTI disumbang oleh banyaknya RTUP terklasifikasi IKP kurang. Hasil SPP 2013 menunjukkan hampir sepertiga RTUP di KTI berketahanan pangan kurang, sementara di KBI hanya seperlimanya (Gambar 6.9). Namun yang cukup mengkhawatirkan dari data ini adalah, RTUP adalah penghasil pangan, namun masih banyak yang menghadapi masalah ketahanan pangan sendiri di Indonesia. Tercatat sebanyak seperlima RTUP masih mengalami masalah ketahanan pangan ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Gambar 6.9
Persentase RTUP menurut Klasifikasi Ketahanan Pangan menurut Kawasan Pembangunan Indonesia, 2013



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Jika nilai IKP RTUP dibandingkan antar pulau, terlihat hanya pada Pulau Jawa saja yang nilainya di atas rata-rata IKP nasional (Gambar 6.10). Oleh karena sebagian besar tanaman pangan dihasilkan di Pulau Jawa, wajarlah masalah ketahanan pangan banyak terjadi di luar Jawa. Rendahnya fasilitas transportasi dan infrastruktur juga berpengaruh pada kesulitan distribusi pangan sampai ke seluruh wilayah Indonesia.

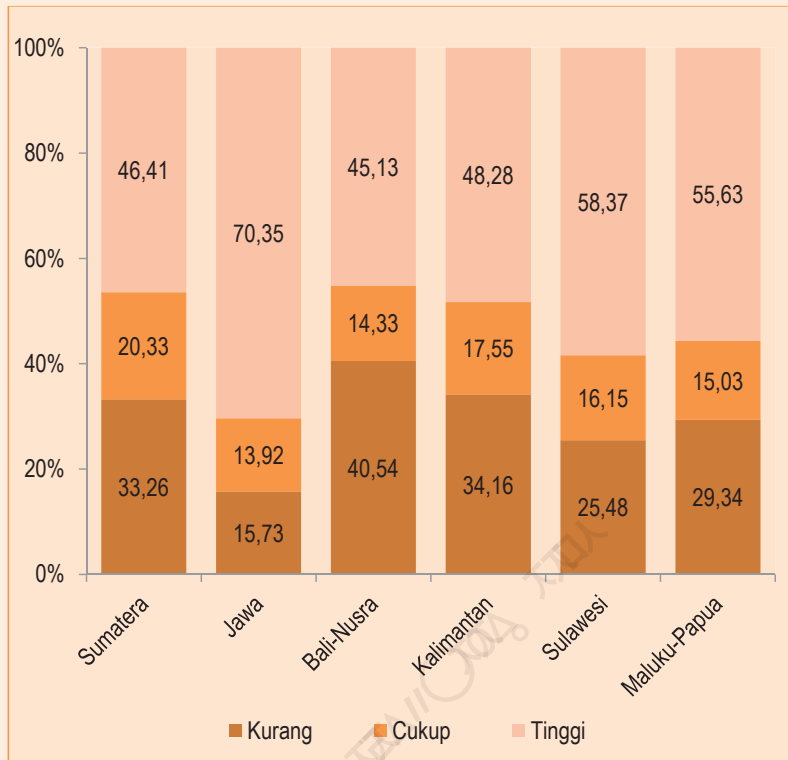


Gambar 6.10
Indeks Ketahanan Pangan Menurut Pulau, 2013

Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Nilai IKP terendah berada di wilayah kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, yaitu hanya 75,95 (Gambar 6.10). Hal ini diduga disumbang oleh jumlah RTUP di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki RTUP dengan IKP rendah dalam jumlah besar. Jika dilihat menurut kategori IKP, persentase IKP yang terkategori kurang di wilayah kepulauan Bali dan Nusa Tenggara sangat besar yaitu mencapai 40 persen (Gambar 6.11).

Gambar 6.11
Persentase RTUP
Menurut Klasifikasi
Ketahanan
Pangan dan Pulau,
2013



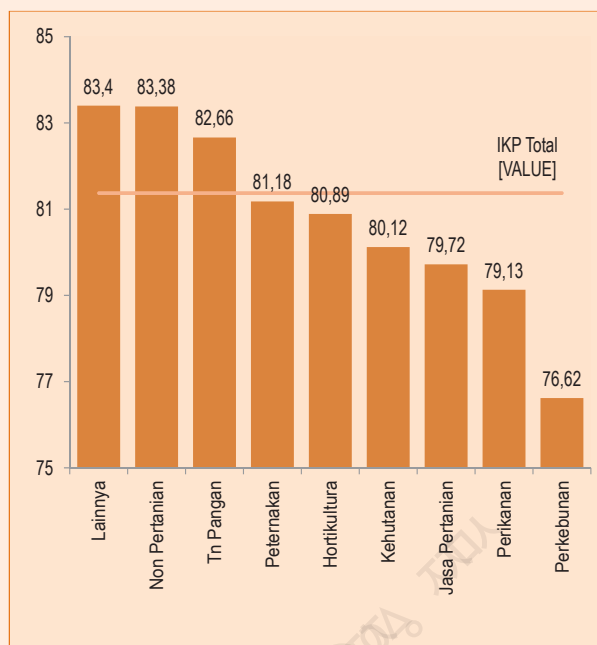
Sumber : BPS, Diolah dari ST2013-SPP

Petani Tanaman Pangan Memiliki Ketahanan Pangan Tertinggi

Sektor pertanian tidak sepenuhnya menjadi pendapatan utama bagi RTUP. Tercatat hampir 30 persen RTUP dengan pendapatan dari luar pertanian lebih besar dibandingkan dari pertanian. Dari nilai IKP terlihat bahwa ketahanan pangan pada RTUP dengan pendapatan utama dari luar pertanian sedikit lebih tinggi dibandingkan RTUP usaha pertanian (Gambar 6.12).

Jika dilihat dari subsektor pertanian, RTUP dengan pendapatan utama tanaman pangan mempunyai IKP tertinggi dibandingkan RTUP subsektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan berbanding lurus dengan penyediaan pangan. Oleh karena tanaman pangan sebagian besar diproduksi RTUP di Jawa, maka nilai IKP di pulau ini paling tinggi dibandingkan pulau lain.

Gambar 6.12
Indeks Ketahanan Pangan menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013



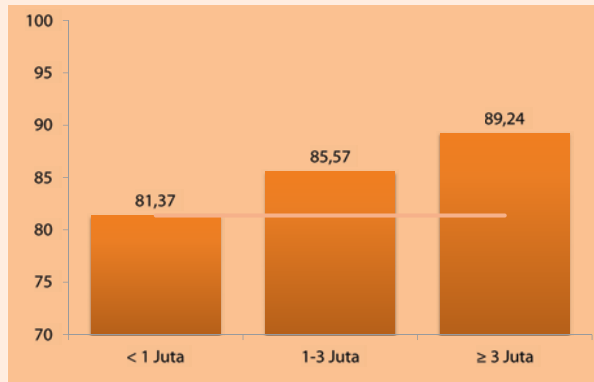
Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Gambar 6.12 menunjukkan bahwa nilai IKP subsektor perkebunan paling rendah dibandingkan subsektor lainnya. Hal ini mungkin terjadi pada RTUP dengan jumlah tanaman perkebunan yang sangat rendah dan sehingga tidak memenuhi skala produksi komersial. Sebagai catatan, dalam survei perusahaan satu pohon tanaman perkebunanpun sudah dianggap sebagai RTUP sub sektor perkebunan.

Tidak Ada Hubungan Ketahanan Pangan dan Pendapatan RTUP

Salah satu pilar ketahanan pangan adalah akses terhadap bahan pangan. Akses pangan mengacu pada kemampuan membeli pangan dan tersedianya alokasi pangan. Semakin besar pendapatan seharusnya juga memperbesar akses untuk mendapatkan bahan pangan. Dalam IKP hal ini tercermin dari harga pangan yang terjangkau. Akses terhadap bahan pangan tercermin dari nilai IKP menurut pendapatan petani.

Gambar 6.13
Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, 2013

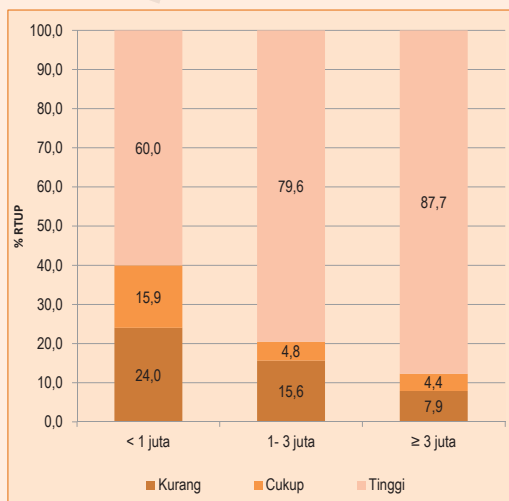


Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP

Dari 3 kategori pendapatan petani (Gambar 6.13), terlihat semakin tinggi pendapatan menunjukkan semakin tinggi pula nilai IKP. Namun perbedaan IKP tersebut tidak signifikan antar kelompok pendapatan. Artinya untuk mendapatkan bahan pangan tidak menjadi hal yang sulit bagi RTUP dengan pendapatan sebesar apapun. Kiranya prasarana fisik dan ketersediaan pasar pangan lebih menentukan ketahanan pangan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani dalam indepth study di Jawa, tergali informasi untuk mendapatkan bahan pangan seperti beras, sayur, dan lauk pauk tidaklah sulit. Bagi petani miskin, Bantuan Raskin (beras untuk penduduk miskin) sangat membantu memenuhi pangan RTUP. Sementara sayur dan lauk pauk bisa diambil dari kebun sendiri atau barter antara lauk dan sayur dengan tetangga. Data juga menunjukkan bahwa dari semua golongan pendapatan RTUP, sebagian besar tergolong berketahanan pangan tinggi (Gambar 6.14).

Gambar 6.14
Persentase RTUP Menurut Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian dan Kategori Ketahanan Pangan, 2014



Sumber: BPS, diolah dari ST2013-SPP



KESIMPULAN

“Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian akan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.”



BAB 7

KESIMPULAN

Sektor pertanian di Indonesia telah menunjukkan peran yang besar bagi perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berada pada urutan kedua sebagai penyumbang terbesar setelah sektor Industri Pengolahan. Walaupun sektor pertanian belum memberikan kesejahteraan kepada petani yang disebabkan karena pendapatan yang diciptakan pertanian masih rendah, upah yang diterima petani masih rendah dan secara riil justru cenderung turun, namun sektor ini mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang cukup besar. Dan sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak kurang dari 38 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, atau setara dari sepertiga tenaga kerja Indonesia (BPS, Sakernas 2013).

Permasalahan dari sektor pertanian adalah mengenai kualitas SDM petani yang rendah. Mereka yang bekerja di sektor pertanian adalah mereka yang “kalah bersaing” di sektor lain. Lebih dari 70 persen petani hanya bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar. Dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi petani untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas usaha, termasuk jika harus berhubungan dengan teknologi.

Selain berpendidikan rendah, usaha pertanian yang lebih banyak dilakukan oleh petani yang berusia tua. Hasil ST 2013 menginformasikan bahwa rata-rata umur petani adalah 48 tahun. Dengan kondisi fisik yang tidak sekuat pada usia muda, maka sulit bagi generasi tua untuk mengembangkan sektor pertanian, dan usia tua lebih sulit menerima pembaharuan dan inovasi terkait usaha tani.

Berbagai keterbatasan karakteristik petani tersebut berdampak kepada kinerja usaha tani, yang tercermin dari rendahnya pendapatan. Data SPP 2013 menunjukkan bahwa rata-rata seluruh pendapatan RTUP adalah sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Sementara dari usaha pertanian saja hanya sekitar satu juta rupiah per bulan. Ini menunjukkan bahwa pendapatan dari usaha pertanian sangat kecil, sehingga RTUP perlu untuk mencari tambahan penghasilan dari luar usaha pertanian.

Sementara itu, usaha pertanian yang diusahakan oleh RTUP rata-rata hanya berskala kecil. Dari sisi lahan, setiap RTUP rata-rata hanya mengusahakan 0,85 hektar. Sedangkan dari sisi pekerja, rata-rata usaha pertanian menggunakan tenagakerja tidak dibayar, yaitu mempekerjakan anggota keluarga. Berdasarkan data SPP2013, sekitar 30 persen anggota rumah tangga RTUP merupakan pekerja tidak dibayar pekerja keluarga.

Permasalahan lain sektor pertanian adalah mengenai lahan dan kepemilikannya. Meskipun secara kuantitatif luas lahan sawah yang ditanami padi meningkat, namun secara kualitatif menurun selama periode 2004-2013. Data menunjukkan luas lahan beririgasi cenderung turun, sementara lahan non-irigasi meningkat. Karena ketersediaan air menjadi faktor penting untuk produktivitas padi, maka pembangunan waduk, bendungan, dan sarana irigasi menjadi hal yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas tanaman padi.

Kepemilikan lahan oleh RTUP menjadi hal yang sangat penting, selain sebagai sarana produksi juga sebagai sarana untuk mendapatkan akses modal dari bank. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar tanah yang dimiliki oleh petani hanya berupa girik atau akta jual beli notaris/PPATK. Hanya kurang lebih seperlima RTUP yang sudah mempunyai sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan sertifikat lain seperti SHP SRSS. Bahkan lebih dari sepertiga lahan yang dimiliki RTUP tidak memiliki surat bukti kepemilikan. Akibatnya, karena petani tidak memiliki agunan untuk maksud meminjam modal dari bank, maka petani lebih memilih meminjam uang ke tengkulak atau rentenir dan terjebak dengan pemberian bunga yang jauh lebih tinggi dari bunga kredit perbankan.

Untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan, maka akses RTUP terhadap sumberdaya modal perlu dibuka secara luas. Pertama adalah akses terhadap permodalan yang merupakan unsur yang sangat esensial. Sampai saat ini, lebih dari 80 persen RTUP masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan usahanya, meskipun pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Dengan alasan agunan dan proses yang berbelit-belit, petani lebih memilih tidak menggunakan fasilitas kredit bank. Yang dikhawatirkan adalah para petani lebih cenderung memanfaatkan pinjaman dari para tengkulak, atau rentenir dengan bunga tinggi. Data menunjukkan bahwa RTUP yang menggunakan fasilitas kredit bank memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fasilitas kredit bank.

Masalah lain yang perlu diantisipasi dan diberikan solusi adalah mengenai pemanfaatan kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian ini dituangkan pada UU 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tetapi, kelembagaan petani seperti kelompok tani hanya dimanfaatkan oleh sekitar 30 persen RTUP. Disamping itu program pemerintah berupa penyuluhan-penyuluhan pertanian, hanya diikuti oleh kurang dari 20 persen RTUP. Data SPP menunjukkan bahwa dengan mengikuti kelompok tani maupun kegiatan penyuluhan pertanian berpotensi meningkatkan pendapatan usaha pertanian.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah akses terhadap sarana produksi (Saprodi) yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Penyediaan Saprodi belum menjangkau semua RTUP, sehingga akibatnya RTUP mengalami kesulitan untuk memperoleh sarana produksi dengan alasan harganya mahal. Disamping itu sebagian RTUP juga mengalami kesulitan menjual hasil pertanian, karena harganya rendah.

Ancaman kemiskinan pada RTUP tidak hanya terlihat dari mayoritas petani yang miskin, tetapi bisa diukur dari angka Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). RTUP yang pendapatan utamanya dari pertanian, lebih rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi dibanding RTUP dari sektor non-pertanian. Disamping itu, RTUP dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian mengalami kemiskinan multidimensi tiga kali lipat lebih banyak dibanding RTUP yang pendapatannya dari sektor non-pertanian.

Salah satu faktor kemiskinan multidimensi adalah skala usaha yang tercermin dari luas lahan dan pendapatan. Semakin tinggi luas lahan, semakin rendah jumlah RTUP yang miskin multidimensi. Secara otomatis, dengan pendapatan yang semakin tinggi, maka semakin rendah jumlah RTUP yang miskin multidimensi.

Jika dilihat dari sebaran wilayah, sebagian besar kemiskinan multidimensi berada di wilayah Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar provinsi di Indonesia dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Intensitas kemiskinan multidimensi hampir merata di seluruh provinsi, berkisar antara 36 persen hingga 45 persen. Intensitas tertinggi terjadi di Provinsi Papua, sementara intensitas yang terendah terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Intensitas kemiskinan relatif sama pada RTUP dari berbagai tingkat pendapatan maupun penguasaan lahan.

Untuk menjamin pemenuhan pangan bagi segenap warganya, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang salah satu isinya berkaitan dengan perwujudan Ketahanan Pangan di Indonesia secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, maka Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang menyeluruh bagi penduduk Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya hal ini tidak seindah yang dibayangkan. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan kurangnya ketahanan pangan rumah tangga usaha pertanian di beberapa wilayah, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah daerah di Kalimantan, yang tercermin dari nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang rendah. Secara umum IKP Kawasan Timur Indonesia masih tertinggal dari nilai IKP di Kawasan Barat Indonesia.

Jika nilai IKP RTUP dibandingkan antar pulau, terlihat hanya pula Jawa saja yang nilainya diatas rata-rata IKP Nasional, sementara pulau lainnya berada di bawah tingkat Nasional. Karena sebagian besar tanaman pangan dihasilkan di pulau Jawa, masalah ketahanan pangan sangat wajar banyak terjadi di luar Jawa. Masalah transportasi dan infrastruktur juga berpengaruh pada distribusi pangan sampai ke seluruh wilayah Indonesia.

Karena nilai IKP berhubungan dengan ketersediaan pangan, maka wajar jika RTUP tanaman pangan memiliki ketahanan pangan paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Namun disisi lain, tidak ada perbedaan nilai IKP yang signifikan antar jenis pendapatan rumah tangga. Artinya untuk mendapatkan bahan pangan, bukan menjadi hal yang sulit bagi RTUP dengan pendapatan sebesar apapun.

ST2013 SURVEI PERTANIAN

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Alimoeso, Sutarto. 2008. Kesejahteraan Petani Selalu Jadi Pemikirannya. Jakarta : Majalah Gemari Edisi 93/Tahun IX/Oktober 2008.
- Arga, Anggi. 2010. Masalah dan Keberhasilan dalam Usaha Tani.
- Ashari. 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol: 27, No.1.
- Balitbang Kementan. 2013. Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa.
- Biro Perencanaan-Kementerian Pertanian. 2014. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019. Disampaikan pada Workshop Aplikasi e-proposal 2015 dan e-monev 2014 Indonesia Wilayah Barat, Bandung, 5-7 Maret 2014.
- Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan. 2013. Studi Kebijakan Akselerasi
- BPS. 2009. Pekerja Anak Indonesia 2009. Jakarta: BPS.
- BPS. 2011. Potensi Desa. Jakarta : BPS.
- BPS. 2011. Profil Anak Indonesia 2011. Jakarta: BPS.
- BPS. 2012. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2012. Jakarta : BPS.
- BPS. 2012. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia. Jakarta: BPS.
- BPTP. 2009. Pengelolaan Modal Gapoktan Melalui LKM-A. Jawa Barat.
- Budiantoro, Setyo, et.al. 2013. Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia.
- Chambers, R. 1985. Rural Development : Putting The Last First. New York: Longman Group Ltd.
- Darwanto, Dwidjono H. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani [Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152 - 164].
- Dewan Ketahanan Pangan. 2009. Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015. Jakarta : Kementan.
- Direktorat Pangan dan Pertanian. 2006. Gambaran Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Pertanian: Pendekatan untuk Mengetahui Siapa Petani Indonesia. Jakarta: Kementerian Negara PPN/Bappenas.
- Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch. 2004. Model Perizinan Konsesi Hutan.

- <http://artikel.okeschool.com/artikel/pertanian-perkebunan/650/sumber-daya-alam-pertanian.html>. Diunduh tanggal 18 November 2014.
- <http://omahkendeng.org/2013-01/1105/darurat-lahan-pertanian/>. Diunduh tanggal 18 November 2014.
- <http://psp.deptan.go.id/index.php/page/publikasi/19>. Diunduh tanggal 18 November 2014.
- Irawan, Bambang. 2005. Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan [Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23 No.1, Juli 2005 : 1-18.].
- Kementerian Pertanian. 2013. Laporan Data Kinerja Kementerian Pertanian 2004-2012. Jakarta : Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2013. Perluasan Areal Sawah Baru Menjadi Salah Satu Solusi Untuk Meningkatkan Volume Produksi Beras Dalam Negeri.
- Kementrian Pertanian. 2013. Cetak Sawah Indonesia. Jakarta: Kementan.
- Nurmanaf, R. 2007. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Nuryanti, Sri., Dewa K.S.S. 2011. Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa. Jakarta : Kementerian Pertanian.
- Prihatin, Hariadi, dan Mudiyono. 2012. Ancaman Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani.
- Rasyid, Abdul. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Petani. Jakarta.
- Sesbany. Penguatan Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani.
- Sipayung, Hendra. 2014. Pengembangan Pertanian : Penguatan Kelembagaan dan Subsidi Petani.
- Soemarno. 2010. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Pedesaan.
- Sunarti, Euis. tt. Kesejahteraan Keluarga Petani, Mengapa Sulit Diwujudkan. Jurnal Kesejahteraan Keluarga Petani.
- Supriatna, Ade. 2009. Aksesibilitas Petani Kecil Pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa: Studi Kasus Petani Padi di Nusa Tenggara

Barat. Bogor : Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Susilo, E. 2013. Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 10, No. 1 Maret 2013.

United Nations Development Programme. 2013. Human Development Report 2013 : The Rise of the South. New York : UNDP.

UNIVERSITAS
PANGLOSS

**RINGKASAN
HASIL *INDEPTH STUDY*
RUMAH TANGGA USAHA
PERTANIAN**



I. TUJUAN

Dalam rangka melengkapi informasi yang dihasilkan dari Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP 2013), dilakukan *indepth study* ke delapan provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta. Pemilihan kedelapan provinsi ini berdasarkan persentase rumahtangga miskin di sektor pertanian yang cukup tinggi di provinsi-provinsi ini. Tujuan khusus dari *indepth study* ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani miskin dan akses mereka terhadap ketahanan pangan.

II. PELAKSANAAN LAPANGAN

- a. Waktu : bulan Oktober 2014
- b. Lokasi : 8 provinsi yaitu
 - Sumatera Selatan : Kabupaten Banyuasin
 - Lampung : Kabupaten Lampung Selatan
 - Jawa Tengah : Kabupaten Demak
 - DI Yogyakarta : Kabupaten Kulonprogo
 - Nusa Tenggara Barat : Kabupaten Lombok Barat
 - Nusa Tenggara Timur : Kabupaten Kupang
 - Kalimantan Barat : Kubu Raya
 - Sulawesi Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Responden/Narasumber:
 - Pengurus Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
 - Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP).
- d. Cakupan : Rumah tangga petani dan kelompok tani dari beberapa subsektor terpilih terkait dengan potensi sampel wilayah *indepth study* (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penangkapan ikan, dan kehutanan).
- e. Metode Pemilihan Responden : secara *purposive sampling* menggambarkan rumah tangga usaha miskin dan tidak miskin dari beberapa sub sektor pertanian terpilih serta beberapa kelompok tani.
- f. Metode *Indepth Study*: wawancara langsung dan mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga usaha pertanian.

III. PETUGAS INDEPTH STUDY

- a. Penulis yang meliputi Staf dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- b. Pendamping: merupakan penunjuk jalan yang mengetahui kondisi dan bahasa di wilayah setempat.

IV. HASIL INDEPTH STUDY

KELOMPOK TANI (POKTAN)

A. Program Kelompok Tani:

Setiap kelompok tani mempunyai program yang spesifik terkait dengan bidang/kegiatan di kelompok tani. Fungsi lain dari kelompok tani adalah sebagai sarana untuk mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Dari hasil indepth study diperoleh beberapa informasi terkait program dalam kelompok tani:

- a. Beberapa kelompok tani tidak memiliki program yang spesifik dan terjadwal. Umumnya mereka melakukan kegiatan berdasarkan kebutuhan dari anggotanya.
- b. Sebagian besar kelompok tani mempunyai program yang umum seperti: penyuluhan pertanian baik oleh Petugas Penyuluh Pertanian Pemerintah maupun Swakarsa sebagai tempat untuk saling bertukar informasi dan silaturahmi.
- c. Sebagian kelompok tani mempunyai program khusus antara lain:
 - Di Kabupaten Gowa: pinjaman dana bergulir dan inovasi teknologi, diantaranya adalah teknologi irigasi yaitu pemanfaatan pipa bekas untuk mengalirkan air ke sawah-sawah mereka yang sementara belum memperoleh irigasi teknis. Petani yang menjadi anggota poktan memperoleh banyak manfaat.
 - Di Kabupaten Kulonprogo: mengelola hutan negara, dan setelah menghasilkan ditebang sebagian, hasilnya sebagian untuk anggota dan sebagian untuk negara. Fungsinya selain untuk meningkatkan pendapatan petani juga untuk menjaga hutan negara dari penebangan liar. Prioritas anggota kelompok tani adalah petani yang luas lahannya kurang dari 0,25 hektar. Program lain adalah arisan kredit yang merupakan pinjaman bergulir bagi anggota.
 - Untuk usaha penangkapan ikan: kelompok nelayan tidak aktif.

B. Bantuan-bantuan yang Diterima Kelompok Tani

Pada dasarnya bantuan yang diterima kelompok tani adalah sarana produksi antara lain: penyaluran pupuk subsidi, penyaluran bantuan benih, ternak, penyaluran saprodi, irigasi, alat-alat pertanian seperti traktor tangan, dan lain-lain. Semua kelompok tani mendapatkan bantuan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian.

Terkait dengan bantuan pupuk, penyaluran pupuk bersubsidi hanya lewat kelompok tani. Kelangkaan pupuk yang terjadi pada sebagian wilayah menyebabkan penyaluran pupuk menjadi kendala (terjadi di kabupaten Kupang). Apalagi bagi petani diluar kelompok tani, maka kelangkaan pupuk akan menghambat produksi pertanian.

Terkait dengan petugas penyuluh lapangan (PPL), sebagian kelompok tani merasa keberadaan PPL tidak ada. PPL belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Kegiatan penyuluhan jarang sekali dilakukan, biasanya hanya pada waktu ada sosialisasi program.

C. Pengelolaan Usaha Tani

- Pengelolaan usaha masing-masing petani dengan memanfaatkan fasilitas bantuan dari kelompok pertanian, antara lain traktor tangan yang dipinjamkan secara bergilir atau menyewa ke kelompok tani; penggunaan irigasi secara bersama-sama atau menggunakan mesin pompa untuk mengalirkan air sawah.
- Pengelolaan usaha bersama: usaha budidaya tanaman kehutanan dengan memanfaatkan hutan negara, hasilnya 40 persen bagi negara dan 60 persen bagi petani pengelola.
- Untuk kegiatan pemanenan, di beberapa wilayah menerapkan azas gotong royong, dimana setiap anggota kelompok tani membantu anggota lainnya, sehingga biaya untuk ongkos panen lebih murah karena hanya menyediakan makanan saja.

D. Manfaat Kelompok Tani

Dengan beberapa fasilitas yang diberikan bagi kelompok tani, menjadi anggota kelompok tani sangat bermanfaat untuk pengelolaan usaha pertanian bagi anggota kelompok tani sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Keuntungan tersebut antara lain:

- Mendapatkan bantuan-bantuan untuk pengelolaan usaha pertanian.
- Memperoleh ilmu dan informasi untuk mengelola usaha pertanian.
- Mendapatkan bantuan pinjaman dana bergilir.

Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, sejumlah petani yang tidak menjadi anggota tani beralasan:

- Menjadi anggota kelompok tani tidak berguna.
- Menjadi anggota kelompok tani harus membayar iuran yang sebenarnya berguna untuk simpan pinjam. Bagi sebagian petani dan nelayan, iuran ini dinilai memberatkan.

Beberapa anggota kelompok tani mengaku bahwa menjadi kelompok tani tidak secara langsung meningkatkan pendapatan petani, namun hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian. Namun sebagian lainnya merasa cukup bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan petani. Hal ini terlihat dari kondisi perekonomian petani yang menjadi anggota kelompok tani lebih baik dibandingkan yang bukan anggota kelompok tani pada sebagian wilayah *indepth study*.

2. RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (RTUP)

A. Karakteristik RTUP

- Responden RTUP pada *indepth study* ini digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu petani kaya berpendapatan tinggi dan rendah. Petani berpendapatan tinggi biasanya mempunyai lahan yang luas, sebaliknya petani berpendapatan rendah mempunyai lahan yang sempit.
- Rata-rata lahan yang dimiliki petani adalah milik sendiri dan berasal dari warisan, namun sebagian sebagai petani penggarap atau bagi hasil.
- RTUP berasal dari berbagai subsektor: tanaman pangan, perkebunan, penangkapan ikan, dan kehutanan.
- Rata-rata usia petani cukup bervariasi antara 25 hingga 70 tahun.
- Pendidikan petani cukup beragam. Sebagian besar petani berlahan sempit adalah mereka yang berpendidikan rendah bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Sementara petani kaya, beberapa diantaranya tamat SMP bahkan ada yang lulus SMA.

B. Pengelolaan Usaha Pertanian

- Sebagian besar responden RTUP tidak mengusahakan satu jenis usaha pertanian. Misalnya tanaman pangan, juga mengusahakan tanaman sayur-sayuran di kebun maupun beternak ayam, kambing, atau sapi.
- Sebagian besar RTUP yang tergolong miskin menjadi buruh tani atau menjadi buruh di sektor lain seperti buruh bangunan.
- Kondisi petani penggarap atau bagi hasil lebih miskin jika dibandingkan petani yang mempunyai lahan sendiri.
- Dari sisi permodalan, rata-rata mengandalkan modal sendiri, yang berasal dari hasil panen sebelumnya. Jika dirasa masih kurang, mereka

akan meminjam ke saudara (tanpa bunga) atau ke poktan/gapoktan di mana mereka menjadi anggotanya. Tidak ada RTUP meminjam ke para tengkulak/rentenir, kecuali RTUP penangkapan ikan, karena hasil tangkapannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Peralatan yang digunakan berperan penting dalam usaha pertanian, terutama untuk mereka yang mengusahakan lahan yang luas tanpa pekerja bayaran. Hampir seluruh petani dalam studi ini menggunakan traktor tangan, baik yang dibeli dengan modal sendiri maupun disewa/dipinjam dari poktan/gapoktan.
- Khusus untuk usaha penangkapan ikan: jika tidak punya perahu harus membagi hasil dengan pemilik perahu.
- Pemanfaatan irigasi belum sepenuhnya optimal: sebagian memanfaatkan pompa air dan sebagian dengan tadah hujan karena letak sawahnya jauh dari sumber mata air. Sebagian lagi sudah menggunakan irigasi.
- Sistem pemanenan tidak menjadi masalah karena sistem gotong royong berlaku pada proses pemanenan atau dipanen sendiri.
- Sistem pemasaran: sebagian besar pemasaran dilakukan kepada pedagang pengumpul. Namun demikian ada juga yang hanya dikonsumsi sendiri (petani berlahan sempit).

C. Kesejahteraan Petani

Secara umum kondisi ekonomi petani dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Petani miskin:

- Luas lahan pertanian relatif kecil, petani penggarap atau bagi hasil.
- Kondisi bangunan tempat tinggal yang tidak terlalu memadai dan tidak terawat.
- Kebutuhan pokok dibantu pemerintah: bantuan raskin, sekolah gratis, dan berobat gratis.
- Konsumsi makanan sederhana untuk mencukupi kebutuhan hidup: nasi, sayur dan lauk tempe, telur sekali-kali.
- Nelayan lebih miskin dibandingkan petani.
- Pendapatan untuk kebutuhan hidup non makanan sehari-hari: diperoleh dari pendapatan tambahan yaitu menjadi buruh tani, buruh bangunan, tukang ojek, dan lain-lain.
- Belum ada kasus gizi buruk bagi anak-anak di wilayah indepth study.

2. Petani tidak miskin:

- Luas lahan pertanian relatif kecil, petani penggarap atau bagi hasil
- Kondisi bangunan lebih memadai
- Konsumsi makanan lebih baik dibandingkan petani miskin: ada telur atau ayam (mengambil dari kebun sendiri).

D. Ketahanan Pangan

Secara umum ketahanan pangan dibagi menjadi 2:

Ketersediaan pangan, pada dasarnya tidak masalah bagi sebagian besar petani baik miskin maupun tidak miskin. Bagi petani miskin, penjelasannya sebagai berikut:

- Bantuan raskin sangat membantu bagi ketersediaan pangan
- Sayu mayur mengambil dari kebun sendiri.
- Lauk pauk bisa membeli di warung terdekat, jika tidak punya uang bisa system barter dengan sayur mayur atau hasil tani lainnya (di Kulonprogo).
- Bagi petani, kecukupan pangan dilihat dari kemampuan makan nasi + sayur, sementara lauk pauk hanya tambahan.
- Lauk pauk seperti telur dan daging hanya dimakan sekali-kali saja, bahkan seminggu sekali masih belum tentu.
- Bagi yang memelihara ayam, bisa mengambil dari ayam peliharaan sendiri: telur dan daging.

Keterjangkauan pangan:

- Untuk membeli kebutuhan sehari-hari dapat membeli di warung atau pasar terdekat.
- Masalah akses tidak menjadi kendala.
- Harga bahan pangan yang dibutuhkan mereka pun masih sangat terjangkau, karena konsumsi RTUP miskin sangat sederhana.

ST2013 SURVEI PERTANIAN

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

JUMLAH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (RTUP) MENURUT PROVINSI

PROVINSI	JUMLAH RTUP	
	ST2003	ST2013
(1)	(2)	(3)
ACEH	699,370	644,851
SUMATERA UTARA	1,492,104	1,327,759
SUMATERA BARAT	709,351	644,610
RIAU	541,050	581,517
JAMBI	414,986	431,589
SUMATERA SELATAN	971,458	958,724
BENGKULU	280,964	277,136
LAMPUNG	1,293,192	1,226,455
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	139,315	124,970
KEPULAUAN RIAU	74,195	69,991
DKI JAKARTA	52,583	12,287
JAWA BARAT	4,345,148	3,058,612
JAWA TENGAH	5,770,801	4,290,619
DI YOGYAKARTA	574,920	495,781
JAWA TIMUR	6,314,370	4,978,358
BANTEN	898,021	592,841
BALI	492,394	408,233
NUSA TENGGARA BARAT	719,875	600,613
NUSA TENGGARA TIMUR	729,483	778,854
KALIMANTAN BARAT	614,738	627,638
KALIMANTAN TENGAH	302,414	270,914
KALIMANTAN SELATAN	471,972	432,328
KALIMANTAN TIMUR	203,179	180,614
KALIMANTAN UTARA	38,948	44,735
SULAWESI UTARA	324,374	253,503
SULAWESI TENGAH	396,622	401,891
SULAWESI SELATAN	1,082,251	980,946
SULAWESI TENGGARA	314,011	316,262
GORONTALO	133,083	122,515
SULAWESI BARAT	167,098	185,847
MALUKU	184,376	175,362
MALUKU UTARA	129,246	130,233
PAPUA BARAT	75,790	70,223
PAPUA	280,502	438,658
INDONESIA	31,232,184	26,135,469

LAMPIRAN 2

PERSENTASE RTUP PENGGUNA LAHAN YANG MENGUASAI LAHAN PERTANIAN KURANG DARI 0,5 HEKTAR MENURUT PROVINSI

PROVINSI	PERSENTASE RTUP
(1)	(2)
ACEH	45,89
SUMATERA UTARA	41,12
SUMATERA BARAT	42,37
RIAU	10,81
JAMBI	14,52
SUMATERA SELATAN	10,15
BENGKULU	12,40
LAMPUNG	28,94
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13,87
KEPULAUAN RIAU	36,52
DKI JAKARTA	87,08
JAWA BARAT	75,72
JAWA TENGAH	78,45
DI YOGYAKARTA	85,65
JAWA TIMUR	75,60
BANTEN	60,42
BALI	63,20
NUSA TENGGARA BARAT	54,18
NUSA TENGGARA TIMUR	36,33
KALIMANTAN BARAT	12,74
KALIMANTAN TENGAH	10,36
KALIMANTAN SELATAN	32,10
KALIMANTAN TIMUR	14,78
KALIMANTAN UTARA	11,47
SULAWESI UTARA	25,11
SULAWESI TENGAH	12,73
SULAWESI SELATAN	32,76
SULAWESI TENGGARA	17,83
GORONTALO	22,50
SULAWESI BARAT	27,94
MALUKU	37,79
MALUKU UTARA	12,22
PAPUA BARAT	49,62
PAPUA	78,79
INDONESIA	54,11

LAMPIRAN 3
PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (RTUP) MENURUT PROVINSI DAN
JENIS KELAMIN

PROVINSI	PERSENTASE KEPALA RTUP	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
(1)	(2)	(3)
ACEH	81,32	18,68
SUMATERA UTARA	84,63	15,37
SUMATERA BARAT	85,34	14,66
RIAU	90,73	9,27
JAMBI	90,59	9,41
SUMATERA SELATAN	92,02	7,98
BENGKULU	91,85	8,15
LAMPUNG	92,90	7,10
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	91,41	8,59
KEPULAUAN RIAU	90,78	9,22
DKI JAKARTA	96,59	3,41
JAWA BARAT	90,84	9,16
JAWA TENGAH	89,33	10,67
DIYOGYAKARTA	87,30	12,70
JAWA TIMUR	87,66	12,34
BANTEN	89,58	10,42
BALI	94,05	5,95
NUSA TENGGARA BARAT	84,63	15,37
NUSA TENGGARA TIMUR	84,36	15,64
KALIMANTAN BARAT	90,55	9,45
KALIMANTAN TENGAH	91,11	8,89
KALIMANTAN SELATAN	86,73	13,27
KALIMANTAN TIMUR	93,50	6,50
KALIMANTAN UTARA	93,11	6,89
SULAWESI UTARA	92,72	7,28
SULAWESI TENGAH	92,42	7,58
SULAWESI SELATAN	87,62	12,38
SULAWESI TENGGARA	87,29	12,71
GORONTALO	93,87	6,13
SULAWESI BARAT	87,75	12,25
MALUKU	89,51	10,49
MALUKU UTARA	91,10	8,90
PAPUA BARAT	92,01	7,99
PAPUA	92,47	7,53
INDONESIA	88,91	11,09

LAMPIRAN 4

RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	RATA-RATA ART
(1)	(2)
ACEH	4,29
SUMATERA UTARA	4,15
SUMATERA BARAT	4,24
RIAU	4,17
JAMBI	3,87
SUMATERA SELATAN	3,94
BENGKULU	3,94
LAMPUNG	3,79
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,93
KEPULAUAN RIAU	3,86
DKI JAKARTA	4,50
JAWA BARAT	3,54
JAWA TENGAH	3,62
DI YOGYAKARTA	3,57
JAWA TIMUR	3,58
BANTEN	4,33
BALI	4,02
NUSA TENGGARA BARAT	3,69
NUSA TENGGARA TIMUR	4,57
KALIMANTAN BARAT	4,09
KALIMANTAN TENGAH	3,87
KALIMANTAN SELATAN	3,65
KALIMANTAN TIMUR	3,92
KALIMANTAN UTARA	4,46
SULAWESI UTARA	3,86
SULAWESI TENGAH	4,23
SULAWESI SELATAN	4,29
SULAWESI TENGGARA	4,41
GORONTALO	4,32
SULAWESI BARAT	4,44
MALUKU	4,89
MALUKU UTARA	4,80
PAPUA BARAT	4,55
PAPUA	3,93
INDONESIA	3,85

LAMPIRAN 5
RASIO KETERGANTUNGAN MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	RASIO KETERGANTUNGAN
(1)	(2)
ACEH	52,04
SUMATERA UTARA	60,92
SUMATERA BARAT	58,28
RIAU	53,70
JAMBI	47,62
SUMATERA SELATAN	48,98
BENGKULU	51,58
LAMPUNG	48,45
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	48,50
KEPULAUAN RIAU	49,40
DKI JAKARTA	38,14
JAWA BARAT	47,82
JAWA TENGAH	48,41
DI YOGYAKARTA	49,97
JAWA TIMUR	43,57
BANTEN	49,15
BALI	51,27
NUSA TENGGARA BARAT	54,65
NUSA TENGGARA TIMUR	78,74
KALIMANTAN BARAT	51,82
KALIMANTAN TENGAH	50,58
KALIMANTAN SELATAN	45,32
KALIMANTAN TIMUR	47,57
KALIMANTAN UTARA	56,53
SULAWESI UTARA	48,41
SULAWESI TENGAH	58,36
SULAWESI SELATAN	56,46
SULAWESI TENGGARA	62,50
GORONTALO	52,87
SULAWESI BARAT	68,47
MALUKU	74,41
MALUKU UTARA	64,97
PAPUA BARAT	67,12
PAPUA	56,87
INDONESIA	51,14

LAMPIRAN 6
 PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN USIA 7-15
 TAHUN MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH, 2013

PROVINSI	UMUR PETANI	
	Masih sekolah	Belum/Tidak Bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)
ACEH	94,62	5,38
SUMATERA UTARA	94,26	5,74
SUMATERA BARAT	94,68	5,32
R I A U	93,44	6,56
J A M B I	93,01	6,99
SUMATERA SELATAN	91,74	8,26
BENGGKULU	94,48	5,52
LAMPUNG	93,65	6,35
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	90,20	9,80
KEPULAUAN RIAU	93,69	6,31
DKI JAKARTA	92,96	7,04
JAWA BARAT	91,10	8,90
JAWA TENGAH	93,81	6,19
DI YOGYAKARTA	95,93	4,07
JAWA TIMUR	93,13	6,87
BANTEN	89,54	10,46
B A L I	94,42	5,58
NUSA TENGGARA BARAT	93,76	6,24
NUSA TENGGARA TIMUR	92,53	7,47
KALIMANTAN BARAT	90,18	9,82
KALIMANTAN TENGAH	92,06	7,94
KALIMANTAN SELATAN	91,75	8,25
KALIMANTAN TIMUR	93,97	6,03
KALIMANTAN UTARA	93,03	6,97
SULAWESI UTARA	92,92	7,08
SULAWESI TENGAH	90,95	9,05
SULAWESI SELATAN	91,16	8,84
SULAWESI TENGGARA	93,68	6,32
GORONTALO	87,27	12,73
SULAWESI BARAT	91,39	8,61
MALUKU	94,67	5,33
MALUKU UTARA	96,02	3,98
PAPUA BARAT	91,66	8,34
PAPUA	68,97	31,03
INDONESIA	92,26	7,74

LAMPIRAN 7
PERSENTASE ART MENURUT PROVINSI DAN PENDIDIKAN, 2013

PROVINSI	PENDIDIKAN ART		
	TIDAK SEKOLAH/SD	SMP/SMA	DI ATAS SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	60,60	35,11	4,29
SUMATERA UTARA	62,91	34,24	2,85
SUMATERA BARAT	66,69	29,85	3,47
RIAU	68,26	29,01	2,73
JAMBI	67,88	29,31	2,81
SUMATERA SELATAN	71,26	26,87	1,87
BENGKULU	67,55	29,78	2,67
LAMPUNG	68,52	29,76	1,72
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	77,74	20,65	1,60
KEPULAUAN RIAU	77,13	21,12	1,75
DKI JAKARTA	59,54	37,60	2,86
JAWA BARAT	78,92	19,68	1,40
JAWA TENGAH	73,48	24,58	1,94
DI YOGYAKARTA	58,22	37,66	4,12
JAWA TIMUR	73,68	24,26	2,06
BANTEN	77,95	20,94	1,11
BALI	69,49	27,04	3,47
NUSA TENGGARA BARAT	72,90	23,90	3,20
NUSA TENGGARA TIMUR	81,74	16,33	1,93
KALIMANTAN BARAT	77,05	21,30	1,65
KALIMANTAN TENGAH	71,82	25,83	2,35
KALIMANTAN SELATAN	74,58	23,59	1,83
KALIMANTAN TIMUR	69,13	28,78	2,09
KALIMANTAN UTARA	74,07	23,29	2,64
SULAWESI UTARA	61,54	34,90	3,56
SULAWESI TENGAH	71,87	25,44	2,69
SULAWESI SELATAN	72,92	23,99	3,09
SULAWESI TENGGARA	68,33	28,20	3,47
GORONTALO	81,06	17,18	1,76
SULAWESI BARAT	76,29	21,06	2,65
MALUKU	68,12	28,92	2,96
MALUKU UTARA	70,79	26,85	2,36
PAPUA BARAT	71,82	24,69	3,50
PAPUA	81,93	16,87	1,20
INDONESIA	72,44	25,30	2,26

LAMPIRAN 8
PERSENTASE ART MENURUT PROVINSI DAN KEGIATAN UTAMA, 2013

PROVINSI	KEGIATAN UTAMA			
	BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN	PEKERJA KELUARGA/ PEKERJA TIDAK DIBAYAR	BURUH/PEGAWAI/ KARYAWAN/ PEKERJA BEBAS DI SEKTOR PERTANIAN	BURUH/PEGAWAI/ KARYAWAN/ PEKERJA BEBAS DI LUAR SEKTOR PERTANIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	31,9	32,8	13,4	13,2
SUMATERA UTARA	33,5	32,7	10,0	9,6
SUMATERA BARAT	33,5	26,8	13,4	11,5
RIAU	33,8	24,3	10,0	10,0
JAMBI	35,2	26,8	11,4	8,0
SUMATERA SELATAN	36,8	35,0	12,6	7,6
BENGKULU	33,5	30,4	17,5	10,5
LAMPUNG	35,9	33,4	17,3	11,1
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	31,4	24,4	7,4	12,9
KEPULAUAN RIAU	33,2	13,9	2,7	14,3
DKI JAKARTA	26,8	9,7	1,4	30,1
JAWA BARAT	34,5	27,7	15,3	14,3
JAWA TENGAH	34,2	30,5	15,0	18,6
DI YOGYAKARTA	32,9	30,3	8,6	25,2
JAWA TIMUR	35,6	34,6	18,2	13,8
BANTEN	29,8	23,8	12,5	15,8
BALI	33,2	34,4	8,0	23,7
NUSA TENGGARA BARAT	33,0	38,7	23,2	11,9
NUSA TENGGARA TIMUR	28,9	44,3	5,8	7,4
KALIMANTAN BARAT	37,9	35,0	8,1	8,9
KALIMANTAN TENGAH	39,7	31,4	10,2	11,9
KALIMANTAN SELATA	35,8	32,7	14,3	12,5
KALIMANTAN TIMUR	36,4	25,0	7,0	12,6
KALIMANTAN UTARA	37,2	27,3	8,1	10,9
SULAWESI UTARA	33,4	24,5	10,5	14,5
SULAWESI TENGAH	30,8	34,2	13,8	11,8
SULAWESI SELATAN	31,8	33,4	8,5	9,3
SULAWESI TENGGARA	27,4	35,4	6,0	12,7
GORONTALO	30,6	27,3	20,2	16,4
SULAWESI BARAT	31,4	35,8	11,7	10,5
MALUKU	27,0	30,1	2,4	7,9
MALUKU UTARA	37,0	39,5	7,1	9,4
PAPUA BARAT	35,3	31,3	3,0	11,7
PAPUA	47,6	48,9	2,7	3,8
INDONESIA	34,2	32,2	13,4	13,2

LAMPIRAN 9

JUMLAH PETANI MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN, 2013

PROVINSI	JUMLAH PETANI	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
(1)	(2)	(3)
ACEH	575.925	236.885
SUMATERA UTARA	1.154.510	536.257
SUMATERA BARAT	576.015	273.888
RIAU	577.942	163.980
JAMBI	426.643	121.114
SUMATERA SELATAN	970.293	284.886
BENGKULU	274.952	63.861
LAMPUNG	1.236.826	297.714
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	124.729	22.057
KEPULAUAN RIAU	71.441	15.365
DKI JAKARTA	12.275	916
JAWA BARAT	2.813.294	698.775
JAWA TENGAH	3.863.871	1.088.088
DI YOGYAKARTA	424.000	131.640
JAWA TIMUR	4.577.770	1.282.044
BANTEN	551.950	158.080
BALI	392.790	133.628
NUSA TENGGARA BARAT	514.543	128.988
NUSA TENGGARA TIMUR	696.744	216.786
KALIMANTAN BARAT	618.799	285.272
KALIMANTAN TENGAH	269.606	106.687
KALIMANTAN SELATAN	396.019	130.992
KALIMANTAN TIMUR	187.089	54.857
KALIMANTAN UTARA	49.458	17.887
SULAWESI UTARA	257.086	51.607
SULAWESI TENGAH	410.409	60.983
SULAWESI SELATAN	961.951	244.577
SULAWESI TENGGARA	290.661	61.137
GORONTALO	126.705	19.916
SULAWESI BARAT	177.711	46.328
MALUKU	172.030	40.858
MALUKU UTARA	137.986	56.705
PAPUA BARAT	70.777	25.315
PAPUA	455.361	234.823
INDONESIA	24.418.161	7.292.896

LAMPIRAN 10
 PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA MENURUT PENDIDIKAN DAN
 PROVINSI, 2013

PROVINSI	PENDIDIKAN PETANI				
	TIDAK/BELUM TAMAT SD	SD	SLTP	SLTA	PERGURUAN TINGGI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	21,35	36,71	19,65	18,21	4,08
SUMATERA UTARA	20,21	33,90	20,80	21,83	3,26
SUMATERA BARAT	29,49	33,37	17,80	16,33	3,01
R I A U	22,30	41,64	18,31	15,17	2,57
J A M B I	25,62	38,38	18,22	14,85	2,92
SUMATERA SELATAN	24,74	43,32	18,00	12,19	1,75
BENGKULU	25,82	35,49	18,43	16,93	3,33
LAMPUNG	23,45	42,95	19,68	11,88	2,04
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	34,82	43,40	10,56	9,49	1,73
KEPULAUAN RIAU	37,94	39,98	11,15	9,15	1,79
DKI JAKARTA	41,53	27,34	10,32	18,31	2,51
JAWA BARAT	24,67	58,98	9,56	4,97	1,82
JAWA TENGAH	33,81	44,61	11,67	8,01	1,90
DI YOGYAKARTA	27,83	32,31	16,73	18,89	4,23
JAWA TIMUR	36,52	41,97	11,54	7,97	2,00
BANTEN	40,48	44,17	9,41	4,50	1,44
B A L I	36,15	34,11	11,89	14,84	3,00
NUSA TENGGARA BARAT	43,94	27,67	11,98	12,14	4,27
NUSA TENGGARA TIMUR	37,77	39,52	10,11	9,94	2,65
KALIMANTAN BARAT	36,01	38,85	14,59	8,61	1,94
KALIMANTAN TENGAH	22,25	43,80	17,39	13,61	2,96
KALIMANTAN SELATAN	32,08	41,15	14,73	9,89	2,15
KALIMANTAN TIMUR	27,47	39,93	16,92	13,35	2,34
KALIMANTAN UTARA	32,70	39,29	13,68	11,28	3,05
SULAWESI UTARA	21,16	37,25	20,41	17,58	3,61
SULAWESI TENGAH	23,87	41,95	16,60	14,20	3,38
SULAWESI SELATAN	37,22	33,24	13,50	12,82	3,22
SULAWESI TENGGARA	29,34	33,73	15,68	17,13	4,11
GORONTALO	49,42	35,03	7,52	6,66	1,37
SULAWESI BARAT	37,81	34,20	12,54	11,81	3,64
MALUKU	18,53	40,76	18,09	18,97	3,66
MALUKU UTARA	23,81	40,14	17,78	16,08	2,19
PAPUA BARAT	28,86	33,52	14,99	17,15	5,48
PAPUA	54,44	20,05	12,53	11,20	1,77
INDONESIA	31,23	41,64	13,86	10,87	2,40

LAMPIRAN 11

PERSENTASE JUMLAH PETANI MENURUT UMUR DAN PROVINSI, 2013

PROVINSI	UMUR PETANI						55 tahun keatas
	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
ACEH	0,05	1,75	3,52	17,15	27,58	24,34	25,60
SUMATERA UTARA	0,01	1,80	3,11	16,67	25,56	24,91	27,93
SUMATERA BARAT	0,13	0,93	2,15	14,72	24,81	26,02	31,24
R I A U	0,00	1,58	3,69	18,90	29,63	24,38	21,81
J A M B I	0,00	1,26	3,83	19,93	29,52	22,54	22,92
SUMATERA SELATAN	0,03	2,33	4,20	21,01	27,85	22,10	22,49
BENGGULU	0,02	1,18	3,25	20,96	29,45	23,83	21,31
LAMPUNG	0,00	1,51	3,48	18,04	27,43	23,28	26,26
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	1,00	4,05	21,81	28,09	23,22	21,85
KEPULAUAN RIAU	0,01	1,76	3,58	18,63	27,16	23,07	25,79
DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,72	8,76	21,41	28,83	40,28
JAWA BARAT	0,08	0,50	1,46	10,81	23,95	26,66	36,53
JAWA TENGAH	0,00	0,31	1,28	9,42	22,44	27,98	38,57
DI YOGYAKARTA	0,00	0,14	0,61	6,88	19,94	26,83	45,59
JAWA TIMUR	0,02	0,49	1,56	10,40	23,11	27,39	37,03
BANTEN	0,00	0,76	2,10	13,03	27,26	28,71	28,13
B A L I	0,01	0,52	1,48	11,19	26,33	25,64	34,83
NUSA TENGGARA BARAT	0,04	0,42	2,69	17,84	27,70	23,82	27,50
NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	1,09	2,44	16,58	25,46	24,25	30,18
KALIMANTAN BARAT	0,81	2,35	5,13	20,34	27,98	21,94	21,45
KALIMANTAN TENGAH	0,00	2,10	4,60	19,48	28,81	23,97	21,03
KALIMANTAN SELATAN	0,01	1,35	3,47	17,45	28,72	26,00	23,00
KALIMANTAN TIMUR	0,21	1,26	3,62	16,79	27,84	25,19	25,10
KALIMANTAN UTARA	1,02	3,90	5,74	19,53	27,87	21,95	19,99
SULAWESI UTARA	0,01	0,48	2,37	11,94	26,77	26,06	32,37
SULAWESI TENGAH	0,20	1,08	3,57	19,46	28,89	23,08	23,73
SULAWESI SELATAN	0,04	1,97	3,55	15,75	27,70	23,01	27,97
SULAWESI TENGGARA	0,11	0,51	2,24	19,18	28,14	22,83	26,98
GORONTALO	0,00	1,16	3,09	19,04	29,74	22,56	24,41
SULAWESI BARAT	0,00	1,23	3,77	19,81	29,59	21,34	24,27
MALUKU	0,16	1,00	2,72	17,75	25,96	24,23	28,18
MALUKU UTARA	0,75	2,25	5,13	20,06	29,86	21,99	19,96
PAPUA BARAT	1,97	3,23	6,04	24,19	25,01	20,70	18,86
PAPUA	0,66	5,90	6,51	27,56	32,18	18,56	8,63
INDONESIA	0,08	1,08	2,51	14,25	25,44	25,48	31,16

LAMPIRAN 12

JUMLAH RTUP MENURUT PROVINSI DAN SUMBER PENDAPATAN ART, 2013

PROVINSI	SUMBER PENDAPATAN ART				
	USAHA PERTANIAN SAJA	USAHA PERTANIAN DAN BURUH PERTANIAN	USAHA DI LUAR PERTANIAN	BURUH DI LUAR PERTANIAN	USAHA DI LUAR PERTANIAN DAN BURUH DI LUAR PERTANIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	100.616	60.972	129.718	457.532	95.694
SUMATERA UTARA	307.538	125.204	259.046	817.863	172.074
SUMATERA BARAT	94.774	65.415	198.675	427.309	136.479
RIAU	110.522	49.963	124.283	398.158	90.526
JAMBI	97.229	41.031	84.507	269.783	54.817
SUMATERA SELATAN	224.686	91.847	161.240	600.204	109.726
BENGKULU	43.895	31.974	58.586	185.879	40.338
LAMPUNG	205.474	151.405	260.793	796.250	178.769
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16.054	7.588	44.982	89.120	30.632
KEPULAUAN RIAU	15.483	1.399	17.970	49.253	12.059
DKI JAKARTA	997	54	4.875	10.160	3.694
JAWA BARAT	538.300	356.572	876.947	1.858.124	539.235
JAWA TENGAH	610.120	421.808	1.385.478	2.792.091	907.005
DI YOGYAKARTA	71.965	23.662	187.289	342.274	126.095
JAWA TIMUR	851.434	741.513	1.253.795	2.915.631	758.480
BANTEN	76.549	47.550	153.975	437.783	113.921
BALI	52.466	19.274	138.999	300.147	97.898
NUSA TENGGARA BARAT	80.587	66.778	183.419	394.940	120.826
NUSA TENGGARA TIMUR	169.219	22.836	196.793	546.803	147.353
KALIMANTAN BARAT	163.476	43.315	91.477	394.089	61.076
KALIMANTAN TENGAH	56.599	23.046	60.369	174.844	41.383
KALIMANTAN SELATAN	77.917	40.425	126.199	271.535	79.140
KALIMANTAN TIMUR	41.766	13.393	32.019	118.789	21.568
KALIMANTAN UTARA	8.375	3.226	7.478	31.907	5.394
SULAWESI UTARA	45.415	21.022	70.360	166.809	48.051
SULAWESI TENGAH	61.572	32.732	108.563	281.296	77.940
SULAWESI SELATAN	226.108	61.702	245.534	617.471	163.975
SULAWESI TENGGARA	48.764	11.479	101.821	232.781	75.026
GORONTALO	10.308	10.807	43.082	90.886	30.873
SULAWESI BARAT	29.812	11.294	57.106	130.002	39.861
MALUKU	28.117	2.290	75.593	125.871	53.675
MALUKU UTARA	21.665	6.299	27.189	96.494	19.727
PAPUA BARAT	14.567	1.695	14.377	51.302	10.338
PAPUA	177.837	7.712	22.381	260.226	17.108
INDONESIA	4.680.206	2.617.282	6.804.918	16.733.606	4.480.756

LAMPIRAN 13

RATA-RATA PENDAPATAN RTUP MENURUT PROVINSI DAN SUMBER PENDAPATAN UTAMA

PROVINSI	SUMBER PENDAPATAN UTAMA	
	PERTANIAN	BUKAN PERTANIAN
	(1)	(2)
ACEH	15.580,68	8.086,15
SUMATERA UTARA	21.009,37	7.602,69
SUMATERA BARAT	17.807,81	12.730,35
RIAU	32.703,24	8.346,43
JAMBI	29.542,19	6.570,71
SUMATERA SELATAN	28.648,96	3.292,95
BENGKULU	22.775,01	8.033,35
LAMPUNG	20.075,62	6.051,61
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24.989,08	19.738,62
KEPULAUAN RIAU	23.494,32	12.352,11
DKI JAKARTA	27.745,96	30.353,31
JAWA BARAT	14.229,18	10.533,34
JAWA TENGAH	10.673,65	11.335,00
DI YOGYAKARTA	8.644,77	17.318,60
JAWA TIMUR	15.140,67	8.979,03
BANTEN	14.281,23	12.060,33
BALI	14.923,57	20.689,05
NUSA TENGGARA BARAT	14.915,98	7.432,16
NUSA TENGGARA TIMUR	13.193,29	6.017,31
KALIMANTAN BARAT	24.333,31	6.579,71
KALIMANTAN TENGAH	25.477,70	13.428,30
KALIMANTAN SELATAN	18.235,55	10.875,93
KALIMANTAN TIMUR	32.861,92	13.173,09
KALIMANTAN UTARA	30.738,11	12.010,32
SULAWESI UTARA	21.203,83	13.852,96
SULAWESI TENGAH	18.046,64	9.332,25
SULAWESI SELATAN	16.942,82	6.991,44
SULAWESI TENGGARA	14.586,27	12.560,22
GORONTALO	20.113,77	10.722,06
SULAWESI BARAT	15.280,46	8.983,28
MALUKU	17.582,94	10.739,32
MALUKU UTARA	22.960,33	10.564,77
PAPUA BARAT	24.118,44	13.566,62
PAPUA	29.914,01	3.675,92
INDONESIA	17.039,72	9.521,22

LAMPIRAN 14

PERSENTASE RTUP MENURUT PROVINSI, SUMBER PENDAPATAN UTAMA, DAN STATUS PEKERJAAN, 2013

PROVINSI	SUMBER PENDAPATAN UTAMA						
	PERTANIAN			BUKAN PERTANIAN			
	BERUSAHA	BEKERJA	BERUSAHA DAN BEKERJA	BERUSAHA	BEKERJA	BERUSAHA DAN BEKERJA	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ACEH	68,76	7,47	0,14	7,76	15,26	0	0,61
SUMATERA UTARA	70,95	8,01	0,12	7,85	11,5	0	1,57
SUMATERA BARAT	54,86	12,03	0,12	14,34	15,37	0	3,28
RIAU	75,29	8,47	0,34	5,46	10,11	0	0,32
JAMBI	77,63	8,00	0,21	5,53	8,07	0	0,56
SUMATERA SELATAN	87,93	3,75	0,25	3,32	4,56	0	0,18
BENGKULU	71,46	10,01	0,24	7,01	10,72	0	0,56
LAMPUNG	71,86	9,02	0,26	7,01	10,67	0	1,18
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	48,17	10,14	0,06	21,21	19,41	0	1,01
KEPULAUAN RIAU	68,32	2,68	0,04	9,11	19,06	0	0,79
DKI JAKARTA	47,79	0,32	0,00	13,04	37,4	0	1,45
JAWA BARAT	55,41	8,59	0,07	14,52	19,05	0	2,36
JAWA TENGAH	49,69	7,65	0,18	14,47	24,19	0,01	3,82
DI YOGYAKARTA	40,47	3,13	0,03	16,10	34,13	0,06	6,08
JAWA TIMUR	57,86	11,34	0,37	10,78	16,78	0,02	2,85
BANTEN	59,68	4,67	0,08	11,02	22,55	0	2,01
BALI	45,51	4,88	0,04	14,92	33,26	0	1,39
NUSA TENGGARA BARAT	67,66	6,97	0,19	11,07	11,44	0	2,67
NUSA TENGGARA TIMUR	81,02	1,54	0,04	6,00	9,51	0	1,9
KALIMANTAN BARAT	78,28	6,12	0,14	4,33	10,6	0,01	0,51
KALIMANTAN TENGAH	65,23	8,08	0,13	9,86	15,79	0	0,9
KALIMANTAN SELATAN	63,79	6,46	0,07	12,75	15,63	0	1,31
KALIMANTAN TIMUR	73,40	4,46	0,10	6,00	15,8	0	0,23
KALIMANTAN UTARA	71,00	6,10	0,07	5,98	16,45	0	0,39
SULAWESI UTARA	60,76	8,60	0,11	10,34	17,96	0,01	2,21
SULAWESI TENGAH	67,60	7,12	0,18	10,25	13,11	0	1,73
SULAWESI SELATAN	77,76	2,25	0,05	8,29	9,89	0	1,76
SULAWESI TENGGARA	59,92	3,23	0,03	13,95	19,52	0,01	3,34
GORONTALO	66,35	4,08	0,01	13,59	15,56	0	0,41
SULAWESI BARAT	67,76	5,32	0,37	11,34	11,67	0	3,54
MALUKU	70,64	1,32	0,00	13,13	13,34	0	1,57
MALUKU UTARA	73,75	2,99	0,00	7,19	15,4	0	0,66
PAPUA BARAT	70,79	3,62	0,00	7,53	17,28	0	0,78
PAPUA	93,79	0,28	0,00	1,20	4,5	0	0,24
INDONESIA	62,81	7,58	0,18	10,67	16,49	0,01	2,26

LAMPIRAN 15
PERSENTASE RTUP MENURUT PROVINSI DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI SEKTOR
PERTANIAN, 2013

PROVINSI	KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI SEKTOR PERTANIAN		
	<25%	25%-50%	>50%
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	30,71	24,15	45,14
SUMATERA UTARA	27,36	20,08	52,56
SUMATERA BARAT	34,67	23,20	42,13
RIAU	21,13	19,26	59,61
JAMBI	19,44	16,48	64,09
SUMATERA SELATAN	12,92	15,92	71,17
BENGKULU	22,22	21,20	56,59
LAMPUNG	25,62	24,03	50,35
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	47,41	19,40	33,19
KEPULAUAN RIAU	33,18	18,68	48,14
DKI JAKARTA	55,58	18,19	26,23
JAWA BARAT	42,70	24,76	32,54
JAWA TENGAH	45,44	23,74	30,82
DI YOGYAKARTA	52,70	22,36	24,94
JAWA TIMUR	38,02	26,03	35,94
BANTEN	43,81	25,13	31,06
BALI	47,03	25,08	27,89
NUSA TENGGARA BARAT	29,86	27,25	42,89
NUSA TENGGARA TIMUR	23,20	27,72	49,09
KALIMANTAN BARAT	22,71	18,91	58,37
KALIMANTAN TENGAH	33,83	20,95	45,22
KALIMANTAN SELATAN	36,62	21,63	41,75
KALIMANTAN TIMUR	31,70	20,97	47,34
KALIMANTAN UTARA	31,80	21,34	46,85
SULAWESI UTARA	37,80	23,21	38,99
SULAWESI TENGAH	29,33	23,81	46,86
SULAWESI SELATAN	24,50	18,64	56,86
SULAWESI TENGGARA	36,49	22,46	41,05
GORONTALO	34,59	23,00	42,42
SULAWESI BARAT	30,79	24,27	44,94
MALUKU	30,99	26,15	42,86
MALUKU UTARA	29,71	28,45	41,85
PAPUA BARAT	31,89	25,09	43,02
PAPUA	11,90	21,69	66,41
INDONESIA	34,81	23,37	41,83

LAMPIRAN 16

RATA-RATA PENDAPATAN PER KAPITA RTUP MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	RATA-RATA PENDAPATAN PERKAPITA
(1)	(2)
ACEH	5.511,47
SUMATERA UTARA	6.893,28
SUMATERA BARAT	7.202,38
RIAU	9.847,92
JAMBI	9.340,37
SUMATERA SELATAN	8.103,29
BENGKULU	7.827,06
LAMPUNG	6.895,10
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11.380,05
KEPULAUAN RIAU	9.275,48
DKI JAKARTA	12.899,15
JAWA BARAT	6.993,19
JAWA TENGAH	6.086,95
DI YOGYAKARTA	7.266,73
JAWA TIMUR	6.740,76
BANTEN	6.087,79
BALI	8.850,43
NUSA TENGGARA BARAT	6.054,61
NUSA TENGGARA TIMUR	4.202,25
KALIMANTAN BARAT	7.557,45
KALIMANTAN TENGAH	10.050,17
KALIMANTAN SELATAN	7.975,30
KALIMANTAN TIMUR	11.756,96
KALIMANTAN UTARA	9.588,73
SULAWESI UTARA	9.092,68
SULAWESI TENGAH	6.466,38
SULAWESI SELATAN	5.580,61
SULAWESI TENGGARA	6.156,29
GORONTALO	7.145,68
SULAWESI BARAT	5.461,71
MALUKU	5.793,89
MALUKU UTARA	6.991,09
PAPUA BARAT	8.273,36
PAPUA	8.536,23
INDONESIA	6.897,86

LAMPIRAN 17

JUMLAH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN PENGGUNA LAHAN DAN RUMAH TANGGA PETANI GUREM MENURUT PROVINSI, ST2003 DAN ST2013

PROVINSI	RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN PENGGUNA LAHAN		RUMAH TANGGA PETANI GUREM	
	ST2003	ST2013	ST2003	ST2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	691.454	637.778	248.823	276.729
SUMATERA UTARA	1.451.813	1.308.393	751.330	570.185
SUMATERA BARAT	695.739	640.695	357.797	275.135
RIAU	511.395	568.070	125.418	68.560
JAMBI	401.052	426.647	101.836	65.499
SUMATERA SELATAN	946.858	949.801	218.091	110.932
BENGKULU	275.769	275.559	49.147	35.974
LAMPUNG	1.272.932	1.218.927	447.126	362.148
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	127.412	117.488	52.891	26.069
KEPULAUAN RIAU	56.086	50.230	28.379	20.545
DKI JAKARTA	47.262	9.515	45.428	8.611
JAWA BARAT	4.242.003	3.039.716	3.501.867	2.298.193
JAWA TENGAH	5.697.473	4.262.608	4.629.877	3.312.235
DI YOGYAKARTA	573.092	495.401	479.780	424.557
JAWA TIMUR	6.189.481	4.931.506	4.893.626	3.755.837
BANTEN	875.287	584.259	634.415	379.888
BALI	485.531	404.507	313.111	257.181
NUSA TENGGARA BARAT	686.172	587.617	446.040	350.131
NUSA TENGGARA TIMUR	722.039	770.864	224.987	289.917
KALIMANTAN BARAT	594.483	616.894	120.575	81.286
KALIMANTAN TENGAH	273.806	261.227	45.564	29.083
KALIMANTAN SELATAN	450.903	420.352	193.773	133.853
KALIMANTAN TIMUR	180.515	165.413	56.075	27.326
KALIMANTAN UTARA	34.595	39.369	9.084	6.343
SULAWESI UTARA	300.834	246.394	103.154	72.055
SULAWESI TENGAH	372.636	387.258	69.935	74.073
SULAWESI SELATAN	1.049.449	950.241	408.673	338.108
SULAWESI TENGGARA	293.555	299.926	72.188	63.809
GORONTALO	118.257	117.248	44.791	40.959
SULAWESI BARAT	160.863	179.814	43.560	50.696
MALUKU	178.497	170.169	68.913	78.140
MALUKU UTARA	124.480	127.865	19.679	21.857
PAPUA BARAT	71.131	65.458	39.344	37.570
PAPUA	266.728	424.058	169.774	305.380
INDONESIA	30.419.582	25.751.267	190.150.511	14.248.864

LAMPIRAN 18

RATA-RATA LUAS LAHAN YANG DIKUASAI PER RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN (M²)
MENURUT PROVINSI, 2003 DAN 2013

PROVINSI	LAHAN YANG DIKUASAI (M ²)	
	2003	2013
(1)	(2)	(3)
ACEH	13262,31	10264,39
SUMATERA UTARA	4568,76	10754,44
SUMATERA BARAT	4964,91	9625,99
RIAU	11469,96	26495,45
JAMBI	12891,19	24693,79
SUMATERA SELATAN	10297,91	19499,74
BENGKULU	11568,31	17621,16
LAMPUNG	7539,18	11039,01
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5741,97	18035,67
KEPULAUAN RIAU	2501,76	9315,00
DKI JAKARTA	98,44	1655,96
JAWA BARAT	1471,35	4363,08
JAWA TENGAH	2193,49	3729,22
DI YOGYAKARTA	1681,17	2682,37
JAWA TIMUR	2180,01	3943,06
BANTEN	1997,12	5378,85
BALI	2836,86	5022,48
NUSA TENGGARA BARAT	3698,30	6645,69
NUSA TENGGARA TIMUR	8970,75	9241,07
KALIMANTAN BARAT	15359,51	26475,02
KALIMANTAN TENGAH	13129,71	30980,60
KALIMANTAN SELATAN	5542,74	12821,25
KALIMANTAN TIMUR	6404,41	25178,50
KALIMANTAN UTARA	11252,61	28470,37
SULAWESI UTARA	5572,53	13431,46
SULAWESI TENGAH	11239,96	17171,57
SULAWESI SELATAN	6772,23	11194,71
SULAWESI TENGGARA	10027,14	16267,72
GORONTALO	5369,37	11041,27
SULAWESI BARAT	10537,41	14309,42
MALUKU	7903,13	8943,06
MALUKU UTARA	12449,34	17452,78
PAPUA BARAT	4798,76	7322,63
PAPUA	4319,38	4913,77
INDONESIA	4079,06	8925,64

LAMPIRAN 19
 PERSENTASE RTUP YANG SUMBER MODAL USAHA PERTANIAN DARI BANK
 MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	SUMBER MODAL DARI BANK
(1)	(2)
ACEH	1,92
SUMATERA UTARA	3,88
SUMATERA BARAT	3,13
R I A U	4,54
J A M B I	3,31
SUMATERA SELATAN	3,21
BENGKULU	4,03
LAMPUNG	3,29
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,40
KEPULAUAN RIAU	2,10
DKI JAKARTA	2,42
JAWA BARAT	2,63
JAWA TENGAH	3,91
DI YOGYAKARTA	2,18
JAWA TIMUR	4,52
BANTEN	1,68
B A L I	3,59
NUSA TENGGARA BARAT	3,63
NUSA TENGGARA TIMUR	1,18
KALIMANTAN BARAT	2,66
KALIMANTAN TENGAH	2,76
KALIMANTAN SELATAN	1,77
KALIMANTAN TIMUR	2,60
KALIMANTAN UTARA	2,18
SULAWESI UTARA	2,48
SULAWESI TENGAH	3,49
SULAWESI SELATAN	2,48
SULAWESI TENGGARA	1,88
GORONTALO	3,03
SULAWESI BARAT	1,43
MALUKU	1,37
MALUKU UTARA	1,15
PAPUA BARAT	1,95
PAPUA	1,16
INDONESIA	3,27

LAMPIRAN 20
 PERSENTASE RTUP YANG MENGALAMI KESULITAN MEMPEROLEH SARANA
 PRODUKSI MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	KESULITAN MEMPEROLEH SARANA PRODUKSI
(1)	(2)
ACEH	22,91
SUMATERA UTARA	22,39
SUMATERA BARAT	17,42
R I A U	14,51
J A M B I	16,49
SUMATERA SELATAN	20,53
BENGGULU	28,41
LAMPUNG	22,43
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17,23
KEPULAUAN RIAU	27,09
DKI JAKARTA	17,66
JAWA BARAT	15,40
JAWA TENGAH	7,37
DI YOGYAKARTA	7,31
JAWA TIMUR	10,53
BANTEN	20,77
B A L I	9,82
NUSA TENGGARA BARAT	26,85
NUSA TENGGARA TIMUR	56,25
KALIMANTAN BARAT	36,36
KALIMANTAN TENGAH	23,27
KALIMANTAN SELATAN	14,01
KALIMANTAN TIMUR	28,47
KALIMANTAN UTARA	41,60
SULAWESI UTARA	39,93
SULAWESI TENGAH	31,30
SULAWESI SELATAN	22,91
SULAWESI TENGGARA	27,90
GORONTALO	35,19
SULAWESI BARAT	31,79
MALUKU	33,04
MALUKU UTARA	30,59
PAPUA BARAT	44,16
PAPUA	40,15
INDONESIA	18,34

LAMPIRAN 21
PERSENTASE RTUP YANG MENGIKUTI PENYULUHAN PERTANIAN MENURUT
PROVINSI, 2013

PROVINSI	MENGIKUTI PENYULUHAN
(1)	(2)
ACEH	11,593
SUMATERA UTARA	11,445
SUMATERA BARAT	15,418
R I A U	9,990
J A M B I	12,682
SUMATERA SELATAN	11,654
BENGKULU	13,164
LAMPUNG	18,951
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8,839
KEPULAUAN RIAU	8,016
DKI JAKARTA	22,506
JAWA BARAT	18,777
JAWA TENGAH	25,663
DI YOGYAKARTA	31,493
JAWA TIMUR	18,173
BANTEN	13,284
B A L I	23,844
NUSA TENGGARA BARAT	14,794
NUSA TENGGARA TIMUR	13,666
KALIMANTAN BARAT	14,458
KALIMANTAN TENGAH	15,869
KALIMANTAN SELATAN	24,579
KALIMANTAN TIMUR	21,510
KALIMANTAN UTARA	21,322
SULAWESI UTARA	21,051
SULAWESI TENGAH	23,631
SULAWESI SELATAN	26,123
SULAWESI TENGGARA	16,174
GORONTALO	34,894
SULAWESI BARAT	20,723
MALUKU	8,727
MALUKU UTARA	7,636
PAPUA BARAT	15,266
PAPUA	8,742
INDONESIA	18,528

LAMPIRAN 22

PERSENTASE RTUP YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK TANI MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	MENJADI ANGGOTA KELOMPOK TANI
(1)	(2)
ACEH	25,883
SUMATERA UTARA	25,535
SUMATERA BARAT	28,565
R I A U	22,985
J A M B I	28,221
SUMATERA SELATAN	26,843
BENGKULU	32,795
LAMPUNG	37,507
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	22,987
KEPULAUAN RIAU	18,609
DKI JAKARTA	24,790
JAWA BARAT	18,734
JAWA TENGAH	32,682
DI YOGYAKARTA	44,697
JAWA TIMUR	31,237
BANTEN	18,689
B A L I	47,193
NUSA TENGGARA BARAT	38,459
NUSA TENGGARA TIMUR	29,314
KALIMANTAN BARAT	29,556
KALIMANTAN TENGAH	34,044
KALIMANTAN SELATAN	45,883
KALIMANTAN TIMUR	43,896
KALIMANTAN UTARA	48,500
SULAWESI UTARA	23,044
SULAWESI TENGAH	36,127
SULAWESI SELATAN	42,863
SULAWESI TENGGARA	25,732
GORONTALO	42,755
SULAWESI BARAT	47,663
MALUKU	13,480
MALUKU UTARA	13,169
PAPUA BARAT	24,972
PAPUA	21,059
INDONESIA	30,166

LAMPIRAN 23

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (HEADCOUNT) PADA RTUP MENURUT PROVINSI, 2013

PROVINSI	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (HEADCOUNT)
(1)	(2)
ACEH	10,81
SUMATERA UTARA	12,07
SUMATERA BARAT	16,72
R I A U	8,67
J A M B I	12,44
SUMATERA SELATAN	13,30
BENGKULU	14,19
LAMPUNG	11,22
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11,67
KEPULAUAN RIAU	9,97
DKI JAKARTA	1,41
JAWA BARAT	18,55
JAWA TENGAH	15,94
DI YOGYAKARTA	6,70
JAWA TIMUR	16,92
BANTEN	24,63
B A L I	12,58
NUSA TENGGARA BARAT	24,92
NUSA TENGGARA TIMUR	49,07
KALIMANTAN BARAT	20,93
KALIMANTAN TENGAH	16,51
KALIMANTAN SELATAN	12,77
KALIMANTAN TIMUR	6,68
KALIMANTAN UTARA	16,92
SULAWESI UTARA	16,30
SULAWESI TENGAH	25,55
SULAWESI SELATAN	16,10
SULAWESI TENGGARA	18,80
GORONTALO	38,28
SULAWESI BARAT	30,48
MALUKU	22,18
MALUKU UTARA	24,44
PAPUA BARAT	24,64
PAPUA	60,42
INDONESIA	18,21

LAMPIRAN 24

INTENSITAS KEMISKINAN PADA RTUP MENURUT PROVINSI (PERSEN), 2013

PROVINSI	INTENSITAS KEMISKINAN
(1)	(2)
ACEH	38,91
SUMATERA UTARA	41,16
SUMATERA BARAT	38,00
R I A U	39,32
J A M B I	38,56
SUMATERA SELATAN	38,83
BENGKULU	37,85
LAMPUNG	38,18
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	38,50
KEPULAUAN RIAU	37,43
DKI JAKARTA	39,10
JAWA BARAT	37,73
JAWA TENGAH	37,29
DI YOGYAKARTA	35,68
JAWA TIMUR	37,54
BANTEN	38,94
B A L I	37,86
NUSA TENGGARA BARAT	38,32
NUSA TENGGARA TIMUR	42,47
KALIMANTAN BARAT	39,27
KALIMANTAN TENGAH	37,77
KALIMANTAN SELATAN	38,23
KALIMANTAN TIMUR	38,68
KALIMANTAN UTARA	39,49
SULAWESI UTARA	38,35
SULAWESI TENGAH	40,65
SULAWESI SELATAN	39,13
SULAWESI TENGGARA	39,47
GORONTALO	41,38
SULAWESI BARAT	40,49
MALUKU	40,88
MALUKU UTARA	40,84
PAPUA BARAT	40,85
PAPUA	44,45
INDONESIA	39,12

LAMPIRAN 25

INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI MENURUT PROVINSI (PERSEN), 2013

PROVINSI	INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI
(1)	(2)
ACEH	4,21
SUMATERA UTARA	4,97
SUMATERA BARAT	6,35
R I A U	3,41
J A M B I	4,80
SUMATERA SELATAN	5,16
BENGGULU	5,37
LAMPUNG	4,28
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,50
KEPULAUAN RIAU	3,73
DKI JAKARTA	0,55
JAWA BARAT	7,00
JAWA TENGAH	5,95
DI YOGYAKARTA	2,39
JAWA TIMUR	6,35
BANTEN	9,59
B A L I	4,76
NUSA TENGGARA BARAT	9,55
NUSA TENGGARA TIMUR	20,84
KALIMANTAN BARAT	8,22
KALIMANTAN TENGAH	6,24
KALIMANTAN SELATAN	4,88
KALIMANTAN TIMUR	2,58
KALIMANTAN UTARA	6,68
SULAWESI UTARA	6,25
SULAWESI TENGAH	10,39
SULAWESI SELATAN	6,30
SULAWESI TENGGARA	7,42
GORONTALO	15,84
SULAWESI BARAT	12,34
MALUKU	9,07
MALUKU UTARA	9,98
PAPUA BARAT	10,06
PAPUA	26,86
INDONESIA	7,12

LAMPIRAN 26

INDEKS KETAHANAN PANGAN MENURUT DIMENSI DAN PROVINSI, 2013

PROVINSI	DIMENSI			INDEKS KETAHANAN PANGAN
	KETERSEDIAAN PANGAN	KETERJANGKAUAN PANGAN	PEMANFAATAN PANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	82,89	75,54	71,63	76,69
SUMATERA UTARA	83,83	73,11	73,11	76,69
SUMATERA BARAT	87,02	84,91	73,08	81,67
RIAU	91,12	71,76	66,48	76,45
JAMBI	91,94	74,87	67,81	78,21
SUMATERA SELATAN	87,74	77,64	67,25	77,54
BENGGKULU	87,15	75,34	69,74	77,41
LAMPUNG	87,58	83,62	68,70	79,97
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	87,01	60,67	73,04	73,58
KEPULAUAN RIAU	90,13	68,20	70,26	76,20
DKI JAKARTA	92,03	71,57	90,73	84,78
JAWA BARAT	87,77	83,23	72,65	81,22
JAWA TENGAH	93,04	91,27	73,25	85,85
DI YOGYAKARTA	94,53	91,60	71,96	86,03
JAWA TIMUR	92,72	89,65	74,46	85,61
BANTEN	88,49	80,09	73,21	80,60
BALI	88,40	83,69	77,19	83,09
NUSA TENGGARA BARAT	84,29	81,57	72,06	79,31
NUSA TENGGARA TIMUR	75,83	66,45	66,58	69,62
KALIMANTAN BARAT	85,10	70,85	59,77	71,91
KALIMANTAN TENGAH	88,22	73,82	65,23	75,76
KALIMANTAN SELATAN	92,38	91,03	71,40	84,94
KALIMANTAN TIMUR	88,65	82,73	74,56	81,98
KALIMANTAN UTARA	86,71	71,70	62,96	73,79
SULAWESI UTARA	85,34	76,04	71,73	77,70
SULAWESI TENGAH	90,16	85,49	69,43	81,69
SULAWESI SELATAN	89,22	86,69	72,57	82,82
SULAWESI TENGGARA	89,37	79,83	70,93	80,04
GORONTALO	82,43	75,41	70,38	76,07
SULAWESI BARAT	87,29	72,65	66,88	75,61
MALUKU	90,32	79,05	68,31	79,23
MALUKU UTARA	89,21	71,83	67,96	76,33
PAPUA BARAT	92,91	81,80	62,85	79,19
PAPUA	89,37	80,44	61,69	77,17
INDONESIA	89,23	83,35	71,53	81,37

LAMPIRAN 27

JUMLAH KABUPATEN/KOTA MENURUT PROVINSI DAN KATEGORI KETAHANAN PANGAN

PROVINSI	KATEGORI KETAHANAN PANGAN		
	KURANG	CUKUP	TINGGI
(1)	(2)	(3)	(4)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9	12	2
SUMATERA UTARA	13	15	5
SUMATERA BARAT	1	10	8
RIAU	2	10	0
JAMBI	0	9	2
SUMATERA SELATAN	5	9	1
BENGKULU	1	9	0
LAMPUNG	1	11	2
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5	2	0
KEPULAUAN RIAU	2	5	0
DKI JAKARTA	1	0	5
JAWA BARAT	2	16	8
JAWA TENGAH	0	1	34
DI YOGYAKARTA	0	1	4
JAWA TIMUR	0	6	32
BANTEN	1	6	1
BALI	0	5	4
NUSA TENGGARA BARAT	1	8	1
NUSA TENGGARA TIMUR	17	4	0
KALIMANTAN BARAT	10	3	1
KALIMANTAN TENGAH	6	7	1
KALIMANTAN SELATAN	0	2	11
KALIMANTAN TIMUR	1	2	6
KALIMANTAN UTARA	4	1	0
SULAWESI UTARA	5	9	1
SULAWESI TENGAH	0	7	4
SULAWESI SELATAN	1	11	12
SULAWESI TENGGARA	1	9	2
GORONTALO	1	5	0
SULAWESI BARAT	3	2	0
MALUKU	1	9	1
MALUKU UTARA	2	7	0
PAPUA BARAT	1	8	2
PAPUA	7	14	8

LAMPIRAN 28

DIMENSI KETERSEDIAAN PANGAN MENURUT SKOR INDIKATOR, ASPEK KECUKUPAN PANGAN DAN PROVINSI, 2013

PROVINSI	SKOR INDIKATOR			SKOR ASPEK KECUKUPAN PANGAN	DIMENSI KETERSEDIAAN PANGAN
	KECUKUPAN PERSEDIAAN PANGAN	TIDAK KEKURANGAN PANGAN	KETAKUTAN KEKURANGAN PANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	5,03	2,77	2,15	9,95	82,89
SUMATERA UTARA	4,89	2,83	2,34	10,06	83,83
SUMATERA BARAT	5,11	2,90	2,43	10,44	87,02
RIAU	5,39	2,94	2,61	10,93	91,12
JAMBI	5,47	2,95	2,61	11,03	91,94
SUMATERA SELATAN	5,10	2,87	2,56	10,53	87,74
BENGKULU	5,04	2,90	2,52	10,46	87,15
LAMPUNG	5,12	2,86	2,52	10,51	87,58
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,88	2,98	2,59	10,44	87,01
KEPULAUAN RIAU	5,42	2,93	2,47	10,82	90,13
DKI JAKARTA	5,23	2,95	2,86	11,04	92,03
JAWA BARAT	5,16	2,91	2,46	10,53	87,77
JAWA TENGAH	5,38	2,96	2,82	11,16	93,04
DI YOGYAKARTA	5,52	2,98	2,85	11,34	94,53
JAWA TIMUR	5,39	2,94	2,80	11,13	92,72
BANTEN	5,13	2,94	2,55	10,62	88,49
BALI	5,39	2,95	2,27	10,61	88,40
NUSA TENGGARA BARAT	5,20	2,77	2,14	10,12	84,29
NUSA TENGGARA TIMUR	5,02	2,14	1,94	9,10	75,83
KALIMANTAN BARAT	5,08	2,78	2,34	10,21	85,10
KALIMANTAN TENGAH	5,17	2,92	2,49	10,59	88,22
KALIMANTAN SELATAN	5,39	2,98	2,72	11,09	92,38
KALIMANTAN TIMUR	5,16	2,90	2,57	10,64	88,65
KALIMANTAN UTARA	5,14	2,83	2,44	10,41	86,71
SULAWESI UTARA	5,18	2,77	2,29	10,24	85,34
SULAWESI TENGAH	5,48	2,88	2,46	10,82	90,16
SULAWESI SELATAN	5,37	2,87	2,47	10,71	89,22
SULAWESI TENGGARA	5,38	2,89	2,45	10,72	89,37
GORONTALO	5,06	2,81	2,03	9,89	82,43
SULAWESI BARAT	5,21	2,81	2,46	10,47	87,29
MALUKU	5,42	2,83	2,59	10,84	90,32
MALUKU UTARA	5,31	2,81	2,58	10,70	89,21
PAPUA BARAT	5,33	2,94	2,88	11,15	92,91
PAPUA	5,04	2,91	2,77	10,72	89,37
INDONESIA	5,25	2,88	2,57	10,71	89,23

LAMPIRAN 29

DIMENSI KETERJANGKAUAN PANGAN MENURUT SKOR INDIKATOR KETERJANGKAUAN FISIK, SOSIAL, EKONOMI SERTA PROVINSI, 2013

PROVINSI	SKOR INDIKATOR				DIMENSI KETERJANGKAUAN PANGAN
	PANGAN DIPRODUKSI DI KECAMATAN	TIDAK MENGALAMI KESULITAN MENJANGKAU LOKASI PEMBELIAN	HARGA PEMBELIAN TIDAK TINGGI	SKOR ASPEK KETERJANGKAUAN FISIK, EKONOMI, SOSIAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	0,76	0,92	0,58	2,27	75,54
SUMATERA UTARA	0,70	0,89	0,60	2,19	73,11
SUMATERA BARAT	0,88	0,95	0,72	2,55	84,91
RIAU	0,39	0,97	0,79	2,15	71,76
JAMBI	0,48	0,96	0,80	2,25	74,87
SUMATERA SELATAN	0,68	0,95	0,71	2,33	77,64
BENGKULU	0,67	0,94	0,65	2,26	75,34
LAMPUNG	0,84	0,95	0,71	2,51	83,62
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,21	0,98	0,63	1,82	60,67
KEPULAUAN RIAU	0,36	0,95	0,74	2,05	68,20
DKI JAKARTA	0,37	0,99	0,79	2,15	71,57
JAWA BARAT	0,88	0,94	0,68	2,50	83,23
JAWA TENGAH	0,92	0,98	0,84	2,74	91,27
DI YOGYAKARTA	0,93	0,97	0,84	2,75	91,60
JAWA TIMUR	0,91	0,96	0,81	2,69	89,65
BANTEN	0,82	0,94	0,64	2,40	80,09
BALI	0,81	0,96	0,74	2,51	83,69
NUSA TENGGARA BARAT	0,93	0,91	0,61	2,45	81,57
NUSA TENGGARA TIMUR	0,81	0,74	0,44	1,99	66,45
KALIMANTAN BARAT	0,67	0,87	0,58	2,13	70,85
KALIMANTAN TENGAH	0,56	0,94	0,71	2,21	73,82
KALIMANTAN SELATAN	0,88	0,97	0,89	2,73	91,03
KALIMANTAN TIMUR	0,80	0,93	0,74	2,48	82,73
KALIMANTAN UTARA	0,67	0,86	0,62	2,15	71,70
SULAWESI UTARA	0,65	0,93	0,70	2,28	76,04
SULAWESI TENGAH	0,83	0,94	0,79	2,56	85,49
SULAWESI SELATAN	0,89	0,93	0,78	2,60	86,69
SULAWESI TENGGARA	0,74	0,92	0,73	2,39	79,83
GORONTALO	0,78	0,88	0,60	2,26	75,41
SULAWESI BARAT	0,64	0,89	0,65	2,18	72,65
MALUKU	0,72	0,91	0,74	2,37	79,05
MALUKU UTARA	0,56	0,90	0,70	2,15	71,83
PAPUA BARAT	0,78	0,88	0,80	2,45	81,80
PAPUA	0,83	0,82	0,77	2,41	80,44
INDONESIA	0,82	0,94	0,74	2,50	83,35

LAMPIRAN 30
DIMENSI PEMANFAATAN PANGAN MENURUT ASPEK DAN PROVINSI, 2013

PROVINSI	ASPEK		PEMANFAATAN PANGAN
	KECUKUPAN ASUPAN	KUALITAS AIR	
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	98,52	44,74	71,63
SUMATERA UTARA	99,02	47,20	73,11
SUMATERA BARAT	98,62	47,53	73,08
RIAU	98,96	34,00	66,48
JAMBI	99,45	36,17	67,81
SUMATERA SELATAN	98,80	35,69	67,25
BENGKULU	99,26	40,21	69,74
LAMPUNG	99,51	37,89	68,70
KEP. BANGKA BELITUNG	99,49	46,59	73,04
KEP. RIAU	99,28	41,23	70,26
DKI JAKARTA	99,47	81,99	90,73
JAWA BARAT	99,34	45,95	72,65
JAWA TENGAH	99,69	46,81	73,25
DI YOGYAKARTA	99,50	44,42	71,96
JAWA TIMUR	99,62	49,30	74,46
BANTEN	98,81	47,61	73,21
BALI	99,39	54,99	77,19
NTB	98,59	45,54	72,06
NTT	97,15	36,01	66,58
KALIMANTAN BARAT	98,91	20,63	59,77
KALIMANTAN TENGAH	99,15	31,31	65,23
KALIMANTAN SELATAN	99,58	43,23	71,40
KALIMANTAN TIMUR	98,97	50,16	74,56
KALIMANTAN UTARA	98,63	27,28	62,96
SULAWESI UTARA	98,66	44,81	71,73
SULAWESI TENGAH	98,38	40,48	69,43
SULAWESI SELATAN	98,79	46,34	72,57
SULAWESI TENGGARA	98,71	43,16	70,93
GORONTALO	98,68	42,08	70,38
SULAWESI BARAT	98,56	35,20	66,88
MALUKU	98,24	38,38	68,31
MALUKU UTARA	98,43	37,50	67,96
PAPUA BARAT	97,66	28,04	62,85
PAPUA	97,29	26,09	61,69
INDONESIA	99,17	43,90	71,53

LAMPIRAN 31
ASPEK KECUKUPAN ASUPAN MENURUT SKOR INDIKATOR DAN PROVINSI, 2013

SKOR INDIKATOR				
PROVINSI	TIDAK ADA BALITA KURANG GIZI	TIDAK ADA BALITA YANG MENINGGAL KARENA SAKIT	SKOR KECUKUPAN ASUPAN	ASPEK KECUKUPAN ASUPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	0,99	0,99	1,97	98,52
SUMATERA UTARA	0,99	0,99	1,98	99,02
SUMATERA BARAT	0,99	0,98	1,97	98,62
RIAU	0,99	0,99	1,98	98,96
JAMBI	1,00	0,99	1,99	99,45
SUMATERA SELATAN	0,99	0,98	1,98	98,80
BENGGULU	0,99	0,99	1,99	99,26
LAMPUNG	1,00	1,00	1,99	99,51
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,99	0,99	1,99	99,49
KEPULAUAN RIAU	0,99	1,00	1,99	99,28
DKI JAKARTA	1,00	0,99	1,99	99,47
JAWA BARAT	0,99	0,99	1,99	99,34
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,99	99,69
DI YOGYAKARTA	0,99	1,00	1,99	99,50
JAWA TIMUR	1,00	1,00	1,99	99,62
BANTEN	0,99	0,99	1,98	98,81
BALI	0,99	0,99	1,99	99,39
NUSA TENGGARA BARAT	0,98	0,99	1,97	98,59
NUSA TENGGARA TIMUR	0,96	0,98	1,94	97,15
KALIMANTAN BARAT	0,99	0,99	1,98	98,91
KALIMANTAN TENGAH	0,99	0,99	1,98	99,15
KALIMANTAN SELATAN	1,00	1,00	1,99	99,58
KALIMANTAN TIMUR	0,99	0,99	1,98	98,97
KALIMANTAN UTARA	0,98	0,99	1,97	98,63
SULAWESI UTARA	0,98	0,99	1,97	98,66
SULAWESI TENGAH	0,98	0,98	1,97	98,38
SULAWESI SELATAN	0,99	0,99	1,98	98,79
SULAWESI TENGGARA	0,99	0,99	1,97	98,71
GORONTALO	0,99	0,99	1,97	98,68
SULAWESI BARAT	0,98	0,99	1,97	98,56
MALUKU	0,98	0,98	1,96	98,24
MALUKU UTARA	0,98	0,99	1,97	98,43
PAPUA BARAT	0,98	0,98	1,95	97,66
PAPUA	0,97	0,97	1,95	97,29
INDONESIA	0,99	0,99	1,98	99,17

LAMPIRAN 32
ASPEK KUALITAS AIR MENURUT SKOR INDIKATOR DAN PROVINSI, 2013

PROVINSI	SKOR INDIKATOR		SKOR ASPEK KUALITAS AIR	ASPEK KUALITAS AIR
	SUMBER AIR MINUM UTAMA	SUMBER AIR UNTUK MASAK YANG UTAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	1,46	1,22	2,68	44,74
SUMATERA UTARA	1,50	1,34	2,83	47,20
SUMATERA BARAT	1,55	1,30	2,85	47,53
RIAU	1,18	0,86	2,04	34,00
JAMBI	1,16	1,01	2,17	36,17
SUMATERA SELATAN	1,14	1,00	2,14	35,69
BENGKULU	1,25	1,16	2,41	40,21
LAMPUNG	1,19	1,09	2,27	37,89
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,64	1,15	2,80	46,59
KEPULAUAN RIAU	1,33	1,15	2,47	41,23
DKI JAKARTA	2,58	2,34	4,92	81,99
JAWA BARAT	1,44	1,31	2,76	45,95
JAWA TENGAH	1,45	1,36	2,81	46,81
DI YOGYAKARTA	1,35	1,32	2,66	44,42
JAWA TIMUR	1,52	1,43	2,96	49,30
BANTEN	1,52	1,34	2,86	47,61
BALI	1,64	1,65	3,30	54,99
NUSA TENGGARA BARAT	1,41	1,32	2,73	45,54
NUSA TENGGARA TIMUR	1,08	1,08	2,16	36,01
KALIMANTAN BARAT	0,66	0,58	1,24	20,63
KALIMANTAN TENGAH	1,02	0,86	1,88	31,31
KALIMANTAN SELATAN	1,37	1,23	2,59	43,23
KALIMANTAN TIMUR	1,71	1,30	3,01	50,16
KALIMANTAN UTARA	0,99	0,65	1,64	27,28
SULAWESI UTARA	1,45	1,24	2,69	44,81
SULAWESI TENGAH	1,25	1,18	2,43	40,48
SULAWESI SELATAN	1,43	1,35	2,78	46,34
SULAWESI TENGGARA	1,33	1,26	2,59	43,16
GORONTALO	1,31	1,21	2,53	42,08
SULAWESI BARAT	1,09	1,02	2,11	35,20
MALUKU	1,17	1,14	2,30	38,38
MALUKU UTARA	1,13	1,12	2,25	37,50
PAPUA BARAT	0,92	0,76	1,68	28,04
PAPUA	0,81	0,75	1,57	26,09
INDONESIA	1,38	1,26	2,63	43,90

ST2013 SURVEI PERTANIAN

CATATAN TEKNIS



Catatan Teknis 1. INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI (IKM)

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (*deprivation*) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dan kesehatan terdiri dari 2 indikator, sementara dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator. Setiap rumah tangga yang mengalami kekurangan (*deprivation*) diberi skor 1 dan yang tidak mengalami kekurangan diberi skor 0. Jumlah dari skor setiap rumah tangga menunjukkan kekurangan multidimensi rumah tangga.

Tabel 1. Indikator Penyusun IKM yang Diberi Skor 1 (Menunjukkan Kekurangan)

Dimensi	Indikator
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP)* o memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> o memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi o memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .
Standar hidup	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki listrik o tidak memiliki akses air minum bersih o tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai o menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar o memiliki rumah dengan lantai tanah o tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon, atau televisi .

*Menyesuaikan kondisi di Indonesia

Setiap orang diberi skor sesuai dengan kekurangan rumah tangganya menurut 10 indikator yang membentuknya. Skor maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikator sehingga setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara multidimensi, skor ke 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah *cut off point* (c) sebesar 33,3 persen yang setara dengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakan antara RT yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi.

- Jika $c \geq 33\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap miskin multidimensi.
- Jika $c \geq 50\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensi
- Jika $c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT tidak dianggap miskin multidimensi
- Jika $20\% \leq c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap rentan miskin multidimensi

Nilai IKM merupakan hasil perkalian antara multidimensi *Headcount Ratio* dan Intensitas atau luasnya kemiskinan.

Headcount ratio, H , adalah proporsi penduduk yang miskin :

$$H = \frac{q}{n}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensi miskin

n adalah total populasi.

Intensitas kemiskinan, A , mencerminkan proporsi tertimbang dari indikator, atau rata-rata kekurangan dari orang-orang miskin. Untuk rumah tangga miskin saja, nilai kekurangan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total orang miskin:

$$A = \frac{\sum_1^q c}{q}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensi miskin

c adalah skor kekurangan masing-masing RT .

IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu.

$$MPI = H.A = \frac{\sum_1^q c}{n}$$

Menggambarkan rata-rata kekurangan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang dialami penduduk.

Contoh:

Indikator	Rumah tangga				Weights
	1	2	3	4	
Jumlah Anggota Rumah Tangga	4	7	5	4	
Pendidikan					
• tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun	0	1	0	1	16,7%
• memiliki setidaknya satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah	0	1	0	0	16,7%
Kesehatan					
○ memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi	0	0	1	0	16,7%
○ memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .	1	1	1	1	16,7%
Kondisi perumahan					
○ tidak memiliki listrik	0	1	1	1	5,6%
○ tidak memiliki akses air minum bersih	0	0	1	0	5,6%
○ tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai	0	0	0	0	5,6%
○ menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar	1	1	1	1	5,6%
○ memiliki rumah dengan lantai tanah	0	1	0	1	5,6%
○ tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon , atau televisi .					
Skor kekurangan RT (c=jumlah tertimbang dari skor tertimbang RT)	22,2	72,7	38,9	50	
Apakah RT miskin ? (c > 33,3 %)	tidak	ya	ya	ya	

Headcount rasio (H) =

$$\left(\frac{7+5+4}{4+7+5+4}\right) = 0,8$$

(80 persen dari penduduk tinggal dalam RT miskin)

Intensitas kemiskinan (A) =

$$\frac{\left(\frac{7,27}{10} \times 7\right) + \left(\frac{3,89}{10} \times 5\right) + \left(\frac{5}{10} \times 4\right)}{(7+5+4)} = 0,5625$$

(rata-rata orang miskin mengalami kekurangan multidimensi sebesar 56 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) = $0,8 \times 0,5625 = 0,450$

(rata-rata penduduk mengalami kekurangan multidimensi sebesar 45 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Catatan Teknis 2. KETAHANAN PANGAN

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah dilakukan pendekatan dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan Pemanfaatan pangan. Keterbatasan data pada survey ini menyebabkan Indeks Ketahanan Pangan tidak bisa dilakukan tetapi didekati dengan melakukan scoring dari jawaban-jawaban pada kuesioner yang juga dikelompokkan menjadi tiga dimensi. Karena keterbatasan data tiap dimensi hanya diwakili 1 aspek masing-masing yaitu kecukupan pangan, keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial dan 2 aspek untuk dimensi pemanfaatan pangan diantaranya yaitu kecukupan asupan serta kualitas air.

Tabel 2. Dimensi Ketahanan Pangan

Dimensi	Aspek	Indikator	Skor ¹⁾
Ketersediaan pangan	Kecukupan pangan	Kecukupan persediaan pangan	0-6
		Tidak kekurangan pangan	0-3
		Ketakutan kekurangan pangan	0-3

Keterjangkauan/akses pangan	Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial	Pangan diproduksi di kecamatan	0-1
		Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian	0-1
		Harga pembelian tidak tinggi	0-1
Pemanfaatan pangan	Kecukupan asupan	Tidak ada balita yang kurang gizi	0-1
		Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	0-1
	Kualitas air	Sumber air minum utama	0-3
		Sumber air untuk masak yang utama	0-3

^{*)} Pembentukan skor dapat dilihat pada lampiran.

Pemberian skor untuk masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut:

I. Dimensi Ketersediaan pangan

Pengertian ketersediaan pangan dalam UU No.18 tahun 2012 adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari tiga indikator masing-masing kecukupan persediaan pangan, tidak kekurangan pangan, dan ketakutan kekurangan pangan.

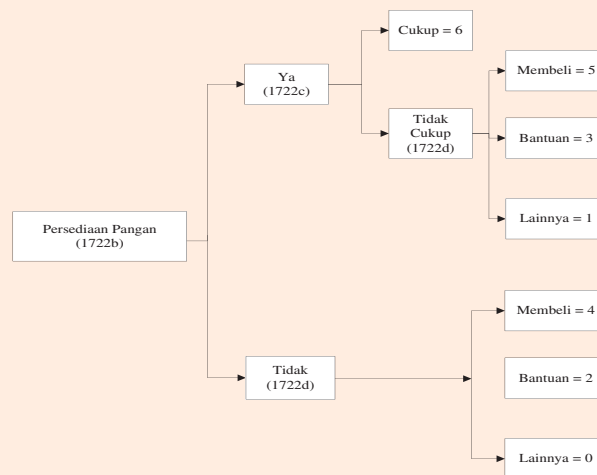
➤ Aspek Kecukupan pangan

1. Indikator Kecukupan persediaan pangan

Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumah tangga tersebut. Dalam

kuesioner SPP 2013 indikator ini dapatkan dari dari pertanyaan Rincian 1722b, Rincian 1722c dan Rincian 1722d.

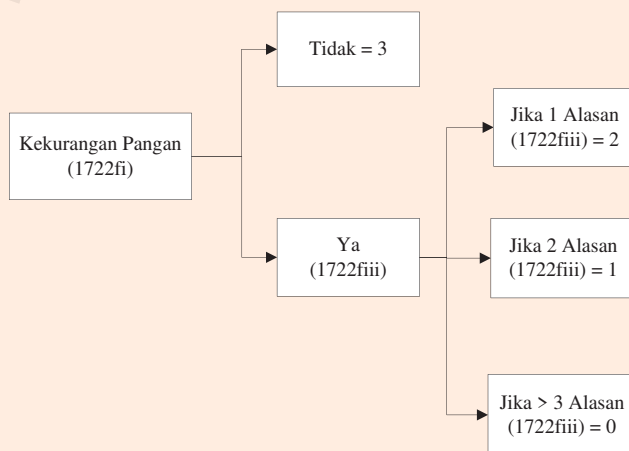
- Skor 6 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan cukup selama setahun yang lalu atau rumah tangga tidak mengalami *shortage* (kekurangan).
- Skor 5 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari membeli.
- Skor 4 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari membeli.
- Skor 3 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan bantuan.
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari bantuan.
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari lainnya.
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari lainnya.



2. Indikator Tidak kekurangan pangan

Kekurangan pangan merupakan kondisi tidak mampu mengonsumsi makanan sesuai kebiasaannya atau tidak mampu mempertahankan pola makan normal setiap saat selama periode setahun yang lalu dan merubah pola makan secara terpaksa seperti melewatkan makan, makan lebih sedikit, makan lebih murah, dan mungkin makanan kurang bergizi.

Pengukuran kekurangan makanan adalah dengan melihat Rincian 1722fi, Skor 3 diberikan apabila jawaban adalah tidak kekurangan pangan. Sedangkan apabila jawabannya ya diberi skor berdasarkan alasan/penyebab kekurangan pangan. Penyebab kekurangan pangan diartikan sebagai kejadian luar biasa seperti bencana alam, tanaman rusak/mati, kurangnya lahan, tidak ada pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit/cedera/tua, kurangnya modal, terlalu banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, dan lain-lain. Penyebab kekurangan pangan dalam kuesioner ditunjukkan pada rincian 1722 fiii yang terbagi menjadi empat pilihan yaitu pendapatan rendah, lokasi terpencil, tidak tersedia, dan lainnya. Jika hanya memilih satu alasan maka diberi skor 2, skor 1 untuk 2 alasan, dan skor 0 untuk alasan lebih dari 3. Skor yang besar menunjukkan tidak adanya kekurangan pangan.

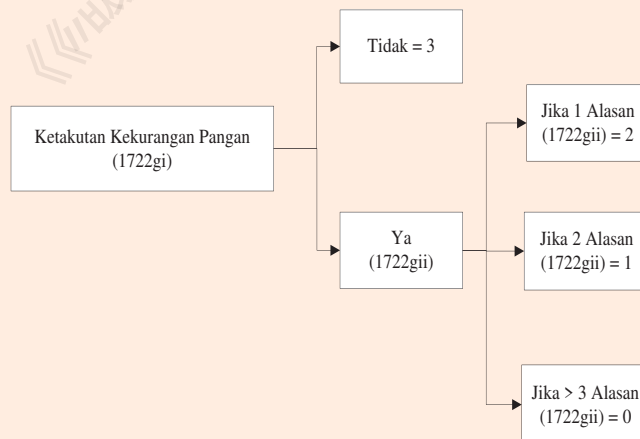


3. Indikator Ketakutan kekurangan pangan

Indikator ini mengukur rasa ketakutan akan kekurangan pangan untuk satu tahun ke depan dan alasan ketakutan akan kekurangan pangan dilihat dari rincian 1722gi dan 1722gii.

Ketakutan akan kekurangan pangan diartikan sebagai rasa takut terhadap situasi kekurangan makanan selama periode setahun yang akan datang karena ancaman bencana alam, rusak/matinya tanaman, kehilangan pekerjaan, atau faktor lainnya.

- Skor yang besar menunjukkan tidak adanya ketakutan kekurangan pangan.
- Skor 3 diberikan jika rumah tangga tidak ketakutan kekurangan pangan
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 1 penyebab
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 2 penyebab
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 3 penyebab



II. Dimensi Keterjangkauan/akses pangan

Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

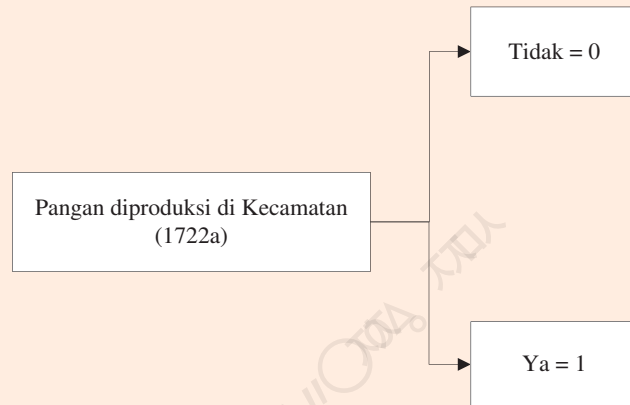
Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh sumber penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan. Dimensi keterjangkauan terdiri dari satu aspek yaitu aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek ini dibentuk oleh tiga indikator yaitu Indikator Pangan yang diproduksi di Kecamatan, Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian, dan Indikator Harga pembelian tidak tinggi.

➤ Aspek Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

1. Indikator Pangan diproduksi di kecamatan

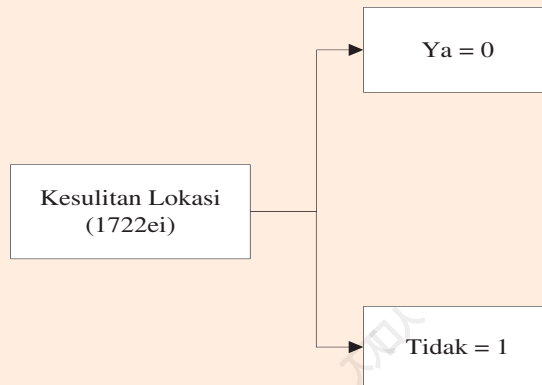
Pangan yang sebagian besar diproduksi di kecamatan menunjukkan kemudahan akses memperoleh pangan. Jika sebagian besar pangan diproduksi di kecamatan maka akan memudahkan orang-orang sekitar dalam mencukupi kebutuhannya. Tempat tinggal yang dekat dengan tempat produksi akan memudahkan mendapatkan pangan serta persediaan pangan akan terus ada karena mudahnya akses yang dapat dijangkau, tanpa perlu mencari ke tempat yang lebih jauh. Jika pangan

diproduksi di kecamatan atau jika jawaban pada rincian 1722a adalah Ya maka skor 1 akan diberikan, dan 0 jika jawaban Tidak yang berarti pangan tidak diproduksi di kecamatan.



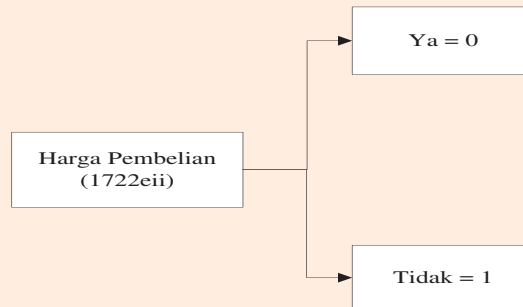
2. Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian

Ketersediaan yang cukup di suatu wilayah belum tentu menggambarkan wilayah tersebut bebas kerawanan pangan. Aksesibilitas untuk mendapatkan pangan yang sulit bisa menjadi penyebab kerawanan pangan. Kemudahan akses akan memudahkan perolehan pangan yang dibutuhkan. Ada tidaknya kesulitan menjangkau lokasi pembelian pangan diukur dengan melihat rincian 1722ei. Jika tidak terdapat kesulitan maka diberi skor 1 dan jika terdapat kesulitan maka diberi skor 0.



3. Indikator Harga pembelian tidak tinggi

Indikator ketiga yang mengukur dimensi keterjangkauan/akses pangan adalah harga pembelian. Ketersediaan pangan yang cukup, lokasi pembelian pangan yang mudah dijangkau akan tetapi harga pembelian pangan tinggi dapat menyebabkan kerawanan pangan. Harga pembelian ini menunjukkan keterjangkauan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang baik akan memudahkan mendapatkan pangan meskipun dengan harga yang tinggi. Berbeda dengan rumah tangga yang kondisi ekonominya buruk atau berkategori miskin. Harga yang terlalu tinggi akan menyulitkan rumah tangga untuk membeli kebutuhan hidupnya baik sandang maupun pangan. Indikator ini diwakili dalam kuesioner pada rincian 1722eii. Skor 1 menunjukkan harga pembelian yang tidak tinggi dan skor 0 jika harga pembelian tinggi.



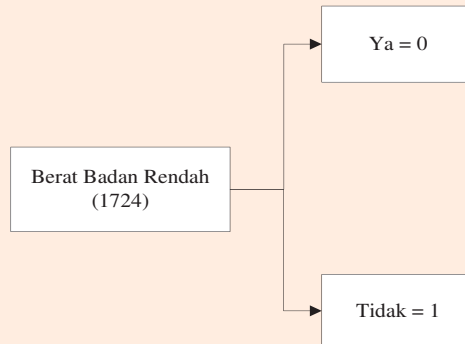
III. Dimensi Pemanfaatan pangan

Pemanfaatan pangan meliputi penggunaan pangan oleh rumah tangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumah tangga. Dimensi pemanfaatan pangan diwakili dua aspek yaitu kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator yaitu tidak ada balita yang kurang gizi dan tidak ada balita yang meninggal karena sakit. Aspek yang kedua adalah kualitas air yang diukur oleh dua indikator yaitu sumber air minum utama dan sumber air masak utama.

➤ Aspek Kecukupan asupan

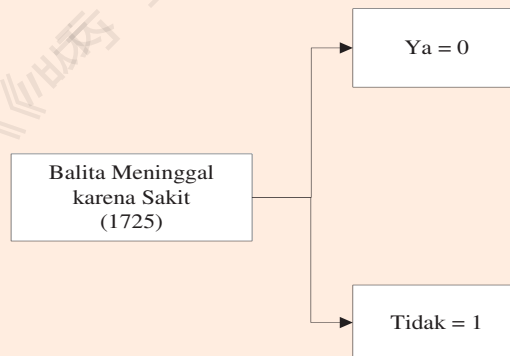
1. Indikator Tidak ada balita yang kurang gizi

Status kesehatan rumah tangga dapat dilihat dengan ada tidaknya balita yang kekurangan gizi atau berat badan yang rendah. Kurangnya gizi pada balita mencerminkan asupan yang kurang pada rumah tangga tersebut. Berat badan balita di bawah normal dapat diketahui dari Kartu Menuju Sehat (KMS) dari Posyandu yaitu berat badan di bawah garis merah. Pertanyaan mengenai balita yang kurang gizi terdapat pada rincian 1724. Skor 1 diberikan jika tidak terdapat balita yang memiliki berat badan rendah sedangkan skor 0 jika terdapat balita dengan berat badan rendah.



2. Indikator Tidak ada balita yang meninggal karena sakit

Indikator lain yang mengukur kurangnya asupan adalah ada tidaknya balita yang meninggal karena sakit. Seperti halnya indikator pertama yaitu balita dengan berat badan rendah, indikator ini mencerminkan kesehatan rumah tangga, yang terwakili dari kuesioner rincian 1725. Skor 1 jika tidak terdapat balita yang meninggal karena sakit. Skor 0 jika terdapat balita yang meninggal karena sakit.

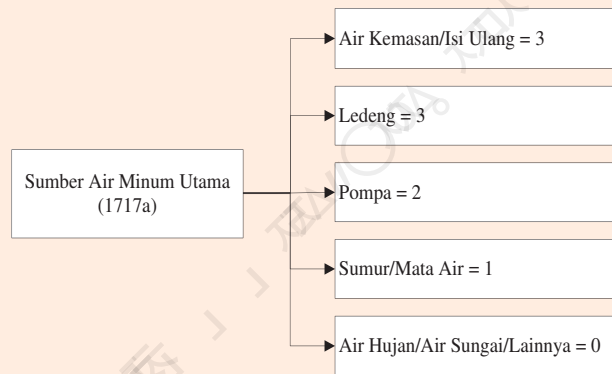


➤ Aspek Kualitas air

1. Indikator Sumber air minum utama

Selain kecukupan asupan, aspek lain yang mewakili dimensi pemanfaatan pangan adalah kualitas air. Salah satu indikator yang mengukur kualitas air yaitu sumber air

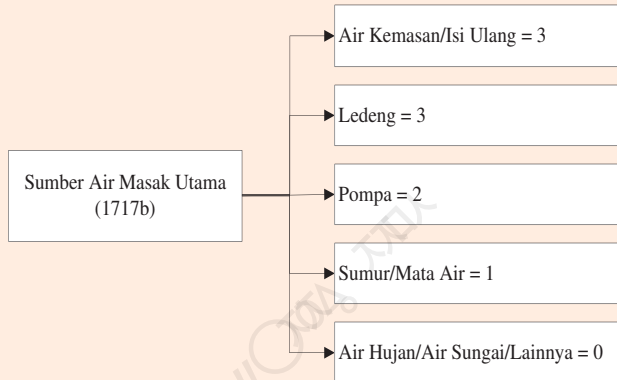
utama. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717a yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air, air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5. Skor 3 diberikan jika sumber air minum utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



2. Indikator Sumber air untuk memasak utama

Indikator kedua yang mengukur aspek kualitas air adalah sumber air masak utama. Pemanfaatan air untuk masak menggambarkan dimensi pemanfaatan pangan rumah tangga. Air yang digunakan untuk memasak baik atau tidaknya akan memengaruhi kesehatan bagi anggota rumah tangga. Semakin baik kualitas air yang dimanfaatkan untuk memasak akan menghindarkan anggota rumah tangga mengalami kesehatan yang buruk. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717b yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air, air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5 seperti pada sumber air minum utama. Skor 3 diberikan jika

sumber air masak utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah

Kemungkinan Skor:

No.	Dimensi	Total Skor	
		Min	Maks
1.	Ketersediaan Pangan	0	12
2.	Keterjangkauan/Akses Pangan	0	3
3.	Pemanfaatan Pangan		
	Aspek kecukupan asupan	0	2
	Aspek kualitas air	0	8

Rata-rata skor untuk masing-masing dimensi disimbolkan dengan \bar{X}_i ,
dimana i menunjukkan dimensi,

1. Rata-rata skor dimensi Ketersediaan pangan (\bar{X}_1)
Terdiri dari satu aspek yaitu kecukupan pangan.

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n} \right)}{12} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 1$ (dimensi ketersediaan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan pangan)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk aspek kecukupan pangan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

2. Rata-rata skor dimensi Keterjangkauan/akses pangan (X_2)
Terdiri dari satu aspek yaitu keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n} \right)}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 2$ (dimensi keterjangkauan/akses pangan)

$j = 1$ (aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

3. Rata-rata skor dimensi Pemanfaatan pangan (X_3)

Terdiri dari dua aspek, yaitu

- Aspek Kecukupan asupan (X_{31})

$$\bar{X}_{31} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right)}{2} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan asupan)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kecukupan asupan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

- Aspek Kualitas air

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 2$ (aspek kualitas air)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kualitas air)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

Sehingga, rata-rata skor untuk dimensi ketahanan pangan, yaitu:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2}$$

Jadi, **Indeks Ketahanan Pangan**, dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$$

Dimana rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$

Untuk melihat apakah rata-rata rumah tangga di suatu wilayah ketahanan pangannya baik atau tidak maka Indeks Ketahanan Pangan masing-masing wilayah akan dibandingkan dengan Indeks Ketahanan

	○ Harga pembelian tidak tinggi	1	1	0	0	2		
Pemanfaatan Pangan	Kecukupan Asupan						6	24
	○ Tidak ada balita yang kurang gizi	1	1	0	1	3		
	○ Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	1	1	1	0	3		
	Kecukupan Asupan							
	○ Sumber air minum utama	3	3	1	2	9	18	
	○ Sumber air untuk masak yang utama	3	3	1	2	9		

- 1) Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan:

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n} = \frac{(15+6+3)}{4} = 6$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{11kl}}{n} \right)}{12} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(15+6+3)}{4} \right)}{12} \times 100\% = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

- 2) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n} = \frac{(3+3+2)}{4} = 2$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{21kl}}{n} \right)}{3} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(3+3+2)}{4} \right)}{3} \times 100\% = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

3) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:

a. Aspek Kecukupan asupan:

$$\bar{X}_{31} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} = \frac{(3+3)}{4} = 1,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right)}{2} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(3+3)}{4} \right)}{2} \times 100\% = \frac{1,5}{2} \times 100\% = 75\%$$

b. Aspek Kualitas air:

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} = \frac{(9+9)}{4} = 4,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right)}{6} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(9+9)}{4} \right)}{6} \times 100\% = \frac{4,5}{6} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga rata-rata skor untuk dimensi pemanfaatan pangan:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2} = \frac{(75\% + 75\%)}{2} = 75\%$$

Jadi, Indeks ketahanan pangannya adalah

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3} = \frac{(50\% + 66,67\% + 75\%)}{3} = 63,89\%$$

Untuk kategori ketahanan pangan maka dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan RTUP

Ketahanan pangan suatu wilayah belum tentu menggambarkan ketahanan pangan rumah tangganya. Oleh karena itu akan dilihat juga bagaimana ketahanan pangan pada level yang paling kecil (rumah tangga).

1. Dimensi ketersediaan pangan

Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan

$$\bar{y}_{1i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{1k}}{12}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

2. Dimensi keterjangkauan/akses pangan

Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan

$$\bar{y}_{2i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{2k}}{3}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

3. Dimensi pemanfaatan pangan

Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{31i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{31k}}{2}$$

Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{32i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{32k}}{2}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2$ (indikator untuk setiap aspek)

Rata-rata skor dimensi pemanfaatan pangan

$$\bar{y}_{3i} = \frac{\bar{y}_{31i} + \bar{y}_{32i}}{2}$$

➤ **Rata-rata skor ketahanan pangan rumah tangga:**

$$\bar{y}_i = \frac{\bar{y}_{1i} + \bar{y}_{2i} + \bar{y}_{3i}}{3}$$

DIMENSI	ASPEK DAN INDIKATOR	RUMAH TANGGA				SKOR MAX DIMENSI
		1	2	3	4	
KETERSEDIAAN PANGAN	KECUKUPAN PANGAN					
	KECUKUPAN PERSEDIAAN PANGAN	4	6	2	3	12
	TIDAK KEKURANGAN PANGAN	3	3	0	0	
	KETAKUTAN KEKURANGAN PANGAN	1	2	0	0	
	TOTAL SKOR	8	11	2	3	
	RATA-RATA SKOR DIMENSI KECUKUPAN PANGAN	8/12	11/12	2/12	3/12	
KETERJANGKAUAN/ AKSES PANGAN	KETERJANGKAUAN FISIK, EKONOMI, SOSIAL					
	PANGAN DIPRODUKSI DI KECAMATAN	1	1	0	1	3
	TIDAK MENGALAMI KESULITAN MENJANGKAU LOKASI PEMBELIAN	1	1	0	1	
	HARGA PEMBELIAN TIDAK TINGGI	1	1	0	0	
	TOTAL SKOR	3	3	0	2	
	RATA-RATA SKOR DIMENSI KETERJANGKAUAN PANGAN	3/3	3/3	0/3	2/3	

	KECUKUPAN ASUPAN				
	TIDAK ADA BALITA YANG KURANG GIZI	1	1	0	1
	TIDAK ADA BALITA YANG MENINGGAL KARENA SAKIT	1	1	1	0
	TOTAL SKOR	2	2	1	1
	RATA-RATA SKOR ASPEK KECUKUPAN PANGAN	2/2	2/2	1/2	1/2
PEMANFAATAN PANGAN	KECUKUPAN ASUPAN				
	SUMBER AIR MINUM UTAMA	3	3	1	2
	SUMBER AIR UNTUK MASAK YANG UTAMA	3	3	1	2
	TOTAL SKOR	6	6	2	4
	RATA-RATA SKOR ASPEK KECUKUPAN PANGAN	6/8	6/8	2/8	4/8
	RATA-RATA SKOR DIMENSI PEMANFAATAN PANGAN	1,75/2	1,75/2	0,75/2	1/2
	SKOR KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA	0,847	0,931	0,181	0,472

ST2013 SURVEI PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN 978-979-664-789-3



9 789790 664789 >